

**TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)**

**PENINGKATAN KEMAMPUAN EKONOMI  
MASYARAKAT PESISIR DI KABUPATEN  
BANGKA BARAT**



**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Magister Sains dalam Ilmu Administrasi  
Bidang Minat Administrasi Publik**

**Disusun Oleh :**

**RINALDY**

**NIM. 015584669**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS TERBUKA  
JAKARTA  
2010**



**UNIVERSITAS TERBUKA  
PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

**PERNYATAAN**

TAPM yang berjudul Peningkatan Kemampuan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Kabupaten Bangka Barat adalah hasil karya saya sendiri dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Pangkalpinang, Desember 2010

Yang menyatakan,

METERAI  
TEMPEL  
PILIH MABANDON BANGKA  
10  
9D504AAF502958384  
RINAM RIBU RUTIAH  
6000  
DJP  


(Rinaldy)

NIM. 015584669

UNIVERSITAS TERBUKA  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

PENGESAHAN

Nama : Rinaldy  
NIM : 015584669  
Program Studi : Magister Administrasi Publik  
Judul Tesis : Peningkatan Kemampuan Ekonomi Masyarakat Pesisir di  
Kabupaten Bangka Barat

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister  
(TAPM) Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka  
pada :

Hari/Tanggal : Minggu, 12 Desember 2010

W a k t u : 10.00 WIB - 12.00 WIB

Dan telah dinyatakan LULUS/~~TIDAK LULUS~~

**Panitia Penguji TAPM**

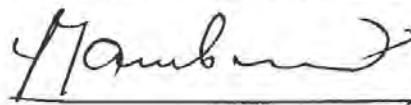
Ketua Komisi Penguji : Dr. Maman Rumanta, M.Si



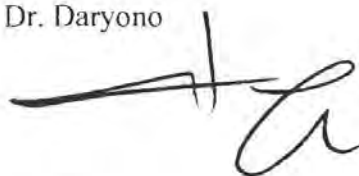
Penguji Ahli : Prof. Dr. Ngadisah, MA.



Pembimbing I : Dr. Rudy P. Tambunan



Pembimbing II : Dr. Daryono







## KATA PENGANTAR

Pertama-tama penulis memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini. Penulisan TAPM yang berjudul “Peningkatan Kemampuan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Kabupaten Bangka Barat” disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Sains Program Pascasarjana Universitas Terbuka. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sejak perkuliahan sampai pada penulisan dan penyusunan TAPM, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan TAPM ini. Oleh karena itu, dengan penuh ketulusan hati dan rasa syukur penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada

1. Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka, Suciati, M.Sc. Ph.D.;
2. Kepala UPBJJ-UT Pangkalpinang, Dr. Maman Rumanta, M.Si. beserta staf dan segenap pembimbing tutorial, selaku penyelenggara Program Pascasarjana;
3. Asisten Direktur I Program Pascasarjana Universitas Terbuka, Dr. Ir. Sri Harijati, MA;
4. Ketua Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik selaku penanggung jawab Program Magister Administrasi Publik, Dra. Susanti, M.Si.;
5. Pembimbing I, Dr. Rudy P. Tambunan, dan Pembimbing II, Dr. Daryono yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan TAPM ini;

6. Bupati Bangka Barat beserta jajarannya yang telah banyak membantu penulis saat turun lapangan untuk mendapatkan data;
7. Orang tua, istri tercinta, anak-anakku tersayang dan adik-adik ku yang telah memberikan bantuan dan dukungan materil dan moril;
8. Sahabat yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan TAPM ini.

Penulis berharap semoga Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis. Penulis menyadari bahwa apa yang telah diperbuat oleh penulis ini masih belum sempurna. Kritik, saran dan masukan terhadap penulisan TAPM ini akan menjadi kontribusi yang sangat berguna untuk kesempurnaannya. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak terkait sebagai pengetahuan dan perbandingan, baik bagi akademisi maupun praktisi.

Pangkalpinang, Desember 2010

Penulis





**ABSTRACT****Improving Economic of the Coastal Communities  
in West Bangka Regency****Rinaldy****Universitas Terbuka****rinaldybabel@yahoo.co.id**

Key words : Coastal Communities, Improving Economic

The poverty of coastal communities is caused by several factors such as: limited access to resources, which is still a traditional mean, and to quality human resource. The government through the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries provides a program to address this issue by introduction of the Coastal Community Economic Empowerment program. This research aims to understand about: 1) How is the figures of economic of coastal communities in West Bangka regency in terms of housing quality, fulfillment of basic needs, health condition and education attainment, 2) how is the policy of the Provincial Government of Bangka Belitung Archipelago and West Bangka Regency government of improvement of coastal economic communities, and 3) How can people understand about the implementation of the policy in improving economic of coastal communities.

This research uses a qualitative descriptive research with exploratory methods to determines the impact of coastal communities which had received the intervention program. Subjects research is coastal communities which received the policy program of economic empowerment of coastal communities. Technique of collecting data in this research carried out by collecting primary data and secondary data. The data was collected using interview techniques, field notes, documents, literature study, and observation. This research uses data analysis techniques in descriptive qualitative with evaluative methods, namely data analysis in the description of Improving Economic of the Coastal Communities.

The results of this research indicate that there is Improving Economic of the Coastal Communities in West Bangka Regency Basically. Improving Economic of the Coastal Communities in West Bangka Regency was refer to the policy direction of Bangka Belitung Archipelago Province. Implementation of policies and programs of economic empowerment of coastal communities is determined not only how internal and external structure of the executive bureaucracy, but also by understanding the coastal communities to the policy programs that determine the quality achievement of Improving Economic of the Coastal Communities.

In conclusion, this research proves that the policy to improve of the economic ability of coastal communities in West Bangka Regency quite successful.



**ABSTRAK****Peningkatan Kemampuan Ekonomi Masyarakat Pesisir  
di Kabupaten Bangka Barat****Rinaldy****Universitas Terbuka****rinaldybabel@yahoo.co.id**

Kata Kunci : Masyarakat Pesisir, Kemampuan Ekonomi

Pada dasarnya kemiskinan masyarakat pesisir disebabkan oleh beberapa faktor seperti : akses modal, alat tangkap yang masih tradisional, dan kemampuan sumber daya manusia. Untuk itu pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan fasilitasi untuk mengatasi masalah tersebut melalui program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui beberapa hal yaitu : 1) Bagaimana gambaran kemampuan ekonomi masyarakat pesisir di Kabupaten Bangka Barat apabila dilihat dari indikator kualitas pemukiman, pemenuhan kebutuhan dasar, kesehatan dan pendidikan, 2) Bagaimanakah kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten Bangka Barat dibidang peningkatan ekonomi masyarakat pesisir, dan 3) Bagaimana pemahaman masyarakat tentang implementasi kebijakan peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat pesisir.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis penelitian deskriptif kualitatif dengan metode eksploratif untuk mengetahui dampak dari masyarakat pesisir yang telah memperoleh intervensi program. Subyek penelitian adalah masyarakat pesisir yang menerima program kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik wawancara, catatan lapangan, dokumen, studi kepustakaan, dan observasi. Penelitian ini mempergunakan teknik analisis data secara deskriptif kualitatif dengan metode evaluatif, yakni analisis data dalam uraian tentang peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat pesisir.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat pesisir di Kabupaten Bangka Barat. Pada dasarnya peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat pesisir di Kabupaten Bangka Barat sudah mengacu ke arah kebijakan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Implementasi kebijakan program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir yang ditentukan bukan hanya bagaimana struktur internal dan eksternal birokrasi pelaksana maupun perumus program, tetapi juga oleh pemahaman masyarakat pesisir terhadap program kebijakan tersebut yang sangat menentukan kualitas capaian program peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat pesisir.

Kesimpulannya penelitian ini membuktikan bahwa kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir untuk meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat pesisir di Kabupaten Bangka Barat cukup berhasil.



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN .....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN .....	iii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	x
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiv
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian .....	9
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA .....	10
A. Kajian Teoritik .....	10
B. Kerangka Berpikir .....	44
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN .....	38
A. Desain Penelitian .....	38
B. Definisi Konsep dan Operasional .....	38
C. Populasi, Sampel dan Responden .....	41
D. Instrumen Penelitian .....	43
E. Teknik Pengumpulan Data .....	44
F. Prosedur Pengumpulan Data .....	45
G. Metode Analisis Data .....	45
H. Informan .....	47
BAB IV. TEMUAN DAN PEMBAHASAN .....	49
A. Temuan .....	49
B. Pemahaman Masyarakat Terhadap Implementasi Kebijakan Peningkatan Kemampuan Ekonomi Masyarakat Pesisir .....	89
C. Pembahasan .....	91
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN .....	149
A. Kesimpulan .....	149
B. Saran .....	151
DAFTAR PUSTAKA .....	153



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn .....	15
Gambar 2.2	Model Implementasi Kebijakan Grindle .....	16
Gambar 2.3	Model Implementasi Kebijakan Sabatier & Mazmanian .....	18
Gambar 2.4	Model Implementasi Kebijakan George Edward III .....	19
Gambar 2.5	Model Implementasi Kebijakan Cheema dan Rondinelli .....	20
Gambar 2.6	Kerangka Pemikiran .....	46
Gambar 4.1	Grafik Jumlah Penduduk (WNI+WNA) per Kecamatan, Luas Daerah ( $Km^2$ ), Jenis Kelamin, dan Kepadatan per $Km^2$ di Kabupaten Bangka Barat 2008 .....	51
Gambar 4.2	Grafik Jumlah Penduduk (WNI+WNA) Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2003 – 2008 .....	52
Gambar 4.3	Grafik Jumlah Penduduk Usia Kerja (15 Tahun Ke Atas) Menurut Kegiatan Utama di Daerah Pesisir Kabupaten Bangka Barat 2008 .....	55
Gambar 4.4	Grafik Jumlah Penduduk Usia Kerja (15 Tahun Ke Atas) di Daerah Pesisir Kab. Bangka Barat Tahun 2003 – 2008 .....	55
Gambar 4.5	Grafik Jumlah Produksi Ikan Laut Per-Kecamatan di Kabupaten Bangka Barat 2008 .....	66
Gambar 4.6	Grafik Jumlah Nilai (000 Rp.) Ikan Laut Per-Kecamatan di Kabupaten Bangka Barat 2008 .....	66

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Definisi Operasional .....	40
Tabel 4.1	Jarak Ibukota Kabupaten Bangka Barat ke Ibukota Kabupaten Lain dan Ibukota Provinsi (Pangkalpinang) .....	50
Tabel 4.2	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Daerah Pesisir Kabupaten Bangka Barat 2008 .....	53
Tabel 4.3	Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid per Kecamatan, serta Status Guru dan Jenis Kelamin Murid SD Negeri Di Daerah Pesisir Kab. Bangka Barat 2008 .....	57
Tabel 4.4	Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid per Kecamatan, serta Status Guru dan Jenis Kelamin Murid SMP Negeri Di Daerah Pesisir Kab. Bangka Barat 2008 .....	57
Tabel 4.5	Jumlah Penduduk yang Menderita Gangguan Kesehatan Dirinci Menurut 10 Jenis Penyakit Terbanyak per Kec. di Daerah Pesisir Kab. Bangka Barat 2008 .....	60
Tabel 4.6	Jumlah Tenaga Paramedis Non Perawat Kesehatan Dirinci Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Daerah Pesisir Kab. Bangka Barat 2008 .....	61
Tabel 4.7	Jumlah Tenaga Paramedis per Kecamatan di Daerah Pesisir Kabupaten Bangka Barat 2008 .....	62
Tabel 4.8	Jumlah Tenaga Paramedis Perawat Kesehatan Dirinci Menurut Kecamatan di Daerah Pesisir Kabupaten Bangka Barat 2008 .....	62
Tabel 4.9	Jumlah BKIA, Balai Pengobatan, Puskesmas, Pustu, dan Apotik per Kecamatan di Daerah Pesisir Kab. Bangka Barat 2008 .....	64



Tabel 4.10	Jumlah Produksi Ikan Laut dan Nilainya di Kabupaten Bangka Barat 2006 – 2008 .....	65
Tabel 4.11	Jumlah Sarana Perahu/Kapal Penangkap Ikan Laut dan Jumlah Nelayan per Kecamatan di Kabupaten Bangka Barat 2008 .....	67
Tabel 4.12	Jumlah Rumah Tangga Perikanan Tangkap, Budidaya, Pengolahan, dan Pengumpul per Kecamatan di Kabupaten Bangka Barat 2008 .....	68
Tabel 4.13	Rumah Tidak Layak Huni di Pesisir Kabupaten Bangka Barat Tahun 2005 – 2009 .....	92
Tabel 4.14	Hasil Pendataan Keluarga per Kecamatan dan Pertahanan Keluarga Sejahtera di Daerah Pesisir Kabupaten Bangka Barat 2008 .....	92
Tabel 4.15	Angka Kematian Ibu yang Melahirkan dan Balita Gizi Buruk Di Daerah Pesisir Kabupaten Bangka Barat Tahun 2005 – 2009 .....	94
Tabel 4.16	Jumlah Anak Usia Sekolah yang Menempuh Pendidikan di Daerah Pesisir Kabupaten Bangka Barat Tahun 2005-2009 .....	95
Tabel 4.17	Penjabaran Kebijakan Peningkatan Kapasitas Kemampuan Ekonomi Masyarakat Pesisir antara Pusat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten Bangka Barat .....	105
Tabel 4.18	Data Perikanan di Kabupaten Bangka Barat .....	113
Tabel 4.19	Perkembangan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Kabupaten Bangka Barat Periode 2006-2009 .....	118
Tabel 4.20	Kegiatan Pembangunan Sektor Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bangka Barat 2005 .....	119
Tabel 4.21	Kegiatan Pembangunan Sektor Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bangka Barat 2006 .....	120
Tabel 4.22	Kegiatan Pembangunan Sektor Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bangka Barat 2007 .....	122

Tabel 4.23	Kegiatan Pembangunan Sektor Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bangka Barat 2008 .....	125
Tabel 4.24	Kegiatan Pembangunan Sektor Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bangka Barat 2009 .....	127

UNIVERSITAS TERBUKA

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran A.	Dokumentasi Penelitian .....	156
Lampiran B.	Transkrip Hasil Wawancara .....	162
Lampiran C.	Surat Izin Penelitian .....	200

**UNIVERSITAS TERBUKA**





## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara maritim yang membentang luas di khatulistiwa dari  $94^{\circ}$  BT- $141^{\circ}$  BT dan  $6^{\circ}$  LU- $11^{\circ}$  LS, dengan karakteristik sebagai negara kepulauan yang terdiri dari 17.508 pulau besar dan kecil serta memiliki garis pantai 81.000 km yang merupakan garis pantai terpanjang ke dua di dunia setelah Kanada. Wilayah laut Indonesia mencakup 12 mil dari garis pantai, selain itu Indonesia memiliki wilayah yuridiksi nasional yang meliputi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sejauh 12 mil dan landas kontingen sampai 350 mil dari garis pantai. Dengan ditetapkannya konvensi PBB tentang hukum laut Internasional 1982 wilayah laut yang dapat dimanfaatkan diperkirakan dapat mencapai 5,8 juta km<sup>2</sup> merupakan perairan ZEE (Dahuri, 2003 dalam <http://www.tokohindonesia.com>). Indonesia memiliki perairan yang sangat luas dengan garis pantai sepanjang 95.181 km sehingga memiliki potensi sumberdaya, terutama sumberdaya perikanan laut yang cukup besar, baik dari kuantitas maupun dari segi diversitas sehingga menjadi modal dalam pembangunan bangsa dan negara Indonesia. Selain itu, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, dengan jumlah pulau-pulau sekitar 17.504 pulau (Departemen Kelautan dan Perikanan, 2003).

Laut penting artinya untuk menjadikan bumi sebagai tempat kehidupan beranekaragam makhluk hidup, karena tergantung sumberdaya hayati dan non hayati yang sangat dibutuhkan, terutama untuk kelangsungan hidup organisme



dan pemanfaatannya secara langsung maupun tidak langsung. Mengingat urgensi laut dimasa sekarang ini peranan daerah pesisir dan lautan dengan cara membudidayakan dan masyarakat teknik pendedayagunaan. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan potensi perikanan melimpah, namun baru sebagian kecil dimanfaatkan dengan baik. Di samping itu, Indonesia juga mempunyai potensi perikanan darat yang baik dikembangkan untuk budidaya, penangkapan, pengolahan serta pemasaran. Selanjutnya dengan diakuinya ZEE Indonesia telah menambah potensi perikanan laut.

Sumberdaya ikan di perairan Timur Sumatera, khususnya di kawasan Bangka Belitung, terkenal sangat tinggi. Hal ini karena didukung oleh ekosistem pantai, estuaria, mangrove, dan terumbu karang, yang merupakan penyusun utama pulau-pulau di kawasan tersebut, sehingga menjadikannya tempat yang kaya dengan keanekaragaman sumberdaya hayati dan memiliki keindahan yang luar biasa sebagai wisata bahari. Namun potensi sumberdaya alam yang sangat kaya ini belum bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk kesejahteraan dan peningkatan taraf hidup masyarakat pesisir.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir secara terencana dan terstruktur telah dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sejak Tahun Anggaran 2001 melalui program yang langsung menyentuh masyarakat di kawasan pesisir, yaitu Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP). Namun pada kenyataannya hingga saat ini sebagian besar masyarakat pesisir, terutama nelayan masih merupakan bagian dari masyarakat yang tertinggal (miskin) dibandingkan dengan kelompok masyarakat lainnya.

Salah satu penyebab kemiskinan tersebut adalah belum mampunya masyarakat pesisir mengakses permodalan usaha dari lembaga perbankan. Hal ini terjadi karena keterbatasan informasi sumber-sumber pembiayaan yang dapat diakses, produk/program yang ada di perbankan, mekanisme dan persyaratan pengaksesan serta ketiadaan agunan. Oleh karena itu secara simultan perlu dilakukan pembinaan kepada masyarakat pesisir agar mampu mengakses permodalan dan mengelolanya secara benar. Melihat dari permasalahan tersebut perlunya diterapkan suatu kebijakan yang menyentuh langsung kepada masyarakat pesisir sehingga selain meningkatkan kesejahteraan, juga mendidik masyarakat nelayan pesisir. Hal ini bertambah lebih mandiri dan memiliki kemampuan dalam memanfaatkan sumberdaya alam secara optimal dan berkelanjutan. Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bangka Barat hingga saat ini telah melaksanakan kegiatan Program PEMP yang merupakan salah satu kegiatan Departemen Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan pendapatan masyarakat pesisir yang telah dikembangkan secara sistemik dan terstruktur di Kabupaten Bangka Barat.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP.18/MEN/2004 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir, bertujuan untuk mendorong keberhasilan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) di kabupaten/kota penerima Tahun Anggaran 2004. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kehidupan yang sejahtera dan mandiri, mengatasi kesulitan terhadap permodalan serta memberikan pembelajaran dan pendidikan terhadap masyarakat pesisir. Menjalankan kebijakan



ini maka diperlukan peran aktif pemerintah daerah setempat untuk menumbuhkembangkan Koperasi Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir Mikro Mitra Mina (LEPP M3)/Koperasi Perikanan menjadi koperasi yang mandiri.

Sejak Program PEMP dilaksanakan di Kabupaten Bangka Barat diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat pesisir dan untuk dapat memberikan bantuan modal kerja pada nelayan dan pembudidaya ikan serta masyarakat pesisir lainnya, menciptakan lapangan pekerjaan, kesempatan berusaha dan memperkuat kelembagaan koperasi perikanan yang ada di Kabupaten Bangka Barat. Adanya Program PEMP diharapkan para nelayan masyarakat pesisir akan terbantu dan merasa diperhatikan sehingga tidak ada kesenjangan sosial antara masyarakat pesisir dengan masyarakat lainnya. Sektor perikanan dapat dijadikan salah satu sumber penerimaan bagi daerah. Berdasarkan Undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan, disebutkan bahwa pengelolaan sumber daya ikan dalam semua kegiatannya yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran ditujukan kepada manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat, namun demikian dalam memanfaatkan sumber daya tersebut harus senantiasa menjaga kelestariannya. Hal ini berarti bahwa pengusahaan sumber daya perikanan harus seimbang dengan daya dukungnya, sehingga dapat memberikan manfaat secara terus menerus dan lestari.

.. Secara umum, sumberdaya kelautan terdiri atas sumberdaya dapat pulih (*renewable resources*), sumberdaya tidak dapat pulih (*non-renewable resources*),

dan jasa-jasa lingkungan kelautan (*environmental services*). Sumberdaya dapat pulih terdiri dari berbagai jenis ikan, udang, rumput laut, termasuk kegiatan budidaya pantai dan budidaya laut (*mariculture*). Sumberdaya tidak dapat pulih meliputi mineral, bahan tambang/galian, minyak bumi dan gas. Sedangkan yang termasuk jasa-jasa lingkungan kelautan adalah pariwisata dan perhubungan laut. Potensi sumberdaya kelautan ini belum banyak digarap secara optimal, karena selama ini upaya kita lebih banyak terkuras untuk mengelola sumberdaya yang ada di daratan yang hanya sepertiga dari luas negeri ini.

Mengenai sumber daya alam, maka tidak bisa lepas dari aspek pengelolaannya. Hal ini sangat berkaitan dengan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam tersebut. Bagi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat di era reformasi ini mendapat tantangan mendasar berupa bagaimana mempertahankan atau meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan tanpa merusak sumber daya alamnya. Pada bagian inilah peran penting kebijakan sangat diperlukan.

Menurut Malik dalam Feliatra (*Strategi Pembangunan Perikanan dan Kelautan Nasional Dalam Meningkatkan Devisa Negara ; 1998*) paling tidak ada 6 (enam) agenda pokok pembangunan sub sektor perikanan yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan pembangunan perikanan, yaitu :

*Pertama*, Pengembangan teknologi dan alat penangkapan, pasca penangkapan dan pengolahan hasil perikanan. Sasaran utamanya adalah meningkatkan kapasitas produksi perikanan, penyelamatan mutu hasil penangkapan dan pengolahan hasil untuk memperbesar nilai tambah hasil perikanan.

*Kedua*, Penataan pengembangan struktur dan kelembagaan sistem agribisnis perikanan yang mampu mengakomodir upaya pencapaian keunggulan daya saing. Dalam hal ini termasuk



penyeimbangan struktur hulu-hilir, baik pada kegiatan produksi maupun pemasaran.

*Ketiga*, Pengembangan organisasi bisnis nelayan dan jaringan-bisnisnya dalam kerangka pengembangan kemitraan agribisnis hulu-hilir, dan pengusaha besar-menengah-kecil. Sasaran utamanya adalah untuk meningkatkan kemampuan petani nelayan kecil dalam merebut nilai tambah yang ada, sehingga pendapatan riil petani nelayan dapat ditingkatkan.

*Keempat*, Pengembangan pasar, pengkajian preferensi konsumen dan pelembagaannya pada seluruh mata rantai agribisnis perikanan, mulai dari hulu hingga hilir. Sasaran utamanya adalah memperluas pasar ke negara-negara importir hasil perikanan.

*Kelima*, Pengembangan sumberdaya manusia yang sesuai dengan peranannya dalam mata rantai agribisnis perikanan. Dalam hal ini program-program pelatihan perlu direncanakan dengan baik dan materinya harus benar-benar diperlukan bukan sekedar dibutuhkan.

*Keenam*, Penyediaan prasarana perikanan antara lain seperti pelabuhan perikanan/PPI, saluran tambak dan prasarana pendukung berupa kapal-kapal ikan, listrik, telekomunikasi dan air bersih. Pengembangan perikanan perlu ditempatkan sebagai bagian dari pengembangan wilayah pesisir secara keseluruhan.

Kabupaten Bangka Barat mempunyai posisi sangat strategis karena terletak pada jalur pelayaran nasional maupun internasional. Posisi yang strategis ini berpengaruh positif bagi prospek perdagangan dengan luar negeri. Namun di sisi lain, posisi strategis ini juga mengandung implikasi adanya keharusan tindakan pengawasan yang ekstra ketat terhadap kapal-kapal asing yang masuk ke wilayah perairan terutama bagi kapal-kapal asing yang berusaha menangkap ikan secara ilegal. Kabupaten Bangka Barat merupakan daerah yang memiliki potensi untuk berkembangnya produksi dan pemasaran hasil perikanan. Hasil ekspor komoditi ikan yang berasal dari wilayah perairan, memegang peranan penting dalam pendapatan nasional. Potensi hasil perikanan itu juga memberikan kontribusi bagi pendapatan regional serta sebagai sumber penghasilan bagi nelayan di Kabupaten Bangka Barat.



Sub sektor perikanan di wilayah Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2007 didominasi oleh perikanan laut dengan jumlah produksi 6.846,40 ton jumlah hasil produksi tersebut berimbang kepada nilai (konversi), dimana nilai produksi yang dihasilkan sebesar Rp. 99.621.890.000,00,-. Produksi perikanan darat dengan kegiatan di perairan umum, kolam, sawah, keramba dan tambak berjumlah 256,78 ton jika dikonversikan maka nilai produksi yang dihasilkan sebesar Rp. 4.481.532.400,00,-. Besarnya volume produksi pada usaha perikanan, menggambarkan bahwa jumlah masyarakat nelayan cukup besar. Sumbangan produksi perikanan nelayan kecil tampaknya lebih dominan, namun karakteristik nelayan kecil selain dicirikan dengan peralatan yang sederhana juga modal yang digunakan terbatas. Hal ini berakibat rendahnya hasil yang diperoleh dan rendahnya pendapatan yang diterima oleh mereka. Nelayan kecil juga dihadapkan pada jaringan pemasaran yang pada umumnya dikuasai oleh pedagang besar ditambah lagi dengan ketidakberdayaan nelayan kecil menghadapi nelayan besar yang memiliki modal dan peralatan modern.

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) yang dicetuskan oleh Rokhmin Dahuri merupakan satu terobosan yang diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat nelayan khususnya yang ada di pesisir pantai dan memecahkan persoalan yang dihadapi para nelayan umumnya di Indonesia. Program ini untuk meningkatkan kesejahteraan para nelayan dan menjadi terobosan yang dapat meningkatkan akses para nelayan terhadap modal, manajemen dan teknologi yang dapat mentransformasi struktur dan kultur masyarakat pesisir dan nelayan secara berkelanjutan.

Masyarakat pesisir yang terdiri dari nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pedagang hasil laut dan masyarakat lainnya kehidupan sosial ekonominya tergantung pada sumberdaya kelautan dan umumnya tergolong miskin. Kemiskinan masyarakat pesisir itu lebih karena keterbatasan akses permodalan dan kultur kewirausahaan yang tidak kondusif. Bertitik tolak dari hal tersebut dan menyadari betapa pentingnya kesejahteraan para nelayan di wilayah pemerintahan Kabupaten Bangka Barat, maka perlu untuk diadakan penelitian tentang peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat pesisir di Kabupaten Bangka Barat.

#### **B. Perumusan Masalah**

Rumusan masalah yang akan diteliti dalam peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat pesisir di Kabupaten Bangka Barat adalah :

1. Bagaimana gambaran kemampuan ekonomi masyarakat pesisir di Kabupaten Bangka Barat apabila dilihat dari indikator kualitas pemukiman, pemenuhan kebutuhan dasar, kesehatan dan pendidikan?
2. Bagaimanakah kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten Bangka Barat dibidang peningkatan ekonomi masyarakat pesisir?
3. Bagaimana pemahaman masyarakat tentang implementasi kebijakan peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat pesisir?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian pada perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui gambaran kemampuan ekonomi masyarakat pesisir di Kabupaten Bangka Barat yang dilihat dari indikator kualitas pemukiman, pemenuhan kebutuhan dasar, kesehatan dan pendidikan.
2. Untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten Bangka Barat dibidang peningkatan ekonomi masyarakat pesisir.
3. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat tentang implementasi kebijakan peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat pesisir.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Selain itu diharapkan juga agar penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat dalam menentukan kebijakan-kebijakannya yang berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat pesisir di Kabupaten Bangka Barat.

Beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian ini di Kabupaten Bangka Barat, antara lain:

1. Manfaat Praktis, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan dan dimanfaatkan sebagai bahan masukan bagi pengambil kebijakan untuk mengembangkan konsep-konsep kebijakan perikanan dalam rangka pemberdayaan masyarakat pesisir.
2. Manfaat Teoritis, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan terhadap ilmu Administrasi Publik dibidang kajian Implementasi Kebijakan khususnya Program PEMP serta memberikan sumbangan informasi ilmiah untuk penelitian selanjutnya.







## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kajian Teoritik

##### 1. Kebijakan Publik

Berkaitan dengan analisis yang dilakukan, untuk lebih memahami permasalahan dalam penelitian kebijakan peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat pesisir di Kabupaten Bangka Barat, berikut akan diuraikan beberapa definisi atau konsep mengenai kebijakan publik. Banyak sekali definisi yang menjelaskan apa arti kebijakan yang dapat membantu memahami dalam menyoroti masalah yang berkaitan dengan kebijakan. Kata *policy* secara etimologis berasal dari kata *polis* dalam bahasa Yunani (Greek), yang berarti negara-kota. Berdasarkan bahasa Latin kata ini berubah menjadi *politia*, artinya negara. Menurut bahasa Inggris lama (*Middle English*), kata tersebut menjadi *policie*, yang pengertiannya berkaitan dengan urusan pemerintah atau administrasi pemerintah (Dunn, 1981, dalam Abidin, 2006:18). Istilah *policy* (kebijaksanaan) seringkali penggunaannya saling dipertukarkan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan (*goals*), program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan.

Menurut Anderson (dalam Nugroho, 2006:23) menyatakan bahwa “kebijakan merupakan arah tindakan sejumlah aktor dalam mengatasi masalah atau suatu persoalan. Konsep kebijakan ini memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan bukan apa yang diusulkan atau dimaksudkan”. Definisi ini berarti, pemerintah harus mempunyai kemampuan yang dapat diandalkan apapun bentuknya untuk merespon dan menanggulangi permasalahan yang dihadapi,

dengan memperhatikan sumber daya yang dimiliki serta menerima masukan atau usulan dari seseorang/kelompok, sehingga ada jalan keluar yang terbaik, dihasilkan melalui proses yang *fair*.

Secara sederhana kebijakan publik menurut Nugroho (2002:31) dapat dikelompokkan menjadi:

- 1) Kebijakan publik yang bersifat *makro* atau umum, atau mendasar (seperti di dalam Undang-undang No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 7 mengatur jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yaitu: a. UUD 1945. b. UU/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang. c. Peraturan Pemerintah. d. Peraturan Presiden. dan e. Peraturan Daerah).
- 2) Kebijakan publik yang bersifat *meso* atau menengah, atau penjabar pelaksanaan. Kebijakan ini dapat berbentuk Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, Peraturan Walikota. Kebijakannya dapat pula berbentuk Surat Keputusan Bersama atau SKB antar Menteri, Gubernur, dan Bupati atau Walikota.
- 3) Kebijakan publik yang bersifat *mikro* adalah kebijakan yang mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan di atasnya. Bentuk kebijakannya adalah peraturan yang dikeluarkan oleh aparat publik di bawah Menteri, Gubernur, Bupati dan Walikota.

Proses pembuatan kebijakan merupakan kegiatan yang tersusun secara bertahap dikemukakan Dunn (dalam Rahayu, 2001:18-19) sebagai berikut :

- 1) Tahapan penyusunan agenda digunakan untuk merumuskan masalah, mendefinisikan masalah dan memulai proses pembuatan kebijakan melalui penyusunan agenda.
- 2) Tahapan formulasi kebijakan, merupakan tahapan yang dilakukan oleh para pejabat instansi pemerintah untuk merumuskan alternatif kebijakan dalam mengatasi masalah. Dalam tahap ini teknik peramalan dapat dipergunakan untuk menyajikan pengetahuan mengenai timbulnya kemungkinan masalah ataupun kendala yang akan terjadi dalam pencapaian di masa mendatang akibat diambilnya suatu alternatif kebijakan.
- 3) Tahapan adopsi kebijakan, merupakan tahapan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Dalam tahap ini suatu rekomendasi diperlukan sebagai upaya untuk memahami biaya



- manfaat dari berbagai alternatif kebijakan dan segala kemungkinan akibatnya dimasa mendatang.
- 4) Tahapan implementasi kebijakan, merupakan tahapan dalam merealisasikan alternatif kebijakan yang telah dipilih.
  - 5) Tahapan penilaian (evaluasi) kebijakan, dengan melakukan suatu evaluasi guna mendapatkan pengetahuan yang relevan mengenai hasil kerja kebijakan.

Pada tahap formulasi kebijakan ini, para analis harus mengidentifikasi kemungkinan kebijakan yang dapat digunakan melalui prosedur *forecasting* untuk memecahkan masalah yang diikuti oleh konsekuensi dari setiap pilihan kebijakan yang dipilih.

Berbagai definisi-definisi yang disampaikan para ahli, dapat ditarik kesimpulan sebagaimana pendapat Effendi (1989) bahwa ciri kebijakan publik adalah:

- 1) Memecahkan masalah yang dihadapi publik yang tidak dapat diatasi oleh publik sendiri. Bila dapat dipecahkan publik sendiri, kebutuhan dasar oleh pasar, maka tak usah ada kebijakan publik.
- 2) Tindakan otoritas dari pemerintah (hanya dapat dilakukan pemerintah yang dapat memaksa agar kebijakan dilakukan).
- 3) Melaksanakan tugas dan fungsi dari pemerintah.

Berdasarkan hal tersebut berarti kebijakan mengenai perikanan termasuk kebijakan publik yang merupakan pedoman bagi pelaksanaan tugas dan fungsi dari pemerintah pada sektor perikanan, serta pemerintah mempunyai kewenangan untuk memaksa agar kebijakan perikanan ditaati oleh masyarakat atau pihak lain yang bergerak dalam aktivitas perikanan. Realisasi kebijakan publik perlu dianalisa secara cermat agar diketahui sampai berapa jauh memberikan mudharat bagi publik.

### a. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan ada beberapa pakar memberikan definisi, salah satunya menurut Nugroho (2006; 119):

rencana adalah 20 persen keberhasilan, implementasi adalah 60 persen sisanya. 20 persen sisanya adalah bagaimana kita mengendalikan implementasi. Implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat, karena di sini masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai dalam konsep, muncul dilapangan. Selain itu, ancaman utama adalah konsistensi implementasi.

Sabatier dan Mazmanian (dalam Nugroho, 2002:119) mengemukakan bahwa implementasi adalah upaya melaksanakan keputusan kebijakan. Pengkajian mengenai implementasi kebijakan adalah krusial bagi pengkajian publik dan kebijakan publik. Menurut Ripley (dalam Juliartha, 2007:119):

implementasi kebijakan merupakan kesatuan dan rangkaian kegiatan, dimana pelaksana mempunyai tanggung jawab secara hukum untuk mengatur program-program dengan sumber dayanya untuk dilaksanakan, sumber daya tersebut terdiri dari manusia, peralatan, tanah, dan dana.

Ripley menegaskan perumusan kebijakan publik merupakan hasil dari pengembangan dan pemilihan alternatif kebijakan yang akan dilaksanakan secara umum dari agenda yang dilaksanakan oleh pemerintah, untuk itu diperlukan pemahaman tentang bagaimana alur dari kegiatan pengambilan kebijakan dan produk yang dihasilkan.

Menurut Grindle (dalam Nugroho 2000:174) proses implementasi kebijaksanaan hanya dapat dimulai apabila tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang semula bersifat umum telah diperinci, program-program aksi telah dirancang dan sejumlah dana/biaya telah dialokasikan untuk mewujudkan tugas-tugas dan sasaran tersebut. Menurut Tangkilisan (2003:11-14) implementasi setiap



kebijakan adalah sebuah proses dinamis, yang meliputi interaksi berbagai variabel, meliputi komunikasi, sumberdaya, sikap dari implementor (*disposition*), struktur birokrasi, serta masalah dan prospek.

#### **b. Teori Implementasi Kebijakan**

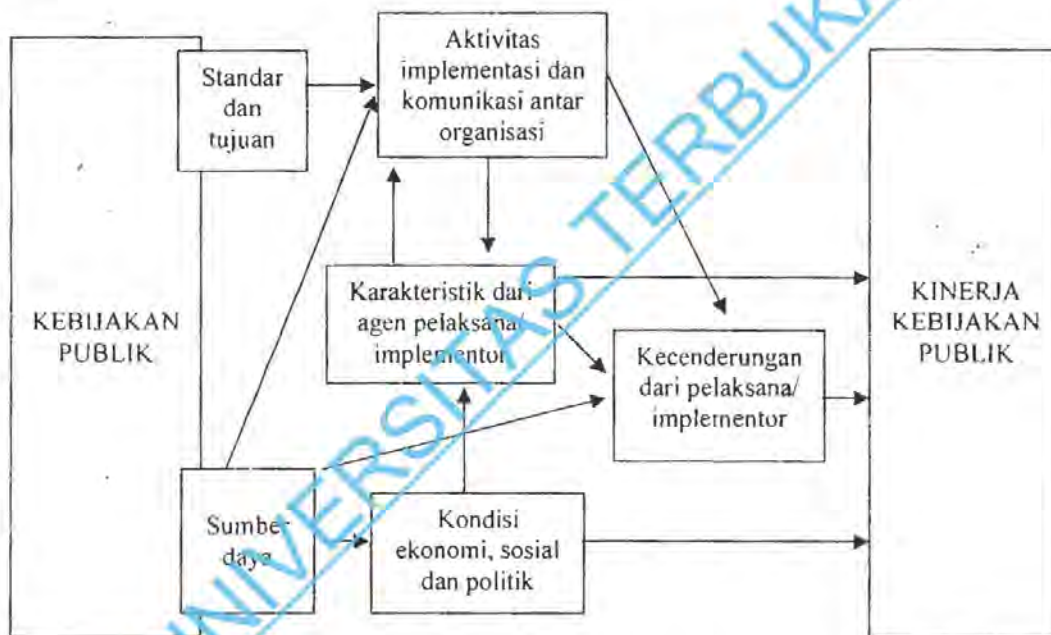
Kebijakan yang telah direkomendasikan untuk dipilih oleh *policy makers* bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut pasti berhasil dalam implementasinya. Ada banyak variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan baik yang bersifat individual maupun kelompok atau institusi. Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya *policy makers* untuk mempengaruhi perilaku birokrat pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran.

Umumnya kebijakan publik diimplementasikan oleh badan-badan pemerintah. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah dari hari ke hari yang membawa dampak pada warga negaranya. Menurut literatur administrasi negara klasik, politik dan administrasi dipisahkan. Kebijakan tersebut berhubungan dengan nilai keadilan, dan penentuan apa yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Administrasi berhubungan dengan implementasi apa yang akan dilakukan oleh negara.

Kenyataannya menunjukkan bahwa dalam praktik-praktik badan-badan pemerintah sering menghadapi pekerjaan di bawah mandat dari undang-undang yang terlalu makro dan mendua (*ambiguous*), sehingga memaksa mereka untuk membuat *diskresi*, untuk memutuskan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Berikut ini teori-teori implementasi dari beberapa ahli implementasi.

### 1) Teori Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn

Implementasi kebijakan akan berhasil apabila perubahan yang dikehendaki relatif sedikit, sementara kesepakatan terhadap tujuan, terutama dari mereka yang mengoperasikan program di lapangan relatif tinggi. Hal ini berarti bahwa jalan yang menghubungkan antara kebijakan dan prestasi kerja dipisahkan oleh sejumlah dimensi yaitu; a) standar dan sasaran kebijakan, b) sumber daya, c) komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, d) karakteristik agen pelaksana, e) kondisi ekonomi, politik dan sosial, f) sikap para pelaksana.



Gambar 2.1 Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn  
Sumber Nugroho 2004:128

### 2) Teori Implementasi Kebijakan Grindle

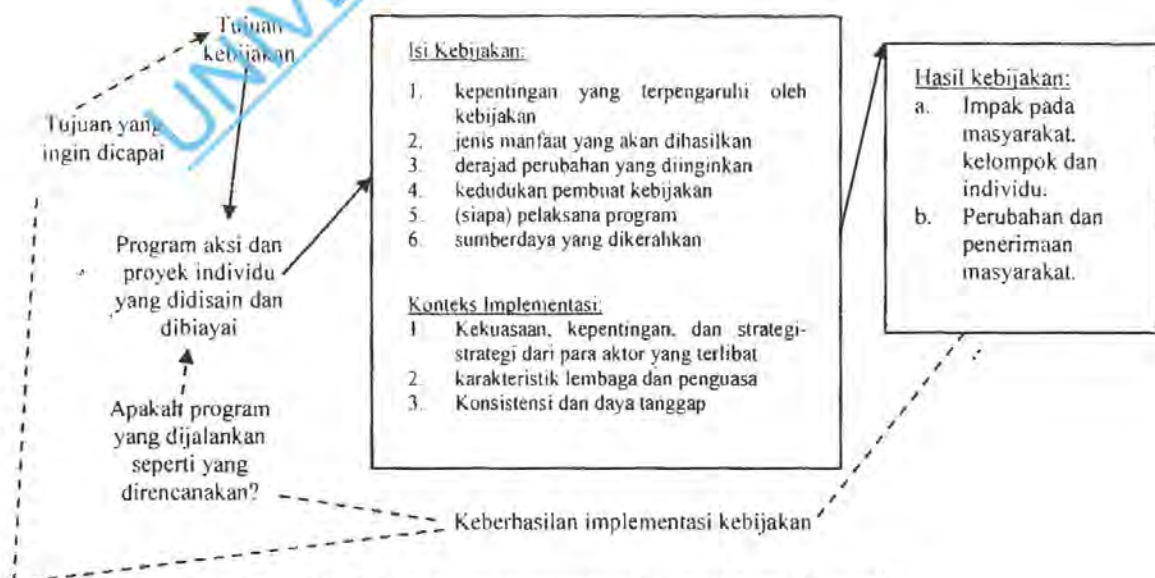
Keberhasilan implementasi menurut Grindle (dalam Nugroho, 2004:176) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yaitu isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Variabel isi kebijakan ini mencakup (1) Sejuahmana kepentingan kelompok sasaran atau *target groups* termuat isi kebijakan, (2) Jenis manfaat yang diterima oleh *target groups*, (3) Sejuahmana perubahan yang diinginkan dari



sebuah kebijakan. (4) Apakah letak sebuah program sudah tepat, (5) Apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan (6) Apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai.

Variabel lingkungan kebijakan mencakup (1) Seberapa besar kekuasaan, kepentingan dan strategi yang dimiliki oleh aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan, (2) karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa, dan (3) Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Kebijakan ditransformasikan menjadi program aksi maupun proyek individual, dengan penyediaan dana, maka implementasi kebijakan dilakukan. Pelaksanaannya sendiri tergantung pada *implementability* dari program, yang dapat dilihat dari isi kebijakan yang mencakup a) Kepentingan yang terpengaruhi, b) Jenis manfaat, c) Derajat perubahan, d) Kedudukan *Policy Maker*, dan e) Siapa pelaksananya. Kemudian sumber daya dan konteks kebijakan yang mencakup 1) Kekuasaan, kepentingan dan strategi pelaksanaan, 2) Karakteristik lembaga dan 3) Kepatuhan dan daya tanggap.



**Gambar 2.2 Model Implementasi Kebijakan Grindle**  
Sumber (dalam Nugroho 2004:176)

### 3) Teori Implementasi Kebijakan Sabatier dan Mazmanian

Duet Sabatier dan Mazmanian mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan ke dalam tiga variabel, yaitu :

- Pertama, variabel *independent*, yaitu mudah tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman objek, dan perubahan apa yang dikehendaki.
- Kedua, variabel *intervening*, yaitu variabel kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, dipergunakannya teori kausal, ketepatan sumber dana alokasi dana, keterpaduan hiera kis diantara lembaga pelaksana, aturan pelaksana dari lembaga pelaksana, dan perekrutan pejabat pelaksana, dan keterbukaan kepada pihak luar; dan variabel diluar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi sosio-ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dan *resources* dari konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi, serta komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana.
- Ketiga, variabel *dependent*, yaitu tahapan dalam proses implementasi dengan lima tahapan, yaitu pemahaman dari lembaga/badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana, kepatuhan objek, hasil nyata, penerimaan atas hasil nyata tersebut, dan akhirnya mengarah kepada revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan tersebut atau keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar.





**Gambar 2.3 Model Implementasi Kebijakan Sabatier & Mazmanian**  
 Dimodifikasi dari sumber Nugroho (2004:130)

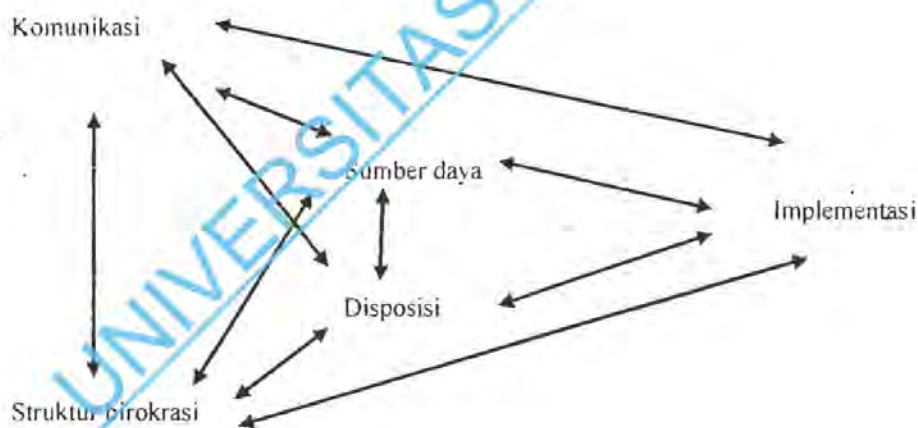
#### 4) Teori Implementasi Kebijakan Edward III

Teori implementasi kebijakan Edward III (1980) dalam Juliartha (2007: 137-139) ini dimulai dengan pertanyaan prakondisi-prakondisi apa untuk membuat implementasi kebijakan yang berhasil? Berkaitan dengan pertanyaan ini, Edward III dalam Tangkilisan (2003: 11-14), menjawab bahwa yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan ada empat variabel krusial yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, atau sikap para pelaksana dan struktur birokrasi. Ditegaskan oleh Edward III (1980:1) bahwa masalah utama dari administrasi publik adalah *“lack of attention to implementation bahwa without effective implementation the decision of policy makers will not be carried out successfully”*.

Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan kepada organisasi dan/atau publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggap dari para pihak yang terlibat dan bagaimana struktur organisasi pelaksanaan kebijakan.

Dijelaskan oleh Edward III (dalam Tangkilisan, 2003, 19-20) secara singkat bahwa:

pedoman yang tidak akurat, jelas atau konsisten akan memberikan kesempatan kepada *implementors* membuat diskresi. Diskresi ini bisa langsung dilaksanakan atau dengan jalan membuat petunjuk lebih lanjut yang ditujukan kepada pelaksana tingkat bawahnya. Jika komunikasi tidak baik maka diskresi ini akan memunculkan disposisi. Sebaliknya jika komunikasi yang terlampaui detail akan mempengaruhi moral dan independensi implementor, bergesernya tujuan dan terjadinya pemborosan sumber daya seperti ketrampilan, kreatifitas dan kemampuan adaptasi. Sumber daya saling keterkaitan dengan komunikasi dan mempengaruhi disposisi dalam implementasi.



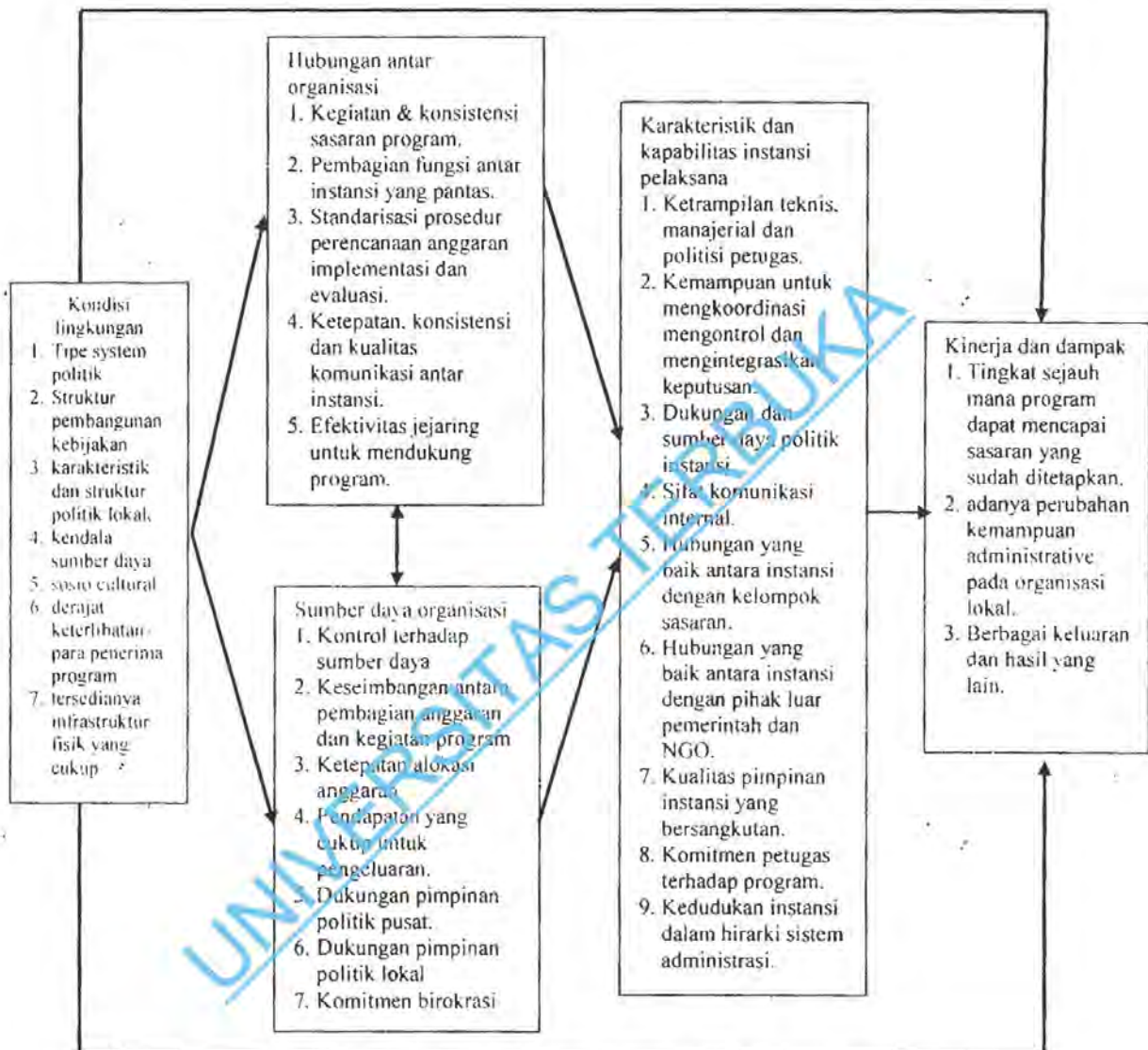
**Gambar 2.4 Model Implementasi Kebijakan George Edward III**  
*Sumber Nugroho (2004:140-141)*

##### 5) Teori Implementasi Kebijakan Cheema dan Rondinelli

Menurut Cheema dan Rondinelli (Subarsono, 2005:101) ada empat kelompok variabel yang dapat mempengaruhi kinerja dan dampak suatu program,



yaitu kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumber daya organisasi untuk implementasi program, karakteristik dan kemampuan agen pelaksana. Bila digambarkan dapat dilihat seperti gambar 5 berikut ini:



**Gambar 2.5 Model Implementasi Kebijakan Cheema dan Rondinelli**  
*Sumber Cheema dan Rondinelli (dalam Juliartha; 2007:140)*

Pada dasarnya kebijakan yang akan diambil dari beberapa alternatif kebijakan dalam berbagai segi diperhitungkan, kebijakan yang lebih banyak manfaatnya dibanding kerugiannya itulah biasanya menjadi pilihan kebijakan



yang diambil. Pertimbangan Pemerintahan alternatif kebijakan menurut Abidin

(2006:57-59) terhadap suatu kebijakan meliputi sebagai berikut :

- a) Efektifitas (*effectiveness*), yang mengukur apakah sesuatu alternatif sasaran yang dicapai dengan suatu alternatif kebijakan dapat menghasilkan tujuan akhir (*outcomes=effects*) yang diinginkan. Jadi suatu strategi kebijakan dipilih dilihat dari kapasitasnya untuk mencapai tujuan dalam rangka memecahkan permasalahan masyarakat.
- b) Efisiensi (*efficiency*). Pengertian ini bersamaan dengan ekonomis atau *economic rationality* yang mengukur besarnya pengorbanan atau ongkos yang harus dikeluarkan untuk mencapai tujuan atau efektifitas tertentu. Efisiensi sering dipakai dalam ukuran keuangan, misalnya, mengukur biaya per unit, seperti besarnya biaya per meter bujursangka sebuah bangunan, besar biaya per kubik air dari suatu irigasi dan sebagainya. Diantara dua kriteria ini, yaitu efektifitas dan efisiensi, selain terdapat perbedaan dalam ukuran tujuan dan biaya, terdapat pula perbedaan orientasi. Efisiensi lebih berorientasi kuantitatif, sedangkan efektifitas berorientasi kualitas.
- c) Cukup (*adequacy*). Yang diukur disini apakah suatu kebijakan dapat mencapai hasil yang diharapkan dengan sumber daya yang ada. Kriteria cukup atau *adequacy* ini berkaitan dengan variasi antara sumber daya dan tujuan yang ingin dicapai:
  - Pencapaian sasaran tertentu dengan biaya tertentu.
  - Pencapaian salah satu diantara banyak sasaran dengan biaya tetap.
  - Pencapaian tujuan tertentu dengan biaya yang dapat berubah.
  - Pencapaian salah satu diantara banyak sasaran dengan biaya yang dapat berubah.
- d) Adil (*equity*). Kriteria ini mengukur suatu strategi kebijakan dalam hubungan dengan penyebaran atau pembagian hasil dan ongkos atau pengorbanan diantara berbagai pihak dalam masyarakat.
- e) Terjawab (*responsiveness*). Ini artinya adalah strategi kebijakan dapat memenuhi kebutuhan suatu golongan atau suatu masalah tertentu dalam masyarakat.
- f) Tepat (*appropriateness*). Pengertian tepat disini sangat luas. Karena itu ukuran ini merupakan ukuran kombinasi diantara kriteria-kriteria terdahulu. Kriteria ini menjadi penyeimbang bagi penggunaan suatu atau beberapa kriteria tanpa mempedulikan atau mengabaikan kriteria tertentu.

Kebijakan yang telah tersusun dengan baik belum menjamin dapat diimplementasikan dengan baik. Implementasi kebijakan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) sangat berkaitan dengan kebijakan itu sendiri, organisasi pelaksana dan lingkungan berupa kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Pada skema model Grindle di atas (gambar 3) berasumsi bahwa tujuan kebijakan ditetapkan oleh pembuat kebijakan yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Kebijakan ini diharapkan dapat berdampak langsung pada masyarakat pesisir berupa peningkatan pendapatan, penyerapan tenaga kerja, teknologi, penguatan modal dan kemandirian masyarakat pesisir serta menjaga kelestarian lingkungan. Hasil kebijakan tersebut selanjutnya dievaluasi untuk melihat apakah program tersebut telah sesuai dengan tujuan kebijakan yang telah direncanakan, sehingga dapat dilakukan perbaikan kebijakan pada program selanjutnya.

Keberhasilan program ini ditentukan oleh:

- a) Tingkat Kepentingan: apakah telah mengakomodasi kepentingan masyarakat pesisir.
- b) Implementasi program: apakah memberi manfaat dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
- c) Kewenangan: dengan memperhatikan kedudukan pembuat kebijakan, aparat pelaksana (kekuasaan dan strategi).
- d) Sikap: dengan memperhatikan tingkat kepatuhan dari aparat pelaksana dan masyarakat, serta seberapa besar tingkat penerimaan masyarakat terhadap program.



- e) Sumber Daya: sumber daya yang menentukan yaitu, sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya dana.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka teori yang dipakai dalam penelitian ini dan menjadi rujukan adalah model yang disampaikan oleh Grindle. Adapun alasan pemilihan teori ini adalah peneliti merasa teori dari model kebijakan Grindle bisa diterapkan dan sesuai dengan faktor-faktor yang diteliti untuk mengevaluasi peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat pesisir.

### c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

- Abidin (2005:189) menyatakan bahwa:

faktor implementasi berkaitan dengan dua faktor utama, yakni, faktor utama internal dan faktor utama eksternal. Faktor utama internal meliputi kebijakan yang akan dilaksanakan dan faktor-faktor pendukung. Sementara faktor utama eksternal adalah faktor lingkungan dan pihak-pihak terkait.

Kondisi kebijakan adalah faktor yang paling dominan dalam proses pelaksanaan, karena yang dilaksanakan justru kebijakan itu sendiri. Pada tingkat pertama berhasil tidaknya pelaksanaan suatu kebijakan ditentukan oleh dua hal; kualitas kebijakan dan ketepatan strategi pelaksanaan. Kebijakan yang tidak berkualitas tidak bermanfaat untuk dilaksanakan. Strategi pelaksanaan yang tidak tepat sering kali tidak mampu memperoleh dukungan dari masyarakat. Sebab itu banyak kegagalan yang terjadi bukan sekedar disebabkan oleh lemahnya substansi dari suatu kebijakan, tetapi karena strategi pelaksanaan yang tidak tepat. Secara umum suatu kebijakan dianggap berkualitas dan mampu dilaksanakan bila mengandung beberapa elemen berikut:



a) Tujuan yang ingin dicapai atau alasan yang dipakai untuk mengadakan kebijakan itu. Tujuan atau alasan suatu kebijakan dapat dikatakan baik, kalau tujuan atau alasan itu:

(1) Rasional. Artinya tujuan dapat dipahami atau diterima akal sehat. Ini terutama dilihat dari faktor-faktor pendukung yang tersedia.

(2) Diinginkan (*desirable*). Tujuan dari kebijakan menyangkut kepentingan orang banyak, sehingga mendapat dukungan dari banyak pihak.

b) Asumsi yang dipakai dalam proses perumusan kebijakan itu realistis.

c) Informasi yang digunakan cukup lengkap dan benar.

Pelaksanaan suatu kebijakan pada dasarnya adalah suatu perubahan atau transformasi yang bersifat multiorganisasional. Artinya, perubahan yang diterapkan melalui strategi pelaksanaan kebijakan mengaitkan berbagai lapisan dan kelompok masyarakat, baik dalam lingkungan pemerintahan (*public sectors*) maupun swasta (*private sectors*). Faktor utama internal yang kedua dalam proses pelaksanaan adalah sumber daya yang merupakan faktor pendukung (*supporting factors*) bagi kebijakan. Faktor pendukung dalam kebijakan publik meliputi: sumber daya manusia, keuangan, logistik, informasi, legitimasi dan partisipasi. Faktor pendukung terakhir adalah partisipasi dari masyarakat. Menurut Huntington dalam Abidin (2005:195), partisipasi merupakan ciri khas dari masyarakat modern. Sebagian besar masyarakat di negara-negara yang belum modern, belum merasa penting untuk berpartisipasi dalam kebijakan pemerintah. Mereka belum merasa bahwa kebijakan pemerintah mempunyai pengaruh pada

kehidupan mereka, apalagi untuk berpikir bahwa mereka mempunyai hak dan mampu mempengaruhi kebijakan pemerintah itu untuk kepentingannya.

Partisipasi bisa berbentuk dukungan atau persetujuan, bisa pula berbentuk menentang atau menolak. Kedua bentuk partisipasi ini dalam kebijakan publik sama pentingnya, karena sama-sama memberi pengaruh pada kebijakan publik. Keduanya merupakan masukan yang diperlukan dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Faktor lingkungan dalam pelaksanaan juga merupakan faktor penentu. Calista (dalam Abidin, 2005:195) melihat, sekalipun pelaksanaan berada pada tingkat operasional, namun proses pelaksanaan kebijakan bergerak dalam empat lapisan lingkungan institusional; konstitusional, kolektif, operasional dan distribusi.

Jika diamati lebih jauh terlihat bahwa pelaksanaan pada taraf konstitusional terkait dengan peraturan perundang-undangan yang merupakan keputusan politik, kepentingan perorangan, pendapat masyarakat dan pilihan atas dasar konstitusi. Pada taraf kolektif, proses pelaksanaan kebijakan merupakan keputusan bersama berbagai kekuatan dan kepentingan yang ada dalam masyarakat. Pada taraf operasional, proses pelaksanaan adalah keputusan yang bersifat operasional yang bergerak dalam situasi yang sudah terbentuk, dan melalui kebijakan tersebut diharapkan dapat menimbulkan perubahan-perubahan kearah yang dikehendaki. Pada taraf akhir, proses pelaksanaan diharapkan dapat menyebarkan hasil dari suatu kebijakan atau menimbulkan perubahan yang merupakan *outcomes* dari suatu kebijakan.



## 2. Kemiskinan

Secara umum, kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi keterbatasan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup secara layak. Definisi ini mengandung dua kata kunci, yaitu keterbatasan kemampuan dan hidup secara layak. Bentuk keterbatasan kemampuan sangat bervariasi, dan antara lain dapat berupa keterbatasan keterampilan, kondisi kesehatan, penguasaan aset ekonomi dan keterbatasan informasi. Sedangkan ukuran hidup secara layak akan sangat bervariasi tergantung pada norma dan kesepakatan sosial.

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di negara manapun. Kemiskinan merupakan masalah sosial. Masyarakat miskin, atau dapat disebut tidak punya, memiliki kemampuan yang terbatas dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Kesulitan tersebut mengakibatkan kondisi fisik dan kesehatan yang buruk serta produktivitas kerja yang rendah. Selain itu, kemiskinan menyebabkan adanya disparitas golongan manusia antara yang punya dan yang tidak punya. Hal ini menyebabkan dapat terjadinya kecemburuan sosial, bahkan sampai tindakan kriminal.

### a. Indikator MDGs dan Pengentasan Kemiskinan

Pembangunan nasional di banyak negara sekarang ini perlu dirombak pendekatannya dengan menempatkan manusia sebagai titik sentral pembangunan. Seruan perombakan pendekatan pembangunan itu muncul ketika para pemimpin dunia menyadari dan bersama-sama mencanangkan komitmen untuk mengentaskan kemiskinan. Tidak kurang dari 189 (seratus delapan puluh sembilan) pemimpin dunia pada sidang PBB di New York tahun 2000 sepakat bahwa prioritas pembangunan dalam lima belas tahun ke depan menganut sasaran



dan target *millennium development goals (MDGs)*. Target ini mencakup 8 (delapan) sasaran utama yang perlu dipahami secara luas. Karena belum ada pemahaman yang cukup, maka dalam pertemuan yang hampir sama di New York pada tahun 2005, para pemimpin dunia menyegarkan komitmennya.

Prioritas pertama dari target *MDGs* itu adalah pengentasan kemiskinan dengan dua sasaran utama, yaitu menurunkan menjadi separo dari proporsi penduduk yang pendapatannya kurang dari 1 dolar AS per hari pada tahun 2015. Sasaran kedua adalah menurunkan menjadi separo dari penduduk yang menderita kelaparan pada tahun 2015. Kedua sasaran tersebut sering disalahartikan. Jumlah uang 1 dolar AS sama dengan sekitar Rp 9.000. Kalau dijumlah satu bulan menjadi sekitar  $30 \times \text{Rp } 9.000$  sama dengan Rp 270.000. Barangkali, dengan asumsi bahwa penduduk secara mandiri sudah bisa memperoleh dua per tiga dari pendapatan yang dituntut selama satu bulan, pemerintah dengan menambah sepertiganya, bisa dianggap masalahnya selesai, target pertama pengentasan kemiskinan terpecahkan. Atau, dengan membantu sebesar Rp 100.000 setiap bulan, penduduk miskin bisa memperoleh modal untuk mencari pekerjaan yang akhirnya dapat mengentaskan mereka dari pendapatan di atas Rp 270.000 setiap bulannya. Atau, karena krisis ekonomi, pendapatan penduduk menurun, sehingga perlu dipacu dengan bantuan uang tunai tersebut. Kedua asumsi itu salah, karena yang dimaksud dengan target tersebut bukan sekadar melengkapi pendapatan seseorang, tapi masyarakat mendapatkan pekerjaan yang pendapatannya di atas 1 dolar AS setiap harinya.

Sebagian besar penduduk miskin terdapat di pedesaan. Penduduk desa umumnya bekerja di bidang pertanian. Oleh karena itu, penduduk umumnya

bekerja tidak penuh sehingga tidak bisa dijamin pendapatannya secara rutin. Karena, ketika tidak bekerja di sawah atau di ladang penduduk tidak memperoleh pendapatan. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengubah kebijakan yang ditempuhnya dengan intensifikasi pertanian di kala tidak hujan. Pelatihan kepada tenaga muda yang membengkak jumlahnya dan penyediaan lapangan kerja non-pertanian yang baru di pedesaan perlu digalakkan. Penduduk yang menganggur pada waktu tidak bekerja di sawah atau ladang dikurangi, sehingga tidak terjadi pengangguran di pedesaan.

Meningkatnya pendapatan keluarga petani tidak hanya diukur dari nilai uang yang diterima setiap keluarga, tetapi juga perlu diukur dari konsumsi penduduk miskin untuk menjamin gizi yang memadai. Konsumsi keluarga miskin yang lebih baik berhubungan dengan target yang indikatornya adalah pembebasan dari kelaparan. Indikator yang menjadi pengukur dari target kemiskinan bukan saja dari orangtua yang miskin, tetapi harus dilihat dari keluarga miskin dengan seluruh anggotanya. Seluruh keluarga harus memenuhi sasaran kecukupan makan dengan nilai gizi yang memadai. Salah satu indikator yang penting yang sering dijadikan jaminan bahwa penduduk tidak lagi kelaparan adalah jumlah anak yang lahir di bawah berat minimum serta anak-anak balita yang beratnya tidak lagi di bawah standar normal. Program pengentasan kemiskinan yang dianggap berhasil mencapai target utama dan pertama dalam rangka *MDGs* tentu bukan hanya dari pengakuan kedua orangtuanya tentang status kelaparan atau tidak, atau indikator tidak ada orangtua kelaparan. Yang terpenting: bayi dan anak-anak balita tidak ada satu pun yang berada di bawah ukuran berat badan normal.



Karena itu, pengentasan kemiskinan, dalam pengertian sasaran dan target *MDGs*, harus dibaca dengan keterbukaan pikiran. Pengertian sederhana dan sempit dengan mencari terapinya melalui bantuan keuangan atau bantuan ekonomi semata tentu tidak akan mengena. Seperti dianjurkan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, masyarakat harus diajak melakukan perubahan *mind set*, perubahan sikap dan perilaku keluarga dan seluruh masyarakat yang mendukungnya. Dengan demikian prakarsa gerakan PKK DKI untuk mengembangkan pembangunan dengan cita-cita pencapaian sasaran dan target *MDGs* melalui kegiatan PKK dari tingkat RW pantas disambut dan diberikan pembekalan secara lengkap.

Kita sarankan agar segera dibentuk koperasi pada tingkat kelurahan dengan mengubah dana yang sekarang disediakan sebagai bantuan yang bersifat *charity* atau hibah tanpa syarat kerja keras, menjadi kredit yang dimonitor secara ketat dengan sistem subsidi bunga secara bertahap. Keluarga kurang mampu dikembangkan menjadi nasabah melalui serentetan pelatihan yang serius. Bagi yang baru mulai diberikan kredit dengan jumlah kecil disertai anjuran untuk bergabung atau magang pada pengusaha kecil atau menengah. Proses penggabungan ini adalah sebagai kerja sama belajar bekerja dengan disiplin dan kemudian secara bertahap belajar berusaha. Kepada pengusaha yang bersedia memberikan pendampingan dan pengajaran kepada keluarga kurang mampu itu diberikan kredit sebagai penyertaan modal dari keluarga atau penduduk kurang mampu yang diasuhnya.

Kalau penduduk yang diasuh ini makin terampil, maka mereka diberikan honor sepantasnya atau diangkat sebagai karyawan. Dalam keadaan asuhan yang makin mahir ini, maka pinjaman yang diberikan makin dikurangi subsidinya.



Artinya, kalau pada awal diberi subsidi sebanyak 100 persen, atau bebas bunga, secara bertahap diberikan kewajiban membayar bunga dan dinaikkan bunganya secara bertahap. Pengentasan kemiskinan sebagai sasaran dan target pertama *MDGs* dilaksanakan dengan pemberdayaan setiap keluarga kurang mampu dan kerja sama yang erat dari keluarga yang mampu untuk menjadi pendamping.

#### **b. Tingkat Kemiskinan di PNPB PISEW**

Kemiskinan yang terdapat di daerah tidak terjadi begitu saja. Terdapat beberapa kemungkinan penyebab kemiskinan terjadi. Berikut adalah kemungkinan penyebab kemiskinan:

- Penyebab individual, atau patologis, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin;
- Penyebab keluarga, yang menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga;
- Penyebab sub-budaya ("*subcultural*"), yang menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari, dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar;
- Penyebab agensi, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain, termasuk perang, pemerintah, dan ekonomi;
- Penyebab struktural, yang memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari struktur sosial.

Setiap wilayah berupaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan dari waktu ke waktu. Terdapat beberapa upaya pengurangan kemiskinan yang pada umumnya dilakukan oleh pemerintah, yakni:

- Bantuan kemiskinan, atau membantu secara langsung kepada orang miskin. Ini telah menjadi bagian pendekatan dari masyarakat Eropa sejak zaman pertengahan.
- Bantuan terhadap keadaan individu. Banyak macam kebijakan yang dijalankan untuk mengubah situasi orang miskin berdasarkan perorangan, termasuk hukuman, pendidikan, kerja sosial, pencarian kerja, dan lain-lain.
- Persiapan bagi yang lemah. Daripada memberikan bantuan secara langsung kepada orang miskin, banyak negara sejahtera menyediakan bantuan untuk orang yang dikategorikan sebagai

orang yang lebih mungkin miskin, seperti orang tua atau orang dengan ketidakmampuan, atau keadaan yang membuat orang miskin, seperti kebutuhan akan perawatan kesehatan.

Terdapat banyak kategori kemiskinan yang ada. Batas tingkat kemiskinan yang ada juga bervariasi. Standar yang berbeda-beda ini menjadikan jumlah masyarakat miskin dari satu tempat dengan tempat lain berbeda-beda pula. Berikut adalah beberapa pendekatan yang pada umumnya digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan suatu wilayah:

**- Pendekatan Pemenuhan Kalori (Sayogya 1977)**

Penetapan masyarakat miskin ditinjau dari total kebutuhan minimum makanan yaitu terpenuhinya 1.900 kalori dan 40 gram protein per hari atau disamakan dengan konsumsi beras per kapita per tahun. Di pedesaan bilamana pendapatan lebih tinggi atau sama dengan ekuivalensi 320 kg beras dikategorikan tidak miskin.

Kemiskinan dalam masyarakat dapat diklasifikasikan adalah sebagai berikut:

- 1) Melarat (*mavery level*), bila pendapatan per kapita dari 180 kg beras/tahun
- 2) Miskin sekali (*very poor*), bila pendapatan per ekivalen 180-240 kg beras/tahun
- 3) Miskin (*poor*), bila pendapatan ekivalen 240-320 kg beras/tahun
- 4) Agak miskin (*moderate*), bila pendapatan per kapita sama atau lebih dari 320 kg beras/tahun.

Pada tahun 2009, harga beras rata-rata Rp 6.000/kg, maka garis kemiskinan diperkirakan dengan pendapatan  $Rp\ 6.000 \times 320 = Rp\ 1.920.000/$  tahun atau Rp 160.000/bulan atau Rp 6.400/hari.



### **- Pendekatan Bank Dunia**

Kemiskinan bisa dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut mengacu pada satu set standard yang konsisten, tidak terpengaruh oleh waktu dan tempat / negara. Sebuah contoh dari pengukuran absolut adalah persentase dari populasi yang makan dibawah jumlah yang cukup menopang kebutuhan tubuh manusia (kira-kira 2000-2500 kalori per hari untuk laki laki dewasa).

Bank Dunia mendefinisikan Kemiskinan absolut sebagai hidup dengan pendapatan dibawah USD \$1/hari dan Kemiskinan menengah untuk pendapatan dibawah \$2 per hari. dengan batasan ini maka diperkirakan pada 2001 1,1 miliar orang didunia mengkonsumsi kurang dari \$1/hari dan 2,7 miliar orang didunia mengkonsumsi kurang dari \$2/hari. Proporsi penduduk negara berkembang yang hidup dalam Kemiskinan ekstrem telah turun dari 28% pada 1990 menjadi 21% pada 2001. Melihat pada periode 1981-2001, persentase dari penduduk dunia yang hidup dibawah garis kemiskinan \$1 dolar hari telah berkurang separuh. Tetapi, nilai dari \$1 juga mengalami penurunan dalam kurun waktu tersebut. Garis kemiskinan ditetapkan sebesar 1 Dollar AS/ kapita/ hari atau sekitar Rp 250.000/bulan. Jumlah ini lebih besar dari perhitungan dengan pendekatan yang didasarkan kebutuhan kalori di Indonesia.

### **- Pendekatan ADB (Asean Development Bank)**

Asean development Bank menetapkan garis kemiskinan sebesar 1,25 dollar AS/Capita/hari atau sekitar Rp 350.000/bulan. Jumlah ini lebih besar dari perhitungan dengan pendekatan yang didasarkan kebutuhan kalori di Indonesia dan pendekatan yang dilakukan oleh bank dunia.



### - Pendekatan BPS

Indonesia pada umumnya menggunakan pendekatan BPS dalam pengukuran tingkat kemiskinan. BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) dalam mengukur kemiskinan. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan pendekatan ini, dapat dihitung *Head Count Index (HCI)*, yaitu persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan. Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK) yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan-Makanan (GKBM), terlihat bahwa peranan komoditi makanan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan).

Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan. Semakin tinggi Garis Kemiskinan, semakin banyak penduduk yang tergolong sebagai penduduk miskin. Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan.

Secara umum penduduk miskin dapat dibedakan menjadi dua yaitu miskin kronis (*chronic poor*) dan miskin sementara (*transient poor*). Miskin kronis adalah penduduk miskin yang berpenghasilan jauh di bawah garis kemiskinan dan biasanya tidak memiliki akses yang cukup terhadap sumber daya ekonomi, sedangkan miskin sementara adalah penduduk miskin yang berada dekat garis

kemiskinan. Jika terjadi sedikit saja perbaikan dalam ekonomi, kondisi penduduk yang termasuk kategori miskin sementara ini bisa meningkat dan statusnya berubah menjadi penduduk tidak miskin. Sumber data utama yang dipakai untuk menghitung kemiskinan pada pendekatan BPS adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS).

### **3. Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) dalam Kerangka Kebijakan Publik**

Masyarakat pesisir yang terdiri atas nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pedagang hasil laut, serta masyarakat lainnya yang kehidupan sosial-ekonominya tergantung pada sumber daya kelautan, merupakan masyarakat nelayan yang pada umumnya masih tergolong miskin. Nelayan, misalnya, tingkat pendapatannya hanya sekitar Rp. 300.000/bulan/kepala keluarga. Sungguh sebuah ironi, sebab negeri ini memiliki sumber daya kelautan yang melimpah ruah.

Pemerintah, melalui Departemen Kelautan dan Perikanan, telah mengambil berbagai kebijakan untuk memberdayakan masyarakat pesisir, di antaranya Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP). Kebijakan tersebut sejalan dengan program *Millenium Development Goals* (MDGs) yaitu memberantas kemiskinan dan kelaparan, dimana targetnya antara tahun 1990-2015 masyarakat dapat mempunyai pendapatan 1,5 US dolar per hari.

Target tersebut diharapkan melalui program PEMP sampai tahun 2009 dapat menaikkan pendapatan 881.200, (delapan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus) orang, dari Rp. 300.000,- menjadi Rp. 500.000,- atau sekitar 10 persen dari masyarakat miskin pesisir.



Program PEMP dengan dana yang berasal dari APBN dan dana kompensasi BBM, telah dilaksanakan di 265 kabupaten/kota, dan telah menghasilkan Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir Mikro Mitra Mina (LEPP-M3) 323 buah. Dalam memperkuat permodalan, melalui program PEMP pada tahun 2001 telah dilaksanakan di 125 kabupaten/kota, tahun 2002, 90 kabupaten/kota, tahun 2003 dilaksanakan di 126 kabupaten/kota, tahun 2004 di 160 kabupaten/kota, dan tahun 2005 sebanyak 111 kab/kota.

Periodisasi program PEMP dapat dibagi menjadi 3 yaitu: a. Pada tahun 2001 – 2003 sebagai periode inisiasi, b. Tahun 2004-2006 adalah periode institusional, dan c. Tahun 2007-2009 periode diversifikasi. Pada periode diversifikasi ini, diarahkan pada diversifikasi usaha oleh koperasi melalui pembentukan unit-unit usaha yang merupakan perwujudan cita-cita LEPP M3 bagi unit usaha yang berbadan hukum.

Kegiatan-kegiatan yang menunjang upaya penanggulangan kemiskinan dalam bentuk pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat pesisir dituangkan dalam proyek-proyek APBN sebagai berikut :

- 1) Pengembangan Modal Ventura dalam bidang kelautan dan perikanan.
- 2) Pengembangan aplikasi Grameen Bank (Mikro Mitra Mina).
- 3) Pengembangan Nilai Tukar Bagi Masyarakat Pesisir.
- 4) Pengembangan dan pembinaan kelembagaan PEMP.
- 5) Pengembangan Alternatif Pendapatan Pada Lokasi Terumbu Karang.
- 6) Pemberdayaan Perempuan Nelayan.
- 7) Pemberdayaan Petani Garam.
- 8) Korporatisasi Nelayan.
- 9) Pemulihan Jaringan Sosial Ekonomi Nelayan kali Adem Pasca Penggusuran.
- 10) Pengembangan Mitra Desa.
- 11) Pemberdayaan Masyarakat pesisir Melalui Pesantren bahari.
- 12) Regenerasi nelayan.
- 13) Fasilitasi Akses Permodalan.



#### 14) Pengembangan Sistem Asuransi Nelayan.

Sebagai suatu kebijakan, PEMP disusun berawal dari adanya masalah berkaitan dengan kecilnya penghasilan sebagian besar masyarakat pesisir. Meningkatnya harga berbagai jenis kebutuhan yang tidak diikuti dengan meningkatnya pendapatan keluarga, telah menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan rumah tangga nelayan dan sebagian besar anak-anak usia sekolah terancam putus sekolah.

Program pemberdayaan untuk masyarakat pesisir haruslah dirancang sedemikian rupa dengan tidak menyamaratakan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya apalagi antara satu daerah dengan daerah pesisir lainnya. Pemberdayaan masyarakat pesisir haruslah bersifat *bottom up* dan *open menu*, namun yang terpenting adalah pemberdayaan itu sendiri yang harus langsung menyentuh kelompok masyarakat sasaran.

##### a. Peningkatan Kemampuan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Banyak sudah program pemberdayaan yang dilaksanakan pemerintah, salah satunya adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir (PEMP). Pada intinya program ini dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu:

- 1) **Kelembagaan.** Bahwa untuk memperkuat posisi tawar masyarakat, mereka haruslah terhimpun dalam suatu kelembagaan yang kokoh, sehingga segala aspirasi dan tuntutan mereka dapat disalurkan secara baik. Kelembagaan ini juga dapat menjadi penghubung (*intermediate*) antara pemerintah dan swasta. Selain itu kelembagaan ini juga dapat menjadi suatu forum untuk menjamin terjadinya perguliran dana produktif diantara kelompok lainnya.
- 2) **Pendampingan.** Keberadaan pendamping memang dirasakan sangat dibutuhkan dalam setiap program pemberdayaan. Masyarakat belum dapat berjalan sendiri mungkin karena kekurangtahuan, tingkat penguasaan ilmu pengetahuan yang rendah, atau mungkin masih kuatnya tingkat ketergantungan mereka karena belum pulihnya rasa percaya diri mereka akibat

paradigma-paradigma pembangunan masa lalu. Terlepas dari itu semua, peran pendamping sangatlah vital terutama mendampingi masyarakat menjalankan aktivitas usahanya. Namun yang terpenting dari pendampingan ini adalah menempatkan orang yang tepat pada kelompok yang tepat pula.

- 3) **Dana Usaha Produktif Bergulir.** Pada program PEMP juga disediakan dana untuk mengembangkan usaha-usaha produktif yang menjadi pilihan dari masyarakat itu sendiri. Setelah kelompok pemanfaat dana tersebut berhasil, mereka harus menyisihkan keuntungannya untuk digulirkan kepada kelompok masyarakat lain yang membutuhkannya. Pengaturan pergulirannya akan disepakati di dalam forum atau lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sendiri dengan fasilitasi pemerintah setempat dan tenaga pendamping

Untuk mengimplementasikan kebijakan PEMP, dibentuk organisasi pengelola program secara hierarkhis dari tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Dana bantuan kepada masyarakat pesisir berupa Dana Ekonomi Produktif (DEP) disalurkan melalui Koperasi Swamitra Mina yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Untuk menjamin bahwa dana telah tersalurkan dan terserap dengan benar, maka dilaksanakan monitoring dan evaluasi (Monev). Monev Program PEMP dilakukan untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan, kendala dan rencana tindakan lanjut. Monev dilakukan oleh tim pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Sasaran monitoring adalah semua komponen kegiatan Program PEMP tahun berjalan, baik di pusat maupun di daerah, sedangkan sasaran evaluasi adalah kegiatan Program PEMP tahun sebelumnya.

Guna pengembangan LEPP-M3, maka mulai tahun 2004 Program PEMP diarahkan pada penguatan pada penguatan kelembagaan LEPP-M3 dalam format koperasi dan pada masing-masing koperasi akan dibentuk Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Pengembangan kelembagaan sesuai dengan tahapan Program PEMP, yaitu inisiasi (tahun 2001-2003), institusionalisasi (tahun 2004-2006) dan





## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Desain Penelitian

Dalam penelitian ini yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif, yaitu suatu jenis penelitian yang dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu (Singarimbun dan Effendi, 1989).

Menurut Singarimbun dan Effendi (1989:44) bahwa pada umumnya penelitian dapat digolongkan menjadi tiga tipe yaitu penelitian penjajakan (*explorative*), penelitian penjelasan (*explanatory atau confirmatory research*) dan penelitian deskriptif (*descriptive*). Penelitian deskriptif adalah ditujukan untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena-fenomena sosial tertentu. Dimana penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis penelitian deskriptif kualitatif dengan metode evaluatif yang berusaha untuk mengetahui dampak dari masyarakat pesisir yang telah memperoleh intervensi program. Pengukuran terhadap dampak peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat pesisir di Bangka Barat dilakukan setelah program dinyatakan selesai.

#### B. Definisi Konsep dan Operasional

##### 1. Definisi Konsep

- 1) Kebijakan adalah tindakan-tindakan pemerintah dalam mengatasi masalah yang timbul dalam masyarakat pesisir.

- 2) Implementasi adalah pelaksanaan program PEMP sesuai dengan pedoman umum yang telah ditetapkan.
- 3) Pemberdayaan adalah suatu usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat pesisir untuk mengembangkan diri dan usahanya secara berkelanjutan.
- 4) Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) adalah kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
- 5) Masyarakat pesisir adalah masyarakat yang terdiri atas nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pedagang hasil laut, serta masyarakat lainnya yang kehidupan sosial-ekonominya tergantung pada sumber daya kelautan.
- 6) Pemahaman masyarakat terhadap Program PEMP adalah tingkat penerimaan, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap program dan kewajiban masyarakat pesisir untuk menjaga kelestarian lingkungan.

## 2. Definisi Operasional

Menurut Singarimbun dan Efendi (1989:46) bahwa definisi operasional merupakan suatu petunjuk pelaksanaan cara mengukur variabel penelitian. Variabel dalam penelitian ini adalah peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat pesisir dengan dimensi; 1) peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat pesisir, 2) kebijakan pemerintah provinsi dan kabupaten dalam PEMP dan 3) pemahaman masyarakat tentang implementasi kebijakan peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat pesisir.

Berkenaan untuk mendapatkan gambaran akan pelaksanaan peningkatan kemampuan, kebijakan pemerintah provinsi dan kabupaten dan pemahaman masyarakat pesisir dalam pelaksanaan program PEMP, maka dilakukan pemilahan atas definisi operasional yang dapat dilihat pada tabel 2.1.

**Tabel 3.1 Definisi Operasional**

Variabel	Dimensi	Indikator
Peningkatan Kemampuan Ekonomi Masyarakat Pesisir	1. Gambaran Kemampuan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Kabupaten Bangka Barat  2. Kebijakan Pemerintah provinsi dan kabupaten	1.1 Pemukiman 1.2 Kebutuhan Dasar 1.3 Kesehatan 1.4 Pendidikan  a. Kebijakan Provinsi : - Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir, Rencana kerja dari program ini adalah : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir.</li> </ul> b. Kebijakan Kabupaten : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dukungan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir;</li> <li>b. Mengupayakan kredit lunak dalam rangka penyediaan armada perikanan serta fasilitas pendingin/pengawetan; .</li> <li>c. Mendorong aktifitas koperasi perikanan dalam menyediakan bahan bakar, bahan pengawet, pelelangan ikan dan lain sebagainya;</li> <li>d. Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana perikanan.</li> </ol>



Variabel	Dimensi	Indikator
	3. Pemahaman masyarakat tentang implementasi kebijakan peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat pesisir.	3.1 Sikap <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sikap aparat pelaksana               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingkat pemahaman terhadap maksud dan tujuan pelaksanaan program.</li> <li>• Tingkat kesesuaian antara tugas pokok dengan tugas yang diemban dalam pelaksanaan program.</li> </ul> </li> <li>b. Sikap masyarakat               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingkat penerimaan masyarakat terhadap program.</li> <li>• Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap pelaksanaan program.</li> <li>• Kewajiban masyarakat pesisir untuk menjaga kelestarian lingkungan.</li> </ul> </li> </ul> 3.2. Komunikasi <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komunikasi Aparat Pelaksana dengan Masyarakat Pesisir sebelum pelaksanaan program, saat pelaksanaan program dan pada waktu pengawasan.</li> </ul>

### C. Populasi, Sampel dan Responden

#### I. Populasi

Populasi penelitian menurut Mantra dan Kasto (dalam Singarimbun dan Effendi, 1989:115) adalah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga. Berdasarkan pemahaman tersebut maka populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan masyarakat nelayan yang mendapatkan bantuan dalam program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir di Kabupaten Bangka Barat. Dari data lapangan, jumlah nelayan dimaksud adalah 1.647 nelayan dan ditambah para pejabat Pemerintah Kabupaten Bangka Barat. Pejabat Pemerintah

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Pengurus Koperasi Swamitra Mina LEPP-M3 Bangka Barat.

## 2. Sampel

Penelitian kualitatif jelas berbeda dengan yang non kualitatif dalam hal teknik sampling. Penelitian non kualitatif sampel itu dipilih dari suatu populasi sehingga dapat digunakan untuk mengadakan generalisasi. Sampel benar-benar mewakili ciri-ciri suatu populasi. Pada paradigma alamiah, menurut Lincoln dan Guba (dalam Moleong 2010:223), peneliti mulai dengan asumsi bahwa konteks itu kritis sehingga masing-masing konteks itu ditangani dari segi konteksnya sendiri.

Penelitian kualitatif sangat erat kaitannya dengan faktor-faktor kontekstual. Sampling dalam hal ini ialah menggali informasi yang akan menjadi dasar dari rancangan dan teori yang muncul. Oleh sebab itu, pada penelitian kualitatif tidak ada sampel acak, tetapi sampel bertujuan (*purposive sample*).

*Purposive Sampling* dikenal juga dengan sampling pertimbangan ialah teknik sampling yang digunakan peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu di dalam pengambilan sampelnya atau penentuan sampel untuk tujuan tertentu.

Penelitian mengenai Peningkatan Kemampuan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Kabupaten Bangka Barat, maka sampel yang dipilih adalah para nelayan yang mendapatkan bantuan program tersebut, para birokrat di tingkat Kabupaten dan Provinsi terutama yang berhubungan langsung dengan pemberdayaan masyarakat pesisir dan dari pihak koperasi yang menyalurkan bantuan tersebut.

### 3. Responden

Responden penelitian ini adalah nelayan yang mendapatkan bantuan program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir di Kabupaten Bangka Barat, Bupati Bangka Barat, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Barat, Sekretaris Bappeda Kabupaten Bangka Barat, Kasi. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil DKP Kabupaten Bangka Barat, Kasi. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tenaga Pendamping Desa DKP Kabupaten Bangka Barat, dan Internal Control Koperasi Swamitra Mina Kabupaten Bangka Barat.

#### D. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini, Moleong (1999 : 17) menyatakan penelitian dengan metode kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan berperan serta. Oleh karena itu yang menjadi instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, dan sekaligus berperan sebagai alat pengumpul data, selain itu ia juga menjadi segalanya dari keseluruhan proses penelitian disamping bantuan orang lain (narasumber).

Penggunaan peneliti sebagai instrumen penelitian bertujuan untuk mendapatkan data yang valid dan *reliable*, yang bisa dipenuhi melalui penelitian ke lapangan dan melakukan pengamatan serta wawancara dengan informan. Peneliti sebagai instrumen penelitian sebelum melakukan pengamatan di lapangan terlebih dahulu mempersiapkan dan membekali diri untuk melakukan pengamatan dan pengetahuan tentang setting dan field penelitian. Dalam pengumpulan data dapat dibantu oleh pihak lain (pembantu peneliti).



## E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik sebagai berikut :

### 1) Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan narasumber atau informan terhadap objek yang diteliti untuk mendapatkan data (informasi) tentang objek penelitian secara langsung dari kata-kata dan tindakan nara sumber (informan). Wawancara dilakukan dengan mempergunakan instrumen berupa daftar pertanyaan yang hasilnya dicatat.

### 2) Catatan Lapangan (*field notes*)

Mencatat berbagai kejadian tentang apa yang didengar, dilihat, dialami dan dipikirkan oleh peneliti dan narasumber dalam rangka pengumpulan data.

### 3) Dokumen

Dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini berupa bahan tertulis yang berkaitan dengan masalah penelitian, sebagai sumber data yang bermanfaat untuk menguji, menafsirkan, dan meramalkan.

### 4) Studi Kepustakaan

Dengan metode Studi Kepustakaan diperoleh berbagai data sekunder dari berbagai buku serta dokumen yang relevan dengan permasalahan dan tujuan penelitian, yaitu dengan cara membaca, mengutip, membahas buku-buku serta dokumen yang dinilai relevan.

### 5) Observasi

Dengan metode Observasi akan diperoleh suatu persepsi mengenai kondisi dan situasi permasalahan yang menjadi obyek penelitian. Metode ini dilaksanakan dengan cara mengunjungi lokasi penelitian dan mengadakan pengamatan langsung terhadap obyek-obyek penelitian serta mengadakan interaksi sosial dengan pihak-pihak yang dianggap dapat memberikan informasi yang dibutuhkan.

### F. Prosedur Pengumpulan Data

Moleong (1999 : 84 – 109) menyatakan ada beberapa tahapan dan prosedur dalam penelitian kualitatif, yaitu :

- 1) Tahap pra lapangan, terdiri dari penyusunan rencana penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan menilai keadaan lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, dan menyiapkan perlengkapan penelitian.
- 2) Tahap pekerjaan lapangan, terdiri dari memahami latar penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan, dan berperan serta sambil mengumpulkan data.
- 3) Tahap analisis data, terdiri dari : konsep dasar analisis data, menemukan tema, prosesing satuan, kategorisasi dan penafsiran, dan merumuskan hipotesis. Pada tahap ini termasuk pengolahan data, pengisian dan penafsiran.
- 4) Tahap penulisan laporan.

### G. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses dimana data itu disederhanakan dalam bentuk yang lebih muda dibaca dan diinterpretasikan (Singarimbun dan Effendi,

1989). Sedangkan menurut Moleong (1999) analisa data sebagai proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan suatu kesimpulan sementara, seperti yang dirumuskan oleh data.

Analisa data berperan mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode dan mengkategorikannya. Penelitian ini mempergunakan teknik analisis data secara deskriptif kualitatif dengan metode evaluatif, yakni analisis data dalam uraian tentang dampak peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat pesisir dalam program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir (PEMP). Analisis data ini juga berperan dalam menjawab permasalahan penelitian. Setelah data-data tersebut didapatkan maka selanjutnya dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi data

Merupakan proses pemilihan, penusutan perhatian pada penyederhanaan data dan informasi di lapangan. Pada proses ini dilakukan pengklasifikasian data secara selektif agar data lebih mengarah pada permasalahan dan dapat membantu proses analisa.

2. Penyajian data

Merupakan proses penyusunan kembali data yang telah diperoleh dengan kecenderungan kognitifnya adalah menyederhanakan informasi kompleks kedalam satuan bentuk (gestalt) yang disederhanakan secara selektif yang mudah untuk dipahami sehingga dapat diperoleh tingkat validitasnya.



### 3. Penarikan kesimpulan

Merupakan proses penyusunan kesimpulan dan pembuatan keputusan dari hasil analisis sebelumnya yang disesuaikan dengan pertanyaan penelitian. Kecenderungan hasil penelitian diidentifikasi kembali dan diperjelas kembali agar penarikan kesimpulan akhir dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk menjawab permasalahan penelitian bagaimanakah gambaran kemampuan ekonomi masyarakat pesisir di Kabupaten Bangka Barat setelah dilaksanakan program PEMP dalam pemberdayaan masyarakat pesisir, bagaimanakah kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten Bangka Barat dibidang peningkatan ekonomi masyarakat pesisir dan Bagaimanakah pemahaman masyarakat tentang implementasi kebijakan peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat pesisir. Penelitian dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap dampak yang dirasakan oleh masyarakat pesisir akibat pelaksanaan program PEMP, yang dilihat dari variabel penelitian pada kelompok-kelompok yang dijadikan informan.

#### **H. Informan**

Dalam rangka memperoleh informasi yang akurat dan komprehensif, data primer diperoleh dari informan. Menurut Bagoes Mantra (2004:86), informan adalah orang yang dapat memberikan keterangan atau informasi mengenai masalah yang sedang diteliti dan dapat berperan sebagai narasumber selama proses penelitian.

Pada penelitian ini sebagai sumber data dan informan dari masyarakat nelayan yang berada di Desa Air Nyato Kecamatan Simpang Teritip, Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok, dan Tenaga Pendamping Desa (TPD). Informan

yang diwawancarai secara mendalam adalah Bupati Bangka Barat, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Barat, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Barat, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Internal Control Koperasi Swamitra Mina LEPP-M3 Bangka Barat.

UNIVERSITAS TERBUKA





## BAB IV

### TEMUAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Temuan

##### 1. Profil Wilayah

###### a. Letak Geografis dan Luas Wilayah

Wilayah Kabupaten Bangka Barat berada di Pulau Bangka secara geografis menempati wilayah bagian barat Provinsi Kepulauan Bangka. Dengan letak koordinat antara  $105^{\circ} 00'$  BT –  $106^{\circ} 00'$  BT dan  $01^{\circ} 00'$  LS -  $02^{\circ} 10'$  LS yang terbentang dari barat laut sampai tenggara. Kabupaten Bangka Barat memiliki luas wilayah lebih kurang  $2.820,61 \text{ km}^2$  atau 282.061 ha, pada akhir tahun 2008 jumlah penduduk sebanyak 144.000 jiwa.

Pemerintah Kabupaten Barat secara ruang lingkup mencakup 4 kelurahan, 52 desa, dan 5 kecamatan (Kecamatan Muntok, Kecamatan Tempilang, Kecamatan Simbang Teritip, Kecamatan Jebus, dan Kecamatan Kelapa) serta didukung 153 dusun/lingkungan dengan pusat pemerintahan di Kecamatan Muntok dan sekaligus sebagai Ibukota Kabupaten Bangka Barat. Sebagai wilayah studi Kabupaten Bangka Barat memiliki wilayah pesisir pantai dimana banyak desa yang letaknya berdekatan, sehubungan dengan hal potensi perikanan kelautan maupun budidaya perikanan darat merupakan salah satu potensi yang dikembangkan dalam menunjang peningkatan penghasilan masyarakat, selain itu potensi yang ada di wilayah studi meliputi sektor pertanian dan perkebunan, pariwisata alam dan tempat peninggalan bersejarah, pertambangan khususnya

timah dan secara geografis terletak pada jalur lintasan kelautan terhadap daerah atau pulau yang berada di sekitar atau mengelilingi wilayah studi.

Wilayah studi secara administrasi Kabupaten Bangka Barat memiliki batas wilayah sebagai berikut :

- Di sebelah Barat dengan Laut Natuna,
- Di sebelah Timur dengan Kabupaten Bangka,
- Di sebelah Utara dengan Laut Natuna,
- Di sebelah Selatan dengan Selat Bangka.

#### 1) Jarak dari Muntok ke Ibukota Kabupaten/Kota Lain

Jarak yang paling jauh dari Ibukota Kabupaten Bangka Barat (Muntok) ke ibukota kabupaten lain adalah Toboali (Kabupaten Bangka Selatan) kemudian Koba (Kabupaten Bangka Tengah), Sungailiat (Kabupaten Bangka) dan yang terdekat adalah Pangkalpinang (Ibukota Provinsi) berjarak 138 Km.

**Tabel 4.1 Jarak Ibukota Kabupaten Bangka Barat ke Ibukota Kabupaten Lain dan Ibukota Provinsi (Pangkalpinang)**

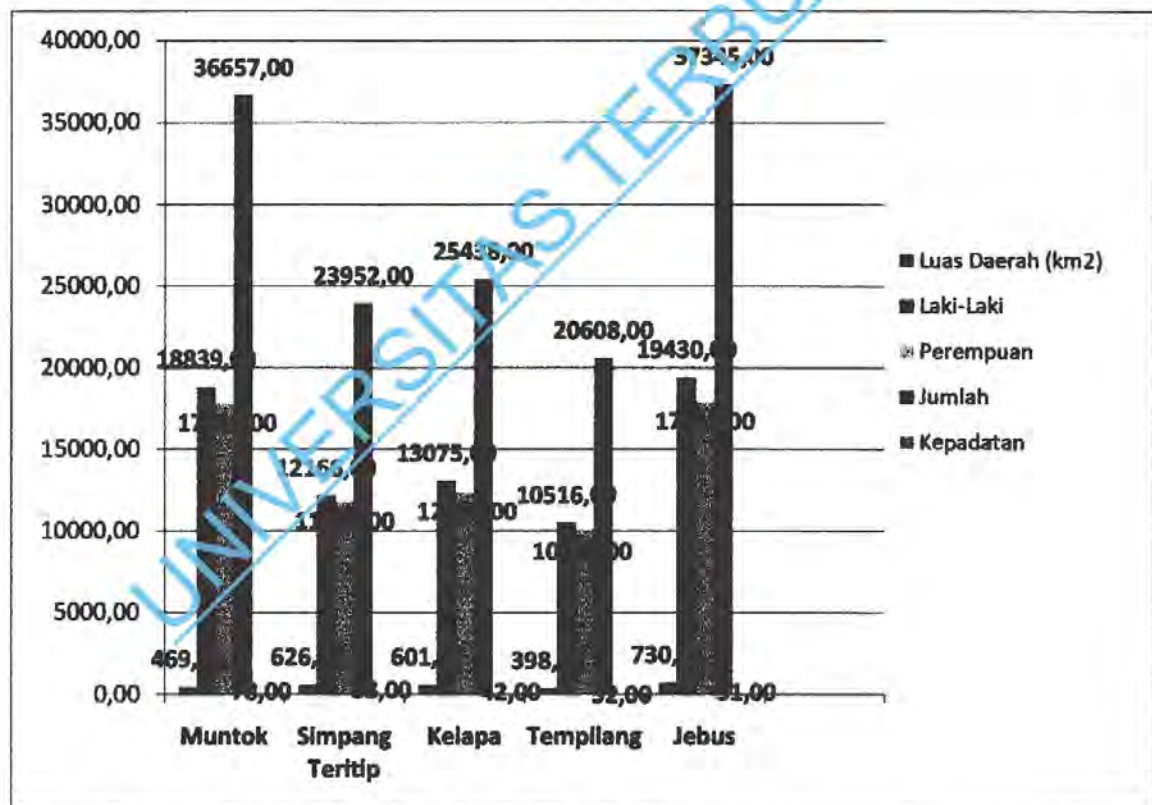
No	Dari Muntok ke Kota/Kecamatan	Jarak (Km)
1	Koba	196
2	Toboali	264
3	Pangkalpinang	138
4	Sungailiat (Via Sempan)	140

Sumber : Bangka Barat Dalam Angka 2008/2009

## 2. Penduduk dan Tenaga Kerja

### a. Penduduk

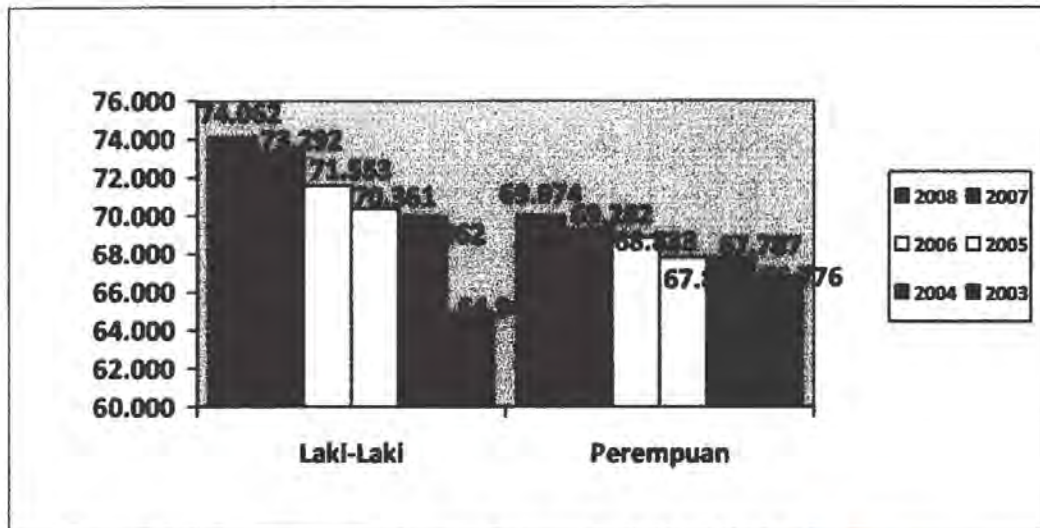
Data hasil registrasi penduduk Kabupaten Bangka Barat dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat menunjukkan jumlah penduduk yang meningkat dari 142.574 jiwa pada tahun 2007 menjadi 144.000 jiwa pada tahun 2008 atau bertambah sebanyak 1.426 jiwa. Sedangkan untuk jumlah penduduk di daerah pesisir Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2007 berjumlah 58.018 jiwa mengalami kenaikan sebanyak 1.184 jiwa pada tahun 2008 sehingga menjadi 59.202 jiwa.



Sumber : Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Bangka Barat

**Gambar 4.1** Grafik Jumlah Penduduk (WNI+WNA) per Kecamatan, Luas Daerah (Km<sup>2</sup>), Jenis Kelamin, dan Kepadatan per Km<sup>2</sup> di Kabupaten Bangka Barat 2008





Sumber : Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Bangka Barat

**Gambar 4.2 Grafik Jumlah Penduduk (WNI+WNA) Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2003 – 2008**

Berdasarkan Gambar 4.1, jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Kabupaten Bangka Barat relatif sama banyak yakni, penduduk laki-laki sebanyak 74.062 jiwa atau sekitar 51,43 % dari seluruh penduduk, sedangkan berdasarkan Tabel 4.2 untuk penduduk laki-laki di daerah pesisir sebanyak 31.632 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 69.974 jiwa atau 48,57 % dari seluruh penduduk atau berbeda hanya sebesar 2,86 %, sedangkan untuk penduduk perempuan di daerah pesisir sebanyak 27.570 jiwa, secara umum penduduk Kabupaten Bangka Barat dengan tingkat kepadatan penduduk 52 orang per Km<sup>2</sup> pada tahun 2008. Sementara itu jika dilihat dari status kewarganegaraan, dari total penduduk Bangka Barat sebanyak 144.000 jiwa seluruhnya atau 100 % berstatus Warga Negara Indonesia (WNI).

**Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Daerah Pesisir Kabupaten Bangka Barat 2008**

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
0 - 4	3.311	3.201	6.512
5 - 9	3.097	2.979	6.076
10 - 14	2.556	2.531	5.087
15 - 19	2.822	2.427	5.249
20 - 24	3.310	2.864	6.174
25 - 29	3.262	2.661	5.923
30 - 34	2.938	2.193	5.132
35 - 39	2.184	1.813	3.997
40 - 44	1.505	1.572	3.077
45 - 49	1.563	1.500	3.063
50 - 54	1.726	1.413	3.139
55 - 59	1.459	1.120	2.579
60 - 64	834	586	1.419
65 - 69	408	319	727
70 - 74	320	194	513
75 +	339	196	535
Jumlah 2008	31.632	27.570	59.202
2007	30.626	27.392	58.018
2006	29.681	26.668	56.350

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Barat, Angka Estimasi SUPAS, ( Bangka Barat Dalam Angka 2008/2009)

Berdasarkan tabel 4.2, kelompok umur dari data hasil survei yang dilakukan Badan Pusat Statistik, penduduk di daerah pesisir Kabupaten Bangka Barat cenderung didominasi oleh kelompok umur muda. Secara berurutan penduduk yang terbanyak terdapat pada kelompok umur 20-24 tahun yakni

sebanyak 6.174 jiwa atau 10,42 % dari penduduk daerah pesisir Kabupaten Bangka Barat. kelompok umur 25-29 tahun sebanyak 5.923 jiwa atau 10 % dari penduduk daerah pesisir Kabupaten Bangka Barat dan kelompok umur 0-4 tahun sebanyak 6.512 jiwa atau 10,99 % dari penduduk daerah pesisir Kabupaten Bangka Barat.

Penduduk di daerah pesisir Kabupaten Bangka Barat berdasarkan data tersebut cenderung didominasi oleh kelompok umur muda, hal ini jelas merupakan salah satu faktor pendukung yang mempengaruhi implementasi kebijakan Program Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Kabupaten Bangka Barat, seperti yang dinyatakan oleh Abidin (2005: 189) bahwa:

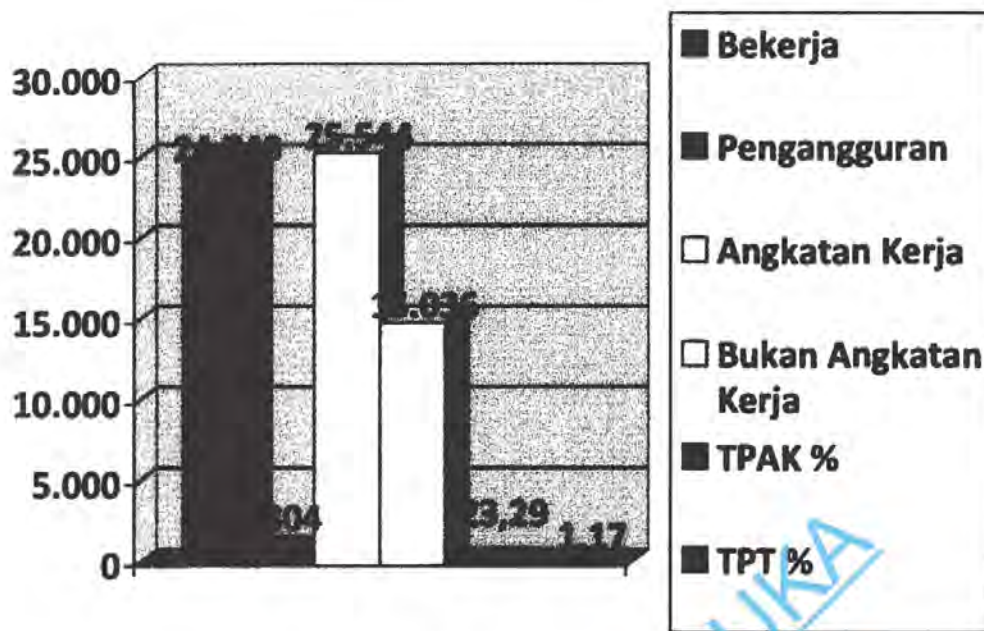
faktor implementasi berkaitan dengan dua faktor utama, yakni faktor utama internal dan faktor utama eksternal. Faktor utama internal meliputi kebijakan yang akan dilaksanakan dan faktor-faktor pendukung. Sementara faktor utama eksternal adalah faktor lingkungan dan pihak-pihak terkait.

Faktor utama internal yang kedua dalam proses pelaksanaan adalah sumber daya yang merupakan faktor pendukung (*supporting factors*) bagi kebijakan. Faktor pendukung dalam kebijakan publik meliputi salah satunya sumber daya manusia.

#### **b. Tenaga Kerja**

Dari hasil survei yang dilaksanakan BPS melalui Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) keadaan Agustus 2007 ternyata Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Daerah Pesisir Bangka Barat sebesar 23,29 % dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 1,17 %.





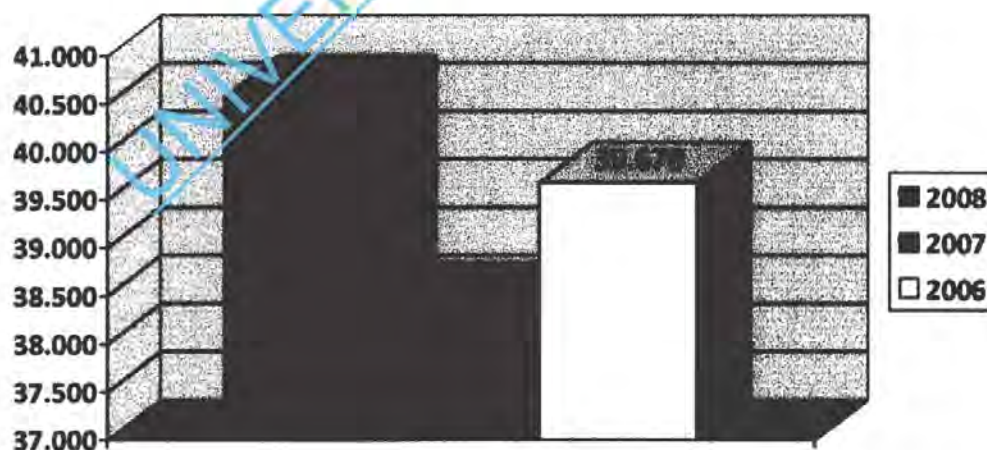
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Barat, Angka SAKERNAS 2008

Catatan :

TPAK = Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

TPT = Tingkat Pengangguran Terbuka

**Gambar 4.3 Grafik Jumlah Penduduk Usia Kerja (15 Tahun Ke Atas) Menurut Kegiatan Utama di Daerah Pesisir Kabupaten Bangka Barat 2003**



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Barat, Angka SAKERNAS 2008

**Gambar 4.4 Grafik Jumlah Penduduk Usia Kerja (15 Tahun Ke Atas) di Daerah Pesisir Kabupaten Bangka Barat Tahun 2003 - 2008**

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Daerah Pesisir Bangka Barat sebesar 23,29 % dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 1,17 %, jadi yang lebih dominan adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) bila dibandingkan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sehingga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat pesisir di Kabupaten Bangka Barat.

### **3. Sosial**

#### **a. Pendidikan**

Khusus Kabupaten Bangka Barat pembangunan sektor pendidikan semakin penting dengan ditetapkannya titik berat pembangunan pada bidang ekonomi yang diiringi dengan peningkatan sumberdaya manusia.

Melalui pendidikan diharapkan dapat terbentuk manusia yang berkualitas sebagaimana yang dicita-citakan yang memiliki kemampuan memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperlukan untuk mendukung pembangunan ekonomi, sosial budaya dan berbagai bidang lainnya. Dengan demikian pendidikan merupakan cara untuk membangun manusia sebagai sumberdaya pembangunan.



**Tabel 4.3 Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid per Kecamatan, serta Status Guru dan Jenis Kelamin Murid SD Negeri Di Daerah Pesisir Kabupaten Bangka Barat 2008**

Kecamatan	Sekolah	Guru			Murid		
		GTY	GTT	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Muntok	8	74	22	96	717	652	1369
2. Sp.Teritip	7	38	31	69	688	662	1350
3. Jebus	12	78	38	116	1006	944	1950
4. Kelapa	9	58	31	89	893	813	1706
5. Tempilang	8	49	21	70	620	564	1184
<b>Jumlah</b>							
2008	44	297	146	443	3.926	3.637	7.563
2007	44	293	148	441	3.811	3.611	7.422
2006	43	282	149	431	3.601	3.447	7.048
2005	43	271	129	400	3.431	3.320	6.751
2004	45	209	103	312	3.251	3.158	6.409
2003	45	260	77	337	3.534	3.390	6.924

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Bangka Barat

**Tabel 4.4 Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid per Kecamatan, serta Status Guru dan Jenis Kelamin Murid SMP Negeri Di Daerah Pesisir Kabupaten Bangka Barat 2008**

Kecamatan	Sekolah	Guru			Murid		
		GTY	GTT	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Muntok	1	24	6	30	253	252	505
2. Sp.Teritip	1	5	1	6	93	115	208
3. Jebus	1	13	9	22	192	209	401
4. Kelapa	1	9	11	20	211	215	426
5. Tempilang	1	4	5	9	58	85	143
<b>Jumlah</b>							
2008	5	55	32	87	807	876	1.683
2007	5	54	25	79	614	614	1.228
2006	3	51	24	75	525	525	1.050
2005	3	41	21	62	554	554	1.108
2004	3	39	27	66	554	554	1.108
2003	2	34	15	49	555	555	1.110

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Bangka Barat



Pada tahun 2008, berdasarkan tabel 4.3 dan tabel 4.4 data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Barat tercatat di Daerah Pesisir Kabupaten Bangka Barat terdapat 44 jumlah Sekolah Dasar Negeri dan untuk jumlah SLTP Negeri sebanyak 5 unit. Pendukung sarana dan prasarana yang telah dibangun cenderung diimbangi dengan keberadaan guru dan juga sangat dibutuhkan di Daerah Pesisir Kabupaten Bangka Barat. SD sebanyak 443 orang, dan SLTP sebanyak 87 orang. Sementara itu jumlah murid SD sebanyak 7.563 orang, murid SLTP sebanyak 1.683 orang, murid SMU sebanyak 1.013 orang, SMEA Swasta sebanyak 147 orang dan STM Swasta 87 orang (SMU, SMEA dan STM sekolahnya di ibukota kecamatan).

Apabila dilihat dari data mulai tahun 2003 sampai dengan 2008 bahwa terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada bidang pendidikan untuk jumlah guru SD di daerah pesisir Kabupaten Bangka Barat, sehingga bila dihitung dari tahun 2003-2008 terjadi peningkatan sebesar 31,45 %. Jumlah guru SMP di daerah pesisir Kabupaten Bangka Barat bila dihitung dari tahun 2003-2008 terjadi peningkatan sebesar 77,55 %.

Jumlah sekolah, guru dan murid per kecamatan serta status guru dan jenis kelamin murid SD negeri di daerah pesisir Kabupaten Bangka Barat bila dihitung dari tahun 2003-2008 terjadi peningkatan sebesar 9,2 %. Jumlah sekolah, guru dan murid per kecamatan serta status guru dan jenis kelamin murid SMP negeri di daerah pesisir Kabupaten Bangka Barat bila dihitung dari tahun 2003-2008 terjadi peningkatan sebesar 150 %, sedangkan untuk jumlah guru bila dihitung dari tahun 2003-2008 terjadi peningkatan sebesar 77.55 % dan terakhir untuk jumlah murid

laki-laki dan perempuan bila dihitung dari tahun 2003-2008 terjadi peningkatan sebesar 51,62 %.

Berdasarkan data-data tentang pendidikan di daerah pesisir Kabupaten Bangka Barat yang lebih dominan adalah tingkat Sekolah Dasar (SD) yang diikuti kemudian tingkat pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), berikutnya Sekolah Menengah Umum (SMU), Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA) dan Sekolah Teknik Menengah (STM). Akan tetapi memang setiap tahun ada peningkatan baik itu jumlah jumlah sekolah, guru dan murid per kecamatan serta status guru dan jenis kelamin murid di pesisir Kabupaten Bangka Barat. Dengan dominasi pendidikannya ditingkat SD memberikan gambaran bahwa Sumberdaya Manusia menjadi persoalan serius yang harus ditindaklanjuti segera karena merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat pesisir di Kabupaten Bangka barat.

#### **b. Kesehatan**

Pembangunan kesehatan pada hakikatnya adalah pembangunan dalam upaya bangsa Indonesia mencapai kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang tinggi.

Pembangunan kesehatan dalam rangka terciptanya kualitas sumberdaya manusia sebagai insan harus dilakukan dalam keseluruhan proses kehidupannya mulai dari dalam kandungan bahkan jauh sebelumnya, yaitu dengan memperhatikan tingkat kesejahteraan para calon ibu, kemudian sebagai bayi, balita, usia sekolah, remaja, pemuda, usia produktif, sampai kepada usia lanjut.



**Tabel 4.5 Jumlah Penduduk yang Menderita Gangguan Kesehatan Dirinci Menurut 10 Jenis Penyakit Terbanyak per Kecamatan di Daerah Pesisir Kabupaten Bangka Barat 2008**

Kecamatan	Jenis Penyakit					
	Asma	Infeksi Akut lain pada SPBA	Penyakit lain pada SPBA	Penyakit pada Sistem Otot	Penyakit Kulit Infeksi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1. Muntok	155	1.272	370	329	85	
2. Sp.Teritip	167	897	156	453	103	
3. Kelapa	130	506	92	141	86	
4. Tempilang	39	1.071	61	395	127	
5. Jebus	70	1.282	575	261	91	
Jumlah	2008	561	5.028	1.257	1.579	492
	2007	522	4.004	1.393	1.152	484
	2006	473	4.133	1.505	980	553
	2005	376	3.111	750	838	804
	2004	543	3.723	1.293	1.295	1.106
	2003	442	1.156	212	730	533

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat

Sambungan Tabel.....

Kecamatan	Jenis Penyakit					
	Diare	Penyakit Kulit Alergi	Malaria Klinis	Penyakit Tekanan Darah Tinggi	Lain-lain	
(1)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
1. Muntok	189	192	796	633	1.327	
2. Sp.Teritip	283	114	423	216	471	
3. Kelapa	221	155	190	136	287	
4. Tempilang	193	193	140	48	797	
5. Jebus	341	117	229	253	66	
Jumlah	2008	1.227	771	1.778	1.286	2.948
	2007	1.168	751	2.864	1.333	3.522
	2006	1.368	826	3.603	1.531	4.014
	2005	815	470	1.551	1.121	2.047
	2004	1.080	778	1.920	953	2.274
	2003	917	595	1.432	739	1.716

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat



Berdasarkan tabel 4.5 data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat bahwa jumlah penduduk yang menderita gangguan kesehatan yang dirinci menurut 10 jenis penyakit terbanyak per kecamatan di daerah pesisir Kabupaten Bangka Barat yang dimulai dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2008 yang lebih banyak penderitanya adalah penyakit Infeksi Akut lain pada Saluran Pernapasan Bagian Atas (SPBA).

**Tabel 4.6 Jumlah Tenaga Paramedis Non Perawat Kesehatan Dirinci Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Daerah Pesisir Kabupaten Bangka Barat 2008**

Kecamatan	APK/AKL	AKZI	Akademi Rontgent	SPPH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Muntok	1	-	-	-
2. Sp.Teritip	1	-	-	-
3. Kelapa	1	-	-	-
4. Tempilang	1	-	-	-
5. Jebus	1	-	-	-
<b>Jumlah</b>	2008	5	-	-
	2007	5	-	-
	2006	4	-	-
	2005	4	-	-
	2004	3	-	-
	2003	2	-	-

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat

Berdasarkan tabel 4.6 jumlah tenaga paramedis non perawat kesehatan di daerah pesisir Kabupaten Bangka Barat dari tahun 2003 yang hanya 2 orang sampai dengan tahun 2008 menjadi 5 orang, maka terjadi peningkatan sebesar 150 %.

**Tabel 4.7 Jumlah Tenaga Paramedis per Kecamatan di Daerah Pesisir Kabupaten Bangka Barat 2008**

Kecamatan	Dokter			Apoteker	SAA	Sarjana Kesehatan
	Umum	Gigi	Ahli			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Muntok	1	-	-	-	-	-
2. Sp.Teritip	1	-	-	-	-	-
3. Kelapa	1	-	-	-	-	-
4. Tempilang	1	-	-	-	-	-
5. Jebus	1	-	-	-	-	-
Jumlah	2008	5	-	-	-	-
	2007	5	-	-	-	-
	2006	4	-	-	-	-
	2005	3	-	-	-	-
	2004	3	-	-	-	-
	2003	2	-	-	-	-

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat

Jumlah tenaga paramedis berdasarkan tabel 4.7 dari tahun 2003 yang hanya 2 orang sampai dengan tahun 2008 menjadi 5 orang maka terjadi peningkatan sebesar 150 %.

**Tabel 4.8 Jumlah Tenaga Paramedis Perawat Kesehatan Dirinci Menurut Kecamatan di Daerah Pesisir Kabupaten Bangka Barat 2008**

Kecamatan	Akper	SPPM	SPK	Perawat Gigi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1. Muntok	5	-	1	1	
2. Sp.Teritip	3	-	1	1	
3. Kelapa	2	-	1	1	
4. Tempilang	2	-	1	1	
6. Jebus	3	-	1	1	
Jumlah	2008	15	-	5	5
	2007	15	-	5	4
	2006	10	-	4	4
	2005	4	-	4	4
	2004	1	-	3	3
	2003	1	-	3	3

Sambungan Tabel.....

Kecamatan		SPKU	SPAG	LCPK
(1)		(6)	(7)	(8)
1. Muntok		2	1	2
2. Sp.Teritip		1	1	1
3. Kelapa		1	1	1
4. Tempilang		1	1	1
5. Jebus		1	1	1
Jumlah	2008	6	5	6
	2007	6	5	6
	2006	5	4	5
	2005	4	4	5
	2004	4	4	4
	2003	2	3	4

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat

Keterangan : AKPER = Akademi Perawat  
 SPPM = Sekolah Pembantu Para Medis  
 SPK = Sekolah Perawat Kesehatan  
 SPKU = Sekolah Perawat Kesehatan Umum  
 SPAG = Sekolah Perawat Ahli Gizi  
 LCPK = Latihan Cepat Pekarya Kesehatan

Jumlah tenaga paramedis perawat kesehatan dari Akper (Akademi Perawat) berdasarkan tabel 4.8 dari tahun 2003-2008 terjadi peningkatan sebesar 1.400 % yang tadinya hanya 1 orang pada tahun 2003 telah meningkat menjadi 15 orang pada tahun 2008, untuk yang dari SPK (Sekolah Perawat Kesehatan) pada tahun 2003 hanya 3 orang kemudian pada tahun 2008 telah bertambah jumlahnya menjadi 5 orang sehingga terjadi peningkatan sebesar 66,66 % sama juga dengan perawat gigi peningkatannya sebesar 66,66 %, kemudian yang dari SPKU (Sekolah Perawat Kesehatan Umum) pada tahun 2003 hanya 2 orang lalu meningkat jumlahnya pada tahun 2008 menjadi 6 orang maka terjadi peningkatan sebesar 200 %, sedangkan yang dari SPAG (Sekolah Perawat Ahli Gizi) pada tahun 2003 hanya 3 orang kemudian pada tahun 2008 menjadi 5 orang sehingga terjadi peningkatan sebesar 66,66 %, terakhir dari LCPK (Latihan Cepat Pekarya



Kesehatan) juga mengalami peningkatan sebesar 50 % dari tahun 2003 yang hanya 4 orang meningkat jumlahnya pada tahun 2008 menjadi 6 orang.

**Tabel 4.9 Jumlah BKIA, Balai Pengobatan, Puskesmas, Pustu, dan Apotik per Kecamatan di Daerah Pesisir Kab. Bangka Barat 2008**

Kecamatan	BKIA	Balai Pengobatan		Puskesmas	Pustu	Apotik
		Umum	Gigi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Muntok	-	-	-	-	1	-
2. Sp. Teritip	-	-	-	-	2	-
3. Kelapa	-	-	-	-	1	-
4. Tempilang	-	-	-	-	1	-
5. Jebus	-	-	-	-	2	-
<b>Jumlah 2008</b>	-	-	-	-	7	-
2007	-	-	-	-	7	-
2006	-	-	-	-	7	-
2005	-	-	-	-	6	-
2004	-	-	-	-	6	-
2003	-	-	-	-	5	-

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat

Sambungan Tabel.....

Kecamatan	Polindes	Poskesdes
(1)	(5)	(6)
1. Muntok	3	1
2. Sp. Teritip	2	1
3. Kelapa	2	4
4. Tempilang	1	2
5. Jebus	5	2
<b>Jumlah 2008</b>	13	10

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat

Berdasarkan tabel 4.9 data yang dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat untuk daerah pesisir menunjukkan bahwa juga terjadi peningkatan jumlah Pustu dari tahun 2003 hanya berjumlah 5 unit kemudian meningkat jumlahnya menjadi 7 unit sehingga terjadi peningkatan sebesar 40 %, sedangkan jumlah

Polindes pada tahun 2008 sebanyak 13 unit, kemudian Poskesdes pada tahun 2008 sebanyak 10 unit.

Melihat data-data kesehatan di atas dapat kita ketahui bahwa dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2008 telah terjadi peningkatan yang signifikan untuk jumlah paramedis maupun jumlah sarana dan prasarana kesehatan sehingga diharapkan akan meningkatkan kesehatan masyarakat pesisir di Kabupaten Bangka Barat yang otomatis akan meningkatkan kinerja masyarakat dalam beraktifitas memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

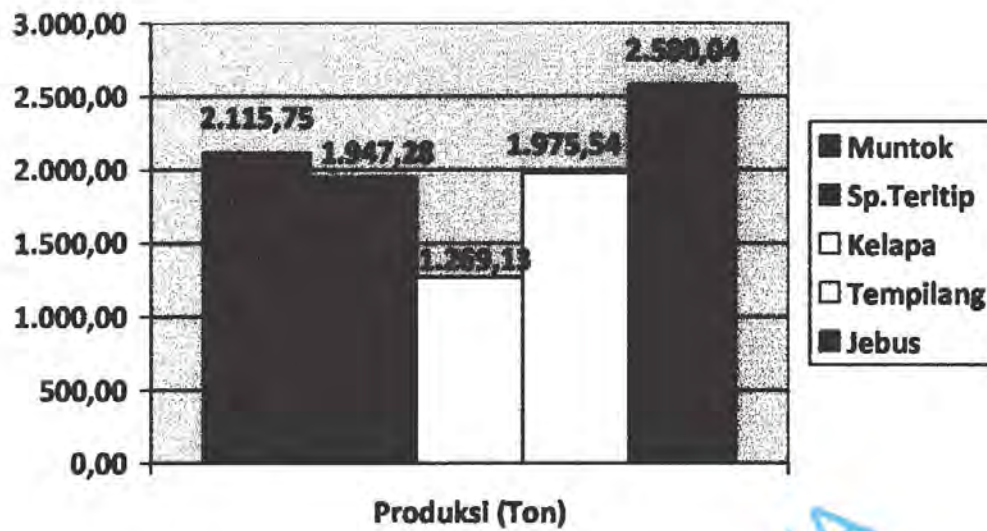
#### 4. Perikanan

Sub sektor perikanan khususnya perikanan laut sangat dominan di Kabupaten Bangka Barat mengingat Pulau Bangka dikelilingi oleh lautan yang memiliki sumberdaya laut yang relatif besar untuk dikembangkan. Komoditi yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi seperti Ikan Kerapu, Kakap Merah, Udang, Cumi-cumi, Sirip Ikan dan lain-lain.

**Tabel 4.10 Jumlah Produksi Ikan Laut dan Nilainya di Kabupaten Bangka Barat 2006 - 2008**

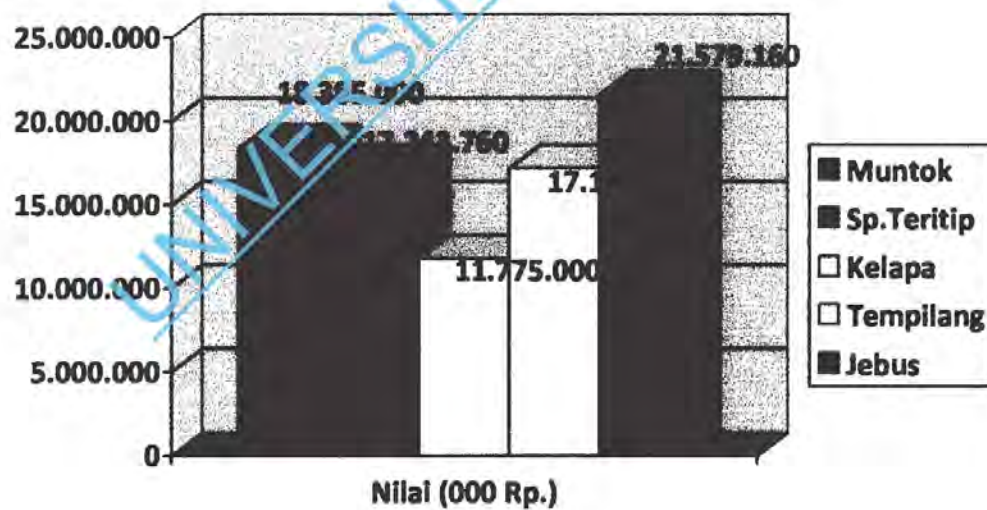
Tahun	Produksi (Ton)	Nilai (000 Rp)
(1)	(2)	(3)
2008	9.925,74	86.166.760,00
2007	8.161,07	148.403.650,00
2006	6.542,96	125.415.690,00

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Barat



Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Barat

Gambar 4.5 Grafik Jumlah Produksi Ikan Laut Per-Kecamatan di Kabupaten Bangka Barat 2008



Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Barat

Gambar 4.6 Grafik Jumlah Nilai (000 Rp.) Ikan Laut Per-Kecamatan di Kabupaten Bangka Barat 2008



Dari data pada Tabel 4.10 tersebut terlihat di Kabupaten Bangka Barat produksi ikan laut pada tahun 2008 mencapai 9.925,74 Ton dengan nilai mencapai 86.166.760,00 juta rupiah. Pada Gambar 4.5 dan Gambar 4.6 jika dilihat menurut kecamatan, produksi ikan terbanyak dari Kecamatan Jebus dengan produksi sebanyak 2.580,04 Ton dengan nilai 21.579,160 juta rupiah. Sebenarnya potensi perikanan di Kabupaten Bangka Barat sangat besar sekali apabila dikelola secara modern dengan alat tangkap yang memadai sehingga produksi ikan laut dapat ditingkatkan lagi untuk kesejahteraan masyarakat pesisir.

**Tabel 4.11 Jumlah Sarana Perahu/Kapal Penangkap Ikan Laut dan Jumlah Nelayan per Kecamatan di Kabupaten Bangka Barat 2008**

Kecamatan	Kapal Motor (KM)				Jumlah
	< 5 GT	5-10 GT	10-20 GT	20-30 GT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Muntok	230	10	-	-	240
2. Sp.Teritip	132	7	-	-	139
3. Kelapa	6	-	-	-	6
4. Tempilang	16	5	-	-	21
5. Jebus	177	5	-	-	182
<b>Jumlah</b>					
2008	561	27	-	-	588
2007	561	24	-	-	585
2006	49	27	-	-	76

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Barat

Sambungan Tabel.....

Kecamatan	Perahu Tanpa Motor (PTM)	Motor Tempel (MT)	Jumlah Sarana	Jumlah Nelayan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Muntok	125	125	250	953
2. Sp.Teritip	98	135	233	623
3. Kelapa	-	117	117	189
4. Tempilang	281	131	412	329
5. Jebus	78	196	274	780
<b>Jumlah</b>				
2008	582	704	1.286	2.874
2007	482	555	6.154	2.476
2006	210	545	755	1.738

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Barat

Berdasarkan data pada tabel tersebut bahwa sarana dan prasarana penangkap ikan di laut berupa perahu/kapal yang tercatat oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bangka Barat sebanyak 588 Kapal Motor (KM) untuk kapasitas < 5 GT- 10 GT yang tersebar di 5 kecamatan yaitu Muntok 240 kapal, Simpang Teritip 139 kapal, Tempilang 21 kapal, Kelapa 6 kapal dan Jebus 182 kapal. Sedangkan untuk Perahu Tanpa Motor (PTM) masih cukup banyak yaitu pada tahun 2008 dengan jumlah 582 perahu sehingga ini menyebabkan kurangnya produktifitas penangkapan ikan laut karena jangkauan melautnya para nelayan sangat terbatas. Adapun jumlah nelayan di Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2008 sebanyak 2.874 nelayan. Apabila kita bandingkan dengan data jumlah nelayan pada tahun 2008 sebanyak 2.874 nelayan dengan jumlah sarana keseluruhan pada tahun yang sama sebanyak 1.286 jadi untuk 1 (satu) kapal digunakan oleh kurang lebih 2 (dua) nelayan.

**Tabel 4.12 Jumlah Rumah Tangga Perikanan Tangkap, Budidaya, Pengolahan, dan Pengumpul per Kecamatan di Kabupaten Bangka Barat 2008**

Kecamatan	Tangkap	Budidaya	Pengolahan	Pengumpul	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Muntok	655	71	32	6	694
2. Sp.Teritip	415	43	66	-	524
3. Kelapa	125	154	-	-	279
4. Tempilang	433	125	50	-	608
5. Jebus	495	69	3	3	570
<b>Jumlah</b>					
2008	2.123	462	151	9	2.675
2007	1.871	364	1.198	9	3.069
2006	1.217	370	47	66	1.700

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Barat

Dari tabel tersebut jumlah rumah tangga perikanan tangkap pada tahun 2008. sebanyak 2.123 rumah tangga, perikanan budidaya 462 rumah tangga, pengolahan ikan 151 rumah tangga dan pengumpul ikan sebanyak 9 rumah



tangga. Rumah tangga perikanan terbanyak berada di Kecamatan Muntok yang mencapai 694 rumah tangga. Dapat disimpulkan di Kabupaten Bangka Barat untuk budidaya dan pengolahan ikan masih relatif kurang apabila kita bandingkan dengan potensi yang ada sehingga perlu menjadi perhatian pemerintah daerah untuk mengembangkannya untuk peningkatan kapasitas kemampuan ekonomi masyarakat pesisir.

## **5. Produk Domestik Regional Bruto**

### **a. Gambaran Umum**

Kabupaten Bangka Barat merupakan kabupaten penekaran di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Ibukota Muntok. Kabupaten Bangka Barat yang dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 5 tahun 2003 tanggal 24 Mei 2003. Wilayahnya semula berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Bangka, yang terdiri dari 5 (lima) kecamatan yaitu : Kecamatan Muntok, Simpang Teritip, Kelapa, Tempilang dan Jebus dengan total luas wilayahnya lebih kurang 2.820,61 km<sup>2</sup> atau 282.061 Ha dengan jumlah penduduk pada tahun 2008 sekitar 158.433 jiwa.

Perkembangan pembangunan perekonomian di Kabupaten Bangka Barat selama lima tahun terakhir mengalami kemajuan, hal ini ditunjukkan dari perkembangan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang mengalami peningkatan cukup signifikan.

Pada tahun 2008 PDRB Kabupaten Bangka Barat masih menduduki peringkat pertama di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan nilai PDRB sebesar 4.987.098 juta rupiah, PDRB perkapita juga mengalami peningkatan



dengan nilai sebesar 31.477.646 rupiah serta pendapatan perkapitanya sebesar 27.499.261 rupiah.

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Barat selama lima tahun terakhir berfluktuasi antara 4,25 % hingga 5,81 %, sedangkan pada tahun 2008 pertumbuhan ekonomi Bangka Barat mencapai 4,95 %.

Pada tahun 2008 penyumbang terbesar nilai PDRB Bangka Barat adalah sektor sekunder (sektor industri pengolahan, sektor listrik gas dan air, dan sektor bangunan) yakni sebesar 53,77 %. Sedangkan selanjutnya Sektor primer (sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian) sebesar 27,11 % dan sisanya sebesar 19,12 % adalah sektor tersier (sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, serta sektor jasa-jasa).

Inflasi yang diturunkan dari hasil perhitungan PDRB adalah inflasi makro dari seluruh sektor ekonomi, yang didasarkan dari perkembangan harga produsen. Inflasi makro ekonomi yang tertinggi di Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2008 adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan nilai inflasi sebesar 18,98 %.

Dilihat dari nilai sumbangan subsektor terhadap nilai PDRB yang bisa juga disebut sebagai kegiatan ekonomi unggulan di Kabupaten Bangka Barat, ternyata sumbangan yang terbesar adalah subsektor industri logam dasar (timah) sebesar 45,31 %, di tempat kedua adalah subsektor perdagangan besar dan eceran sebesar 12,67 %, subsektor pertambangan tanpa migas (pertambangan timah) sebesar 12,61 %, subsektor tanaman perkebunan sebesar 8,28 % dan di urutan kelima adalah subsektor industri makanan, minuman, dan tembakau sebesar 3,76 %.

### **b. Perkembangan PDRB**

Perkembangan PDRB atas dasar harga berlaku di Kabupaten Bangka Barat selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan, PDRB pada tahun 2004 sebesar 2.898.635 juta rupiah dan pada tahun 2008 menjadi 4.987.098 juta rupiah. Peningkatan ini terjadi disebabkan karena adanya pertumbuhan ekonomi di setiap sektor ekonomi dan juga adanya faktor kenaikan harga-harga di tingkat produsen. Perbandingan antara perkembangan PDRB atas dasar harga berlaku (PDRB ADHB) dengan PDRB atas dasar harga konstan (PDRB ADHK). Kenaikan atau peningkatan PDRB ADHK tidak begitu tinggi, dengan demikian bisa dikatakan bahwa kenaikan PDRB Bangka Barat didominasi oleh pengaruh makro.

Gambaran di atas kiranya dapat disimpulkan bahwa kinerja perekonomian di Kabupaten Bangka Barat belum maksimal dilaksanakan, oleh karena itu strategi pembangunan harus diupayakan mampu menggali potensi-potensi sumber daya yang ada agar dapat memacu peningkatan PDRB ADHK.

Laju pertumbuhan PDRB ADHB Kabupaten Bangka Barat dari tahun 2004-2008 antara 14,52 % hingga 20,28 %, namun pada tahun 2006 laju pertumbuhannya turun hingga ke level 11,03 % hal ini disebabkan terjadinya penurunan laju pertumbuhan di sektor pertambangan dan penggalan, industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih, perdagangan hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi serta sektor keuangan persewaan dan jasa perusahaan.

### **c. Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil-hasil pembangunan. Sampai saat



ini pertumbuhan ekonomi masih dipakai untuk memantau perbaikan ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi dilihat dari nilai PDRB ADHK yaitu seluruh nilai tambah yang ada di suatu wilayah dibandingkan dengan harga pada tahun dasar (tahun dasar 2000) atau dengan kata lain dengan menghilangkan faktor inflasinya. Sehingga pertumbuhan yang terjadi merupakan pertumbuhan riil perekonomian yang dapat menggambarkan peningkatan produksi secara makro.

Strategi pembangunan tidak hanya diupayakan untuk menggali potensi-potensi yang ada secara tepat pada sasaran agar dapat memacu pertumbuhan ekonomi, namun juga mengarah pada pemerataan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai.

Angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Barat tahun 2004-2008 laju pertumbuhan ekonominya relatif stabil berkisar antara 4,25 hingga 4,95 %. Pertumbuhan ini dipicu oleh adanya pertumbuhan tertinggi di sektor bangunan yang merupakan sektor penyumbang terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi Bangka Barat. Dengan demikian bisa kita katakan bahwa geliat ekonomi di wilayah Bangka Barat telah terjadi namun perkembangannya agak lambat, sehingga perlu adanya perencanaan ekonomi regional yang mengarah ke percepatan pertumbuhan ekonomi.

#### **d. Struktur Ekonomi**

Struktur ekonomi merupakan alat yang dapat digunakan untuk melihat seberapa jauh program dari kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan berimbas terhadap perekonomian masyarakat. Disamping itu juga dapat melihat kekuatan ekonomi dari suatu wilayah dan sektor apa saja yang menjadi tiang kekuatan ekonomi daerah yang bersangkutan. Besaran pengaruh suatu sektor ekonomi



sebagai arah kebijakan baik ekstern maupun intern dan kemampuan daya dukung dalam peningkatan nilai tambah bruto.

Pada tahun 2008, 5 (lima) sektor penyumbang terbesar terhadap struktur ekonomi Bangka Barat adalah sektor Industri Pengolahan (50,05 %), sektor Pertambangan dan Penggalian (13,90 %), sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (13,36 %), sektor Pertanian (13,21 %), dan sektor Jasa-jasa (3,9 %).

Para ekonom telah membagi Sektor-sektor Ekonomi kedalam 3 (tiga) kategori sektoral, yaitu : pertama sektor primer yang mencakup sektor Pertanian dan sektor Pertambangan dan Penggalian, kedua sektor sekunder yang mencakup sektor Industri Pengolahan, sektor Listrik, Gas dan Air serta sektor Bangunan, ketiga sektor tersier yang mencakup sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, sektor Pengangkutan dan Komunikasi, sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan serta sektor Jasa-jasa.

Perkembangan sumbangan 3 (tiga) kategori sektoral terhadap struktur ekonomi Kabupaten Bangka Barat dari tahun 2006-2008 selama 3 (tiga) tahun terakhir pergeseran struktur ekonominya relatif stabil, yaitu didominasi oleh sektor sekunder, menyusul sektor primer dan sektor tersier di urutan ketiga.

Pada tahun 2008 sumbangan atau kontribusi sektor sekunder mencapai 53,77 %, sedangkan sektor primer sebesar 27,11 % dan sektor tersier 19,12 %.

#### **e. Perkembangan Sektor Primer**

Sektor primer meliputi sektor Pertanian dan sektor Pertambangan dan Penggalian. Sektor ini di Kabupaten Bangka Barat mempunyai kontribusi kedua terbesar setelah sektor sekunder. Sumbangan sektor Pertanian di Bangka Barat ditunjang oleh kegiatan perkebunan kelapa sawit yang terdapat disetiap

kecamatan, sedangkan sektor Pertambangan dan Penggalian ditunjang oleh pertambangan timah.

Perkembangan sektor sekunder selama lima tahun terakhir ini, yang disebabkan oleh besarnya sumbangan sektor Industri Pengolahan khususnya industri pengolahan bijih timah yang berlokasi di kecamatan Muntok. Sektor Industri Pengolahan merupakan sektor dengan nilai PDRB terbesar jika dibandingkan dengan sektor listrik, gas dan air bersih maupun sektor bangunan.

#### **f. Perkembangan Sektor Tersier**

Sektor tersier meliputi sektor perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, serta jasa-jasa lainnya. Kontribusi sektor ini merupakan kontribusi terkecil sebesar 19,2 % pada tahun 2008 sehingga sektor ini perlu ditingkatkan. Melihat potensi objek wisata Bangka Barat, perhotelan harusnya dapat ditingkatkan agar wisatawan terfasilitasi ketika berkunjung di Bangka Barat. Apabila dilihat dari perkembangannya sektor tersier terus meningkat dalam kurun waktu lima tahun terakhir dengan sumbangan terbesar dari subsektor perdagangan, hotel dan restoran.

#### **g. PDRB/Pendapatan Perkapita**

Untuk mengukur tingkat pendapatan masyarakat, indikator yang dapat digunakan adalah PDRB per kapita. Total PDRB disuatu wilayah tertentu dibagi dengan jumlah penduduk dalam kurun waktu tertentu (1 tahun) diperoleh PDRB Perkapita. Perkembangan PDRB perkapita Kabupaten Bangka Barat selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami peningkatan cukup *significant*. Pada tahun 2008 PDRB perkapita Kabupaten Bangka Barat mencapai 31.477.646 rupiah. Demikian



juga dengan pendapatan perkapita Kabupaten ini juga mengalami peningkatan dari tahun 2004-2008, pada tahun 2004 pendapatan perkapita sebesar 17.752.554 rupiah kemudian meningkat sebesar 27.499.261 rupiah.

#### **h. Kegiatan Ekonomi Unggulan**

Struktur ekonomi suatu wilayah dapat berfungsi untuk melihat sektor ekonomi unggulan di wilayah tersebut. Mengamati kontribusi seluruh sektor ekonomi yang ada di Kabupaten Bangka Barat ternyata sektor Industri Pengolahan yang merupakan penyumbang terbesar yakni 50,05 %, kemudian sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 13,90 %, sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 13,36 %, kemudian sektor Pertanian sebesar 13,21 % dan terakhir atau diurutan kelima adalah sektor Jasa-jasa sebesar 3,90 %. Kelima inilah yang merupakan sektor unggulan di wilayah Bangka Barat.

Subsektor Industri Logam Timah yang merupakan unggulan pertama dengan kontribusi sebesar 45,31 %, selanjutnya subsektor Perdagangan dengan kontribusi 12,67 %, menyusul subsektor Pertambangan Timah sebesar 12,61 persen dan 8,28 % subsektor Tanaman Perkebunan dan 3,60 % subsektor Pemerintahan Umum.

#### **6. Masalah Kemiskinan**

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat sebagai salah satu kabupaten pemekaran di Provinsi Kepulauan Bangka Barat, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Barat untuk pengentasan kemiskinan salah satunya melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, seperti yang dinyatakan oleh Informan 1:

- “Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah kita membangun tambatan-tambatan perahu di pesisir, bantuan alat-alat tangkap, dan



juga memberikan bantuan-bantuan dengan bekerjasama dengan Kementerian Kelautan Perikanan rencananya kedepan akan memberikan bantuan kapal penangkap ikan. Diharapkan dengan kapal penangkap ikan yang lebih besar para nelayan akan mendapatkan hasil tangkapan yang lebih baik” (wawancara, 19 April 2010).

Pemberdayaan masyarakat pesisir di Bangka Barat yang merupakan tugas pokok dan fungsi dari pada Dinas Kelautan Perikanan seperti yang dinyatakan oleh Informan 2 :

“Memang pemberdayaan masyarakat pesisir ini kita berbicara dulu tentang kemiskinan bahwa penduduk miskin di Indonesia ini 34 juta jumlahnya dari jumlah itu kurang lebih 30 % – 40 % hidup di daerah pesisir. Memang program-program dari kementerian dan dari APBD atau pemerintah daerah banyak merupakan program percepatan pengentasan kemiskinan berupa bantuan-bantuan kepada para nelayan, kita bantu para nelayan yang belum ada perahunya, belum ada mesinnya, belum ada alat tangkapnya. Program dari pusat ada juga program pemberdayaan masyarakat melalui perbaikan rumah-rumah mereka atau juga yang dikasihkan dengan bentuk alat tangkap dan terakhir khususnya di Bangka Barat ini yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).....” (wawancara 19 April 2010).

Dalam hal pemberdayaan masyarakat pesisir di Kabupaten Bangka Barat telah dilaksanakan Program PEMP yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir seperti yang dinyatakan oleh Informan 4 :

“Tujuan dari program PEMP adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pengembangan kegiatan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan kelembagaan sosial ekonomi dengan mendayagunakan sumber daya kelautan dan perikanan secara optimal dan berkelanjutan” (wawancara, 19 April 2010).

Jadi jelas sekali dari pernyataan Informan 1, Informan 2 dan Informan 4 bahwa untuk pengentasan kemiskinan khususnya bagi masyarakat pesisir dengan melaksanakan program pemberdayaan masyarakat pesisir baik itu melalui dana

APBD maupun APBN seperti bantuan alat tangkap, kredit usaha dan pembinaan usaha baik itu dari PNPM KP dan PEMP.

## **7. Program Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Wilayah Pesisir**

### **a. Program Pemerintah Pusat**

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2004-2009 pada Bab 16, bahwa untuk memperluas kesempatan masyarakat miskin kawasan pesisir dalam pemenuhan hak-hak dasar dilakukan melalui program diantaranya:

#### **1) Program Pengembangan Sumber Daya Perikanan**

- a). Pengembangan kapasitas masyarakat pesisir dalam pengelolaan sumber daya pesisir yang berkelanjutan;
- b). Pemberdayaan kelembagaan nelayan untuk meningkatkan posisi tawar terhadap harga-harga hasil tangkapan nelayan dan dalam pengambilan keputusan;
- c). Pelaksanaan regulasi yang mengatur kawasan penangkapan ikan dan pengakuan atas tradisi lokal masyarakat pesisir;
- d). Optimalisasi daya guna potensi sumber daya kelautan dan pesisir;
- e). Koordinasi berbagai sumber bantuan modal, peralatan tangkap dan teknologi untuk mendukung pengembangan ekonomi masyarakat pesisir;
- f). Pemberdayaan ekonomi bagi perempuan di kawasan pesisir; dan
- g). Peningkatan pengawasan kegiatan ekonomi pesisir dengan melibatkan masyarakat pesisir melalui patroli keamanan wilayah laut dan pesisir berbasis masyarakat (Siswasmas).



**b. Program Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam upaya untuk pengentasan kemiskinan masyarakat wilayah pesisir telah masuk dalam RPJMD Tahun 2007-2012' berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2007-2012, yaitu poin ke- 5 pada Misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007-2012 yang menyatakan : "Menciptakan lapangan kerja dan lapangan berusaha, dalam rangka meningkatkan *income* per kapita dan daya beli masyarakat melalui penguatan terhadap 6 sektor unggulan daerah (yaitu : Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Pertanian, Pertambangan, Perindustrian, Perdagangan dan Jasa), serta menciptakan tenaga kerja siap pakai dan berdaya saing sebagai salah satu komoditas daerah yang siap dipasarkan ke lingkup domestik, regional dan global .

Program pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan poin ke-5 pada Misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007-2012 yang berorientasi pada pengentasan kemiskinan masyarakat wilayah pesisir adalah sebagai berikut :

**1) Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir**

Rencana kerja dari program ini adalah :

- Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir

**2) Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan**

Rencana kerja dari program ini adalah :



- Pembentukan kelompok masyarakat swakarya pengamanan sumberdaya kelautan

**3) Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim kepada Masyarakat**

Rencana kerja dari program ini adalah :

- Penyuluhan budaya kelautan

**4) Program Pengembangan Budidaya Tangkap**

Rencana kerja dari program ini adalah :

- Pengembangan bibit ikan unggul
- Pendampingan pada kelompok tani pembudidayaan ikan
- Pembinaan dan pengembangan perikanan

**5) Program Pengembangan Perikanan Tangkap**

Rencana kerja dari program ini adalah :

- Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap
- Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan
- Pemeliharaan rutin/berkala Tempat Pelelangan Ikan
- Rehabilitasi sedang/berat Tempat Pelelangan Ikan
- Pengembangan lembaga usaha perdagangan perikanan tangkap

**6) Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan**

Rencana kerja dari program ini adalah :

- Kajian sistem penyuluhan perikanan

**7) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan**

Rencana kerja dari program ini adalah :

- Kajian optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

**8) Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar**

Rencana kerja dari program ini adalah :

- Kajian kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar

**c. Program dari Pemerintah Kabupaten Bangka Barat**

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dalam upaya untuk pengentasan kemiskinan masyarakat wilayah pesisir telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2005-2010 berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2005-2010, yaitu Program Pengembangan Sumber Daya Perikanan program ini bertujuan untuk mengelola, mengembangkan, dan memanfaatkan sumberdaya perikanan secara optimal, adil dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan devisa, nilai tambah hasil perikanan, serta pendapat nelayan, pembudidayaan ikan dan masyarakat pesisir lainnya.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah :

- 1) Dukungan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir;
- 2) Pengembangan budidaya air laut, dan air tawar;
- 3) Peningkatan kualitas SDM, penyuluh dan pendamping perikanan;
- 4) Mengupayakan kredit lunak dalam rangka penyediaan armada perikanan serta fasilitas pendingin/pengawetan;

- 5) Mendorong aktifitas koperasi perikanan dalam menyediakan bahan bakar, bahan pengawet, pelelangan ikan dan lain sebagainya;
- 6) Membangun kemitraan antara pengusaha dan nelayan;
- 7) Melindungi keselamatan nelayan dari persaingan dengan penangkapan illegal;
- 8) Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana perikanan; dan
- 9) Pembagian zona penangkapan/tata ruang perikanan untuk nelayan kecil dan besar.

Berkenaan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir, maka Pemerintah Kabupaten Bangka Barat melalui Dinas Kelautan dan Perikanan melaksanakan program dari Pemerintah Pusat yaitu Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP). Di bawah ini akan dijelaskan secara lengkap Kerangka Acuan Kerja Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) di Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2008 sebagai berikut :

**a) Latar Belakang**

Kemajuan dan kemakmuran suatu bangsa dapat dilihat dari tingkat kehidupan masyarakat yang paling rendah. Apabila masih banyak ditemukan masyarakat tersebut dalam jumlah besar, maka bangsa itu belum bisa dikatakan makmur. Perlu kita ketahui bahwa masyarakat kecil merupakan masyarakat yang mandiri, kondisi ini dapat dibuktikan dari usaha – usaha yang mereka jalani guna keberlangsungan hidup mereka yang sangat beragam. Usaha kecil dapat menjadi tumpuan berkembangnya perekonomian disuatu desa. Untuk itu peran usaha kecil sangatlah besar dalam memerangi pengangguran di daerah pedesaan.



Nelayan tradisional merupakan salah satu contoh usaha kecil yang setiap saat dapat kita temukan di daerah pesisir. Pekerjaan sebagai nelayan sangat mulia, karena tanpa adanya nelayan kebutuhan akan sumber protein dari daging ikan tidak dapat kita penuhi, karena dari usaha kegiatan budidaya saat ini belum mampu memasok kebutuhan disetiap daerah khususnya untuk ikan laut. Untuk itu proses pembangunan yang berkembang sekarang ini tidak terlepas dari peran serta para nelayan secara langsung maupun tidak langsung dalam hal meningkatkan kecerdasan anak bangsa.

Potensi sumberdaya alam khususnya sektor kelautan dan perikanan merupakan kekayaan alam yang sangat berharga dan dapat menopang kehidupan masyarakat pesisir ataupun masyarakat lainnya apabila potensi sumberdaya alam laut dan pesisir dimanfaatkan dengan baik. Tetapi pada kenyataannya hingga saat ini kekayaan alam tersebut belum memberikan kontribusi yang berarti terhadap pembangunan di wilayah pesisir secara keseluruhan terutama nelayan, pembudidayaan ikan serta pengelolaan hasil ikan, pedagang ikan skala kecil masih tertinggal pada stara ekonomi yang tergolong kecil.

Oleh karena itu diperlukan suatu kebijakan yang menyentuh langsung kepada masyarakat pesisir sehingga selain dapat meningkatkan kesejahteraan, juga dapat mendidik masyarakat nelayan – pesisir untuk lebih mandiri dan memiliki kemampuan dalam memanfaatkan sumberdaya alam secara optimal dan berkelanjutan.

Program PEMP merupakan usaha untuk memandirikan masyarakat pesisir dalam melangsungkan usaha – usaha yang mereka jalani sehingga nantinya dapat mensejahterakan kehidupan mereka yang nantinya dapat menjadikan usaha yang

berkesinambungan. Sejak dilaksanakannya kegiatan PEMP pada Tahun 2004 dan dimulainya kembali pada Tahun 2008 ini di Kabupaten Bangka Barat, telah memberikan kontribusi yang sangat berarti pada masyarakat pesisir. Sehingga masyarakat yang membutuhkan bantuan untuk mengembangkan usahanya dapat dengan langsung mengajukan bantuan dana ke Koperasi Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir Mikro Mitro Mina (LEPP-M3) Kabupaten Bangka Barat.

**b) Tujuan PEMP**

Program PEMP secara umum bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui usaha mikro dengan kegiatan sebagai berikut :

- (1) Bantuan Sosial Mikro (BSM);
- (2) Pendirian Kedai Pesisir;
- (3) Penguatan Kapasitas Sumberdaya Manusia melalui Program Regenerasi Nelayan;
- (4) Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Iptek Pemuda Pesisir (Tenaga Pendamping Desa);
- (5) Peningkatan Sumberdaya Manusia Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

**c) Sasaran**

Sasaran Program PEMP adalah Pelaku Usaha Perikanan Tangkap Skala Mikro, Pelaku Usaha Perikanan Budidaya Skala Mikro, Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro, dan Pelaku Usaha Industri dan Jasa Maritim Skala Mikro, dengan prioritas pemuda, perempuan pesisir, jenis usaha yang tidak merusak lingkungan, dan tergolong miskin.

**d) Keluaran (*output*)**

Terfasilitasinya usaha masyarakat pesisir melalui pengembangan kultur kewirausahaan, penguatan kelembagaan, penggalangan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan dan diversifikasi usaha yang berkelanjutan dan berbasis sumberdaya lokal.

**e) Hasil (*outcome*)**

Berkembangnya usaha masyarakat pesisir di Kabupaten Bangka Barat sehingga akhirnya dapat memandirikan dan mensejahterakan kehidupan masyarakat pesisir tersebut.

**f) Lokasi Pelaksanaan Pekerjaan**

Lokasi Pelaksanaan Pekerjaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) Tahun Anggaran 2008 dilaksanakan di Kabupaten Bangka Barat.

**g) Rencana Rinci Pekerjaan**

Adapun kegiatan pekerjaan yang akan dilakukan pada Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) di Kabupaten Bangka Barat antara lain adalah sebagai berikut :

**(1) Bantuan Sosial Mikro**

Bantuan Sosial dibagi dalam dua kategori penggunaan, yaitu Bantuan Sosial Mikro (BSM) dan Bantuan Sarana Dalam Rangka Diversifikasi Usaha (Kedai Pesisir). BSM akan dimasukkan langsung ke rekening masing-masing calon penerima bantuan sosial sesuai hasil seleksi koperasi dan ditetapkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Barat. Khusus BSM, Kepala



Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Barat terlebih dahulu harus menetapkan satu kecamatan pesisir dan maksimum 3 desa pesisir sebagai lokasi penerima BSM.

Bantuan sosial mikro merupakan bantuan langsung yang diberikan kepada masyarakat pesisir yang selama ini belum mendapat akses pinjaman dari lembaga keuangan mikro (LKM). Bantuan ini diberikan khusus kepada masyarakat pesisir yang miskin dan dana bantuan harus digunakan untuk usaha produktif.

Adapun tujuan dari Bantuan Sosial Mikro ini digunakan untuk pembelian barang/alat sarana produksi perikanan dan atau jasa kelautan yang diperuntukkan bagi pengembangan usaha masyarakat pesisir di Kabupaten Bangka Barat.

Sedangkan kriteria umum masyarakat peminfaat Program PEMP pada kegiatan Bantuan Sosial Mikro antara lain :

- (a) Masyarakat pesisir yang miskin, diutamakan pemuda dan perempuan pesisir,
- (b) Mempunyai kegiatan di bidang penangkapan, budidaya, pengolahan dan pemasaran, industry dan jasa maritime atau usaha penunjang lainnya.

## **(2) Pendirian Kedai Pesisir**

Kedai Pesisir merupakan unit usaha dari koperasi yang bertujuan untuk menyediakan segala kebutuhan masyarakat pesisir. Penyedia kebutuhan bantuan sosial nantinya akan dilakukan oleh kedai pesisir.

Adapun Tujuan dari Pendirian Kedai Pesisir tersebut antara lain :

- (a) Membantu masyarakat pesisir dalam mendapatkan aneka jenis barang kebutuhan hidup sehari – hari dan kebutuhan melaut bagi nelayan dengan harga yang relative lebih murah, sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat pesisir.
- (b) Mempersiapkan tenaga – tenaga profesional pengelola kedai pesisir.
- (c) Mengembangkan gerai (*outlet*) kedai pesisir.
- (d) Meningkatkan kemajuan perekonomian masyarakat pesisir.

Sedangkan kriteria umum masyarakat pemanfaat Program PEMP pada kegiatan Pendirian Kedai Pesisir antara lain :

- (a) Masyarakat pesisir yang miskin,
- (b) Diutamakan pemuda dan perempuan pesisir,
- (c) Berdomisili dalam satu wilayah kecamatan yang sama,
- (d) Dapat bekerjasama dalam kelompok.

### (3) Fasilitasi Tenaga Pendamping Desa (TPD)

Meningkatkan keterampilan Tenaga Pendamping Desa (TPD) di wilayah kerja Kabupaten Bangka Barat terlebih dahulu TPD mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Departemen Kelautan dan Perikanan.

Adapun tujuan dari pelatihan tersebut antara lain :

- (a) Membentuk generasi muda (Tenaga Pendamping Desa) sebagai pelopor pemberdayaan masyarakat pesisir yang mampu melakukan analisis, menggali dan mengelola potensi pembangunan pesisir dan pulau-pulau kecil.

- (b) Menyelenggarakan pengajaran yang memadukan antara belajar dikelas dengan di lapangan (*field school*) dan pendampingan dalam jangka pendek.
- (c) Membentuk pelopor pemberdayaan masyarakat pesisir yang meliputi berbagai usaha yang relevan dengan potensi sumberdaya local yang ada.
- (d) Sedangkan tugas dari Tenaga Pendamping Desa (TPD) antara lain :
- (e) Membantu koperasi dalam mengidentifikasi dan menyeleksi calon penerima BSM;
- (f) Membantu masyarakat pesisir dalam melata kebutuhan barang sosial yang diperlukan masyarakat;
- (g) Mendampingi masyarakat dalam menjalankan dan mengembangkan usaha, baik dalam proses produksi maupun pemasaran;
- (h) Membuat laporan perkembangan setiap bulan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/kota.

#### **(4) Peningkatan Sumberdaya Manusia Lembaga Keuangan Mikro**

Lembaga Keuangan Mikro merupakan salah satu unit usaha koperasi yang berfungsi sebagai unit simpan pinjam bagi masyarakat pesisir. Peningkatan sumberdaya manusia sangat diperlukan untuk penguatan lembaga keuangan Mikro sehingga dapat meningkatkan profesional dan pelayanan bagi nasabah khususnya masyarakat pesisir.

Adapun tujuan dari peningkatan sumberdaya manusia lembaga keuangan mikro ini yaitu untuk meningkatkan profesionalitas SDM Lembaga Keuangan



Mikro (LKM) pesisir berbasis PEMP, sehingga berkembangnya usaha masyarakat pesisir melalui peningkatan sumberdaya manusia LKM perikanan.

#### **(5) Regenerasi Nelayan**

Regenerasi nelayan merupakan program peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui pemberian pengetahuan, ketrampilan dan kecakapan kepada generasi muda/anak nelayan sehingga memiliki kapasitas lebih dibanding pendahulunya. Program regenerasi nelayan ini dilakukan dengan kegiatan pendidikan dan pelatihan sehingga diharapkan para generasi muda/anak nelayan mampu mengembangkan akses permodalan, pasar dan teknologi, serta mampu mendorong masyarakat pesisir umumnya untuk meningkatkan kapasitas usahanya dengan memanfaatkan teknologi terapan.

Adapun tujuan dari regenerasi nelayan antara lain :

- (a) Membentuk generasi muda pelopor pemberdayaan masyarakat pesisir yang mampu melakukan analisis, menggali dan mengelola potensi pembangunan pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (b) Menyelenggarakan pengajaran yang memadukan antara belajar di kelas dengan di lapangan (field school) dan pendampingan dalam jangka pendek.
- (c) Membentuk pelopor pemberdayaan masyarakat pesisir yang meliputi berbagai usaha yang relevan dengan potensi sumberdaya lokal yang ada.
- (d) Bantuan Sarana Regenerasi Nelayan merupakan usaha untuk memenuhi peralatan yang digunakan pada desa sasaran wilayah

pesisir di Kabupaten Bangka Barat pada Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) Tahun Anggaran 2008.

**h) Pagu Anggaran Belanja**

Dana Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) di Kabupaten Bangka Barat ini pada Tahun Anggaran 2008 dialokasikan sebesar Rp.865.000.000,- (Delapan Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah).

**i) Sumber Dana**

Seluruh dana yang digunakan bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2008 yang dialokasikan di dana Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) Tahun Anggaran 2008.

**j) Faktor Penghambat Kegiatan**

Faktor yang menghambat pelaksanaan dan suksesnya program ini adalah :

- (a) Pencairan dana yang dapat menyebabkan keterlambatan operasional kegiatan.
- (b) Kesulitan mencari lokasi yang layak secara ekonomis di daerah pesisir tempat nelayan/pembudidaya ikan.
- (c) Lokasi yang jauh dari sentral distribusi barang.
- (d) Pengajuan usulan, identifikasi dan penyaluran bantuan alat-alat produksi perikanan yang membutuhkan waktu yang agak lama.

**B. Pemahaman Masyarakat Terhadap Implementasi Kebijakan Peningkatan Kemampuan Ekonomi Masyarakat Pesisir**

Pemahaman masyarakat pesisir terhadap implementasi kebijakan sangat menentukan tingkat keberhasilan program tersebut. Perlu kita ketahui bahwa

keberhasilan suatu program di suatu tempat belum tentu juga merupakan jaminan akan berhasil ditempat lain dan pada waktu yang lain. Hal ini dikarenakan terkait dengan nilai-nilai sosial budaya setempat dimana program itu dijalankan. Suatu kegiatan yang sering diabaikan yaitu persiapan sosial masyarakat pesisir yang semestinya merupakan tahap pengenalan pelaksanaan. Persiapan sosial dalam hal ini sangat penting, karena dapat membangun proses informasi, komunikasi dan partisipasi sehingga dapat diketahui kebutuhan apa yang sebetulnya diperlukan oleh masyarakat pesisir. Masyarakat pesisir di dalam implementasi program semestinya tidak saja diperlakukan sebagai objek tetapi juga sebagai subjek dari output program.

Berdasarkan pada penemuan di lapangan menunjukkan bahwa, untuk sikap masyarakat terhadap penerimaan program, diperoleh faktor pendukungnya adalah sebagian besar memang masyarakat pesisir tidak begitu mempersoalkan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam hal penguatan modal usaha. Tetapi yang menjadi faktor penghambatnya adalah adanya syarat-syarat tertentu berupa agunan (STNK, BPKB, faktur kendaraan, surat tanah dan bangunan) yang harus dipenuhi oleh masyarakat pesisir. Padahal seperti kita ketahui bahwasanya masyarakat pesisir banyak yang kehidupannya masih miskin.

Berdasarkan penelitian terhadap sikap masyarakat adalah kewajiban masyarakat pesisir untuk menjaga kelestarian potensi perikanan. Faktor pendukungnya adalah masyarakat pesisir pada umumnya mendukung upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan perikanan, sebab mereka sangat berkepentingan dengan lingkungan tersebut sebagai tempat mencari ikan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat, masyarakat



belum menerapkan secara benar aspek lingkungan bagaimana yang tidak mengganggu kelangsungan hidup sumber daya kelautan. Kebiasaan yang menyimpang dilakukan masyarakat pesisir dalam mengeksploitasi potensi perikanan, misalnya dengan menggunakan alat tangkap yang dilarang oleh pemerintah guna memenuhi tuntutan hidup.

Kebijakan program PEMP ini tidak akan berjalan dengan lancar dan baik serta tidak akan bisa mencapai tujuan yang telah ditetapkan apabila di dalam praktek atau di dalam pelaksanaannya jika tidak didukung oleh masyarakat pesisir sebagai sasaran dari kebijakan itu sendiri.

### **C. Pembahasan**

#### **1. Gambaran Kemampuan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Kabupaten Bangka Barat**

Sebagaimana yang saya jelaskan dalam perumusan masalah bahwa kemampuan ekonomi masyarakat pesisir di Kabupaten Bangka Barat akan saya uraikan berdasarkan indikator kualitas pemukiman, pemenuhan kebutuhan dasar, kesehatan dan pendidikan, hal itu akan saya uraikan sebagai berikut :

##### **a. Indikator Kualitas Pemukiman**

Temuan di lapangan pada lokasi penelitian di daerah pesisir Kabupaten Bangka Barat, bahwa memang masih ada beberapa KK (Kepala Keluarga) yang masuk dalam kategori miskin seperti terlihat dari kondisi rumah tempat tinggal mereka yang belum permanen dan kurang sehat dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 4.13 Rumah Tidak Layak Huni di Pesisir Kabupaten Bangka Barat Tahun 2005 – 2009**

Tahun	Rumah Tidak Layak Huni (unit)	Prosentase Penurunan
2009	209	41 %
2008	352	27 %
2007	482	23 %
2006	626	23 %
2005	813	

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Barat

Berdasarkan data tersebut bahwa jumlah rumah tidak layak huni di daerah pesisir Kabupaten Bangka Barat terjadi penurunan jumlah unit rumah tidak layak huni terakhir pada tahun 2009 prosentase penurunan sebesar 41 %, ini artinya adanya peningkatan ekonomi masyarakat pesisir.

b. Indikator Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Gambaran kemampuan ekonomi masyarakat pesisir di Kabupaten Bangka Barat juga dapat dilihat pada indikator pemenuhan kebutuhan dasar seperti yang terlihat pada tabel hasil pendataan keluarga sejahtera berikut ini :

**Tabel 4.14 Hasil Pendataan Keluarga per Kecamatan dan Pertahanan Keluarga Sejahtera di Daerah Pesisir Kabupaten Bangka Barat 2008**

Kecamatan	Pra KS		KS I	
	Alasan Ekonomi	Non Ekonomi	Alasan Ekonomi	Non Ekonomi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Muntok	18	-	372	-
2. Sp.Teritip	42	-	621	-
3. Kelapa	44	-	619	-
4. Tempilang	35	-	144	-
5. Jebus	47	-	597	-
<b>Jumlah</b>				
2008	186	-	2.353	-
2007	-	224	-	3.159
2006	1.600	1.548	1.055	1.137
2005	1.390	596	1.407	1.731
2004	1.440	467	1.461	1.561
2003	1.440	467	1.461	1.561

Sumber : Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Bangka Barat

Sambungan Tabel.....

Kecamatan	KS II	KS III	KS III+	Jumlah KK
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Muntok	1.877	1.105	8	3.380
2. Sp.Teritip	767	731	1	2.162
3. Kelapa	1.224	894	9	2.790
4. Tempilang	910	1.246	23	2.358
5. Jebus	1.553	1.830	7	4.034
<b>Jumlah</b>				
2008	6.331	5.806	47	14.723
2007	4.081	5.080	14	12.558
2006	1.657	2.617	178	10.892
2005	5.313	899	273	11.609
2004	5.245	887	56	11.117
2003	5.245	976	56	11.206

Sumber : Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Bangka Barat

Berdasarkan data tabel tersebut bahwa ada penurunan Pra KS dengan alasan ekonomi, pada tahun 2003 masih berjumlah 1.440 namun secara bertahap turun hingga mencapai angka 186 atau turun sebesar 87 % pada tahun 2008. Sedangkan untuk KS I dengan alasan ekonomi terjadi peningkatan dari tahun 2003 yang hanya 1.461 orang meningkat jumlahnya menjadi 2.353 orang pada tahun 2008 sehingga terjadi peningkatan sebesar 61 %, kemudian untuk KS II juga telah terjadi kenaikan pada tahun 2003 yang hanya 5.245 orang meningkat jumlahnya pada tahun 2008 menjadi 6.331 orang sehingga telah terjadi kenaikan sebesar 20,7 %, lalu untuk KS III pada tahun 2003 hanya berjumlah 976 orang mengalami kenaikan pada tahun 2008 menjadi 5.806 orang sehingga terjadi kenaikan sebesar 494,87 %, terakhir untuk KS III + pada tahun 2003 jumlahnya 56 orang lalu pada tahun 2008 menjadi 47 orang sehingga terjadi penurunan sebesar 16 %. Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan uraian tersebut ada



peningkatan taraf hidup masyarakat pesisir di Kabupaten Bangka Barat dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2008.

c. Indikator Kesehatan

Kemudian salah satu indikator yang dapat menggambarkan kemampuan ekonomi masyarakat pesisir di Kabupaten Bangka Barat dapat dilihat pada indikator kesehatan seperti terlihat di daerah pesisir menurut data pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4.15** Angka Kematian Ibu yang Melahirkan dan Balita Gizi Buruk Di Daerah Pesisir Kabupaten Bangka Barat Tahun 2005 – 2009

Tahun	Kematian Ibu yang Melahirkan (jiwa)	Balita Gizi Buruk
2009	2	1
2008	2	3
2007	2	3
2006	1	11
2005	1	4

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat

Berdasarkan data pada tabel tersebut di atas bahwa angka kematian ibu yang melahirkan pada tahun 2005 sebanyak 1 jiwa, tahun 2006 sebanyak 1 jiwa, tahun 2007 sebanyak 2 jiwa, tahun 2008 sebanyak 2 jiwa dan terakhir tahun 2009 sebanyak 2 jiwa, untuk jumlah balita gizi buruk pada tahun 2005 sebanyak 4 jiwa, tahun 2006 sebanyak 11 jiwa, pada tahun 2007 sebanyak 3 jiwa, tahun 2008 sebanyak 3 jiwa, terakhir pada tahun 2009 hanya sebanyak 1 jiwa, berdasarkan data diatas kematian ibu yang melahirkan relatif kecil berkisar antara 4 – 7 jiwa/tahun dan untuk balita gizi buruk terjadi penurunan yang sangat signifikan terakhir pada tahun 2009 hanya 1 jiwa saja. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa ada peningkatan taraf hidup masyarakat pesisir di Kabupaten Bangka Barat.

Berdasarkan data pada tabel 4.5 bahwa jumlah penduduk yang menderita gangguan kesehatan yang dirinci menurut 10 jenis penyakit terbanyak per kecamatan di daerah pesisir Kabupaten Bangka Barat yang dimulai dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2008 ada beberapa jenis penyakit yang mengalami peningkatan yang cukup signifikan dan ada juga yang relatif stabil. Pada tabel dapat terlihat lebih banyak penderitanya adalah penyakit Infeksi Akut lain pada Saluran Pernapasan Bagian Atas (SPBA) pada tahun 2008 sebanyak 5.028 orang terbanyak pada Daerah Pesisir Kecamatan Jebus 1.282 orang sedangkan yang paling sedikit penyakit Kulit Infeksi hanya 492 orang terbanyak pada Daerah Pesisir Kecamatan Tempilang dengan jumlah 127 orang. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa derajat kesehatan masyarakat untuk penyakit tertentu cukup baik dan ada beberapa penyakit yang perlu perhatian lebih serius.

d. Indikator Pendidikan

Sedangkan dari indikator pendidikan dapat juga menggambarkan kemampuan ekonomi masyarakat pesisir di Kabupaten Bangka Barat terlihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 4.16 Jumlah Anak Usia Sekolah yang Menempuh Pendidikan di Daerah Pesisir Kabupaten Bangka Barat Tahun 2005-2009**

Tahun	Bersekolah Usia 7 – 15 Thn (jiwa)	Bersekolah Usia 16 – 18 Thn (jiwa)
2009	10.844	1.595
2008	10.433	1.504
2007	9.808	1.452
2006	9.505	1.419
2005	9.093	1.351

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Barat

Berdas

peningkatan a

2009 di daerah

usia sekolah d

Kabupaten Ba

ekonomi yang

Berdas

bahwa kemas

adalah mengal

Temua

Kenala : Dinas



Berdasarkan data pada tabel tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa ada peningkatan anak-anak yang bersekolah pada setiap tahunnya dari tahun 2005-2009 di daerah pesisir Kabupaten Bangka Barat. Berdasarkan data jumlah anak usia sekolah dalam menempuh pendidikan dari tahun 2005-2009 di daerah pesisir Kabupaten Bangka Barat, maka dapat dilihat telah terjadi peningkatan taraf ekonomi yang cukup signifikan pada masyarakat pesisir.

Berdasarkan analisis indikator-indikator tersebut dapatlah saya tegaskan bahwa kemampuan ekonomi masyarakat pesisir di Kabupaten Bangka Barat adalah mengalami peningkatan.

Temuan di lapangan berdasarkan wawancara secara mendalam terhadap Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, dan beberapa nelayan pada dasarnya kemiskinan mereka ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti : akses modal, alat tangkap yang masih tradisional, dan kemampuan sumber daya manusia. Ketiga faktor inilah yang akan menjadi sasaran perbaikan untuk mensejahterakan masyarakat pesisir. Hal ini dipertegas oleh Informan 2 hasil wawancara tanggal 19 April 2010 :

“.....Kita sudah bisa lihat sebenarnya masyarakat pesisir ini kan boleh dikatakan miskin terus padahal sebenarnya mereka tidak mempunyai perahu tidak mempunyai alat tangkap jadi kalau kemarin itu mereka hanya ikut dengan majikannya saja kan gitu nanti dikasih mereka duit sedikit tapi mereka tidak mempunyai daya beli yang kuat sekarang kemarin kita sudah pernah mewancarai mereka yang sudah dapat alat-alat tangkap ini seperti perahu mereka mengaku dengan saya sendiri itu mereka mengatakan bahwa sekarang ini Pak terimakasih dengan pemerintah daerah sebelum-sebelumnya saya tidak pernah mendapat ikan sampai dengan 30 kilo sehari kalau sekarang ini kemarin aja saya dapat 80 kilo seharinya setelah saya jual ke pasar satu juta lebih saya dapat jual sehari, nah berarti di situ sudah mulai terasa dengan mereka yang sudah dapat bantuan.....”.

Masyarakat pesisir memang identik dengan kemiskinan, ada beberapa sebab mengapa mereka menjadi miskin diantaranya seperti akses modal usaha, alat tangkap yang masih tradisional dan sumberdaya manusia yang masih rendah tingkat pendidikannya sehingga terasa sulit mereka untuk bangkit dari kemiskinan oleh karena itu seperti telah diungkapkan diatas bahwa ketiga sebab ini harus dicarikan solusi terbaik guna membantu masyarakat pesisir supaya mampu berangkat dari kemiskinan menuju kesejahteraan yang berkesinambungan. Kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam membantu mensejahterakan masyarakat pesisir baik itu melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Dinas Kelautan dan Perikanan akan tetapi karena keterbatasan dana sehingga masih banyak masyarakat pesisir yang belum menikmati bantuan-bantuan tersebut.

Berdasarkan beberapa yang menjadi penyebab diantaranya seperti akses modal usaha, alat tangkap yang masih tradisional dan sumberdaya manusia yang masih rendah dengan demikian, maka karena akses modal usaha yang sulit mereka peroleh sehingga masyarakat pesisir tidak mampu untuk mengembangkan usaha penangkapan dan pengolahan hasil tangkapan menjadi suatu yang bernilai jual tinggi. Memang ada beberapa sumber pembiayaan atau kredit usaha akan tetapi karena rata-rata masyarakat pesisir adalah miskin, sehingga persyaratan anggunan untuk mendapatkan kredit yang berupa sertifikat tanah, BPKB kendaraan bermotor, dan sertifikat kepemilikan rumah yang harus mereka penuhi tidak mampu mereka tunjukkan oleh sebab itu maka masyarakat pesisir tidak bisa mendapatkan dana segar untuk mengembangkan usaha penangkapan ikan dan



usaha pengolahan hasil lautnya. Hal ini lah yang menyebabkan masyarakat miskin pesisir akan tetap menjadi miskin.

Masyarakat pesisir di Kabupaten Bangka Barat rata-rata alat tangkapnya masih tradisional, hal inilah yang menyebabkan hasil tangkapan mereka tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu kedepan diharapkan kepada pemerintah pusat maupun daerah untuk meningkatkan anggaran untuk program bantuan-bantuan alat tangkap yang merupakan sarana yang vital bagi masyarakat pesisir, memang sudah dilaksanakan program bantuan alat tangkap baik yang di danai oleh dana pemerintah pusat lewat Kementerian Kelautan dan Perikanan dan dana APBD pemerintah daerah lewat Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Barat akan tetapi tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pesisir terutama nelayan tangkap sehingga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat pesisir di Kabupaten Bangka Barat belum optimal.

Permasalahan terhadap keterbatasan bantuan-bantuan alat tangkap masyarakat pesisir seperti yang diungkapkan oleh Informan 2 hasil wawancara tanggal 19 April 2010 :

“.....Cuma kita harapkan kedepan juga yang mudah-mudahan akan ada lagi bantuan, karena masih banyak juga yang belum mendapat bantuan karena seperti tahun ini hanya 72 perahu dan alat tangkap yang kita kasih yang mengajukan proposal ini hanya paling sedikit 800 lebih yang telah mengajukan proposal tapi tidak semua bisa kita penuhi”.

Keterbatasan anggaran yang menjadi hambatan dalam hal bantuan-bantuan alat tangkap bagi masyarakat pesisir di Kabupaten Bangka Barat seperti yang diungkapkan oleh Informan 1:

“Saya menilainya program ini artinya masih belum full keberhasilannya, makanya seandainya nanti saya terpilih lagi



- dengan pemberdayaan masyarakat pesisir ini lebih akan kita tingkatkan lagi yakni dana yang kita anggarkan itu mungkin lebih besar dari sekarang ini nah kita kan sekarang ini tiga dinas yaitu PU, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan perlu kita pikirkan lagi untuk menganggarkan untuk bidang-bidang terutama untuk pemberdayaan masyarakat pesisir ini tapi itu kan tidak bisa kita sendirikan tapi harus ada persetujuan dari dewan karena kita tak mungkin bisa menggunakan dana ini kalau dewan tidak setuju”.

Berdasarkan pernyataan diatas jelas sekali dinyatakan bahwa komitmen pemerintah daerah Kabupaten Bangka Barat sudah cukup baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir yang miskin akan tetapi yang menjadi kendala adalah keterbatasan anggaran sehingga kedepan pemerintah daerah lewat Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Barat akan meningkatkan anggaran pemberdayaan masyarakat pesisir.

Masyarakat pesisir di Kabupaten Bangka Barat pada umumnya dalam pengelolaan perikanan memiliki ciri khas modal dan tenaga yang terbatas, serta peralatan yang sederhana. Dengan ciri khas yang demikian, daya saing mereka rendah dibanding nelayan yang lebih kuat. Situasi perairan menunjukkan kecenderungan menurunnya produksi ikan yang dihasilkan para nelayan kecil sejak beroperasinya armada-armada perikanan yang besar. Sementara itu karena mata pencaharian mereka sebagai pemburu ikan di laut bebas, ketidakpastian perolehan produksi selalu besar.

Oleh karena itu hal tersebut menyebabkan posisi nelayan lemah dalam proses produksi, maka berakibat ketergantungan yang sangat tinggi pada pihak lain seperti dalam hubungan *patron-client* dengan tengkulak atau toke. Pada saat mereka para nelayan membutuhkan dana segar dengan mudah mereka mendapatkannya tanpa anggunan dan persyaratan administrasi yang rumit, sehingga menurut nelayan miskin hanya melalui cara ini mereka dapat tetap bisa

melaut untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Tetapi dengan adanya hubungan *patron-client* tersebut, tanpa mereka sadari telah membelenggu pada jerat kemiskinan. Meskipun apa yang menjadi kebutuhan hidup sehari-hari dapat dipenuhi oleh patron mereka.

Sehubungan hal tersebut, menurut Lande (1977) :

“A patron client relationship is a vertical dyadic, an alliance between two person of unequal status, power or resources each of whom finds it useful to have as an ally someone superior member of such an alliance is called a patron. The inferior member is called his client”

Dikatakan oleh Scott dalam Soejadi (2001) hubungan *patron-client* merupakan ikatan *dyadic* (dua orang) yang terutama melibatkan persahabatan instrumental di mana seorang individu dengan status sosio-ekonomi yang lebih tinggi (*patron*) menggunakan pengaruh dan sumber daya yang dimilikinya untuk menyediakan perlindungan dan/atau keuntungan-keuntungan kepada seseorang yang berstatus lebih rendah (*client*). Pada gilirannya, *client* membalasnya dengan menawarkan dukungan dan bantuan, termasuk jasa pribadi kepada patron.

Lebih lanjut dikatakan Scott, bahwa hubungan *patron-client* sama dengan pranata sosial yang lain, memiliki 3 faktor khusus tempat berkembang dan tumbuh subur yaitu :

- a. Ketimpangan pasar yang kuat dalam penguasaan atas kekayaan, status dan kekuasaan yang sedikit banyak diterima sebagai hal yang absah.
- b. Tidak adanya jaminan fisik, status maupun kedudukan yang kukuh dan bersifat impersonal.
- c. Ketidakmampuan kesatuan keluarga sebagai wahana yang efektif bagi keamanan dan pengembangan pribadi.

Walaupun sejak lama pemerintah telah membuat mekanisme pemasaran ikan dengan menggunakan sistem lelang melalui tempat pelelangan ikan (TPI)



akan tetapi masalah pemasaran yang sepenuhnya belum tersentuh oleh pembangunan perikanan. Kenyataannya dalam praktek di lapangan belum ada suatu pola yang terpadu untuk dapat melepaskan nelayan dari jeratan para tengkulak dan pengijon meskipun usaha untuk memberikan harga yang wajar telah ada.

Ketergantungan yang tinggi pada satu sumber perikanan, menyebabkan pendapatan rata-rata masyarakat nelayan tradisional rendah. Selain itu masih banyak ditemukan beberapa kelemahan dalam mekanisme pelelangan ikan di TPI, seperti belum adanya satu pengawasan yang terbuka, kebebasan dalam menentukan harga serta administrasi pengelolaan pelelangan yang belum berjalan sempurna.

Memenuhi keperluan kebutuhan rumah tangga sehari-hari saja para nelayan harus berhutang apalagi untuk membeli alat-alat tangkap, ini dikarenakan pendapatan mereka rendah sehingga tidak mempunyai modal yang cukup. Para nelayan untuk mendapatkan modal dipinjam dari para tengkulak dan pengijon, maka para nelayan miskin tersebut akan terikat untuk menjual hasil tangkapan mereka pada para tengkulak dan pengijon. Semua hasil tangkapan dibeli dengan harga yang ditentukan sendiri oleh para tengkulak dan pengijon karena mempunyai hak eksklusif untuk membeli. Akibatnya posisi tawar menawar (*bargaining position*) antara penjual dan pembeli tidak ada.

Pada akhirnya, posisi nelayan miskin di pedesaan ibarat orang yang selamanya berdiri terendam dalam air sampai ke leher mereka, sehingga ombak yang kecil sekalipun sudah cukup untuk menenggelamkannya (Nasikun, 2001). Karena sesungguhnya pasar yang terbentuk, ternyata telah mengakibatkan nelayan



kaya untuk selalu berusaha melanggengkan kemiskinan nelayan kecil dengan jalan menjerat mereka pada hutang-hutang yang tidak akan pernah ada lunasnya.

Makin tenggelamnya masyarakat pesisir pada situasi yang tidak menguntungkan yang disebabkan mekanisme ini. Sosialisasi program untuk mengubah pola pikir masyarakat pesisir, sikap dan kebiasaan serta menanamkan jiwa kewirausahaan sangat diperlukan. Masyarakat pesisir diharapkan dapat lebih menggali potensi perikanan agar dapat menjadi sumber pendapatan yang lebih besar.

Sangat penting dilakukan sosialisasi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Barat karena hal ini untuk menanamkan pentingnya lembaga keuangan mikro yang dibentuk pemerintah yang berfungsi sebagai lembaga pembiayaan alternatif yang lambat laun menggantikan peran rentenir. Berdasarkan isi kebijakan pada teori Grindle yaitu jenis manfaat yang dihasilkan dan derajat perubahan yang diinginkan. Sangat jelas bahwa peran Dinas Kelautan dan Perikanan dan konsultan manajemen sangat penting dalam mensosialisasikan agar program ini dapat terus berkelanjutan.

Menurut Baiquni dalam Mangunwijaya (1983) teknologi adalah hasil penerapan sistematis dari sains, yang merupakan himpunan rasionalitas insani kolektif untuk memanfaatkan hidup dan mengendalikan gejala-gejalanya dalam proses produksi yang ekonomis.

Selanjutnya menurut Rogers dalam Abraham (1991), modernisasi merupakan proses ketika baik individu masyarakat berubah dari cara hidup tradisional menuju gaya hidup yang lebih kompleks dan maju secara teknologis serta cepat berubah. Karena merupakan proses, modernisasi dikatakan pula

mencakup rentang waktu pelaksanaannya. Artinya, modernisasi tidak dapat terjadi dengan tiba-tiba atau tidak terjadi seketika. Dalam modernisasi, ada sejumlah indikasi fisik yang dapat dilihat dalam kelangsungan proses tersebut. Salah satu fisik tersebut adalah mekanisasi alat atau mekanisasi teknologi dalam perikanan laut.

Pengertian teknologi di dalam modernisasi perikanan laut, yaitu adanya alat-alat teknologi maju yang menjadikan manusia (nelayan) dapat meningkatkan pendapatannya. Artinya dalam kaitannya dengan sudut pandang ekonomis, penggunaan teknologi perikanan diharapkan akan memungkinkan produktivitas kerja dan penghasilan nelayan yang semakin meningkat.

Sehubungan hal tersebut diatas, menurut Kuspurwahati (1984), ada beberapa kriteria yang harus ditempuh dalam hal penerapan teknologi. Kriteria-kriteria dalam pemilihan dan penerapan teknologi ini adalah sebagai berikut :

1. Teknologi yang dipilih harus memenuhi kebutuhan yang nyata. Teknologi dapat langsung dimanfaatkan dan dinikmati oleh masyarakat setempat.
2. Teknologi harus dapat menciptakan kegiatan yang selaras dengan kegiatan sosial dan budaya setempat.
3. Teknologi diprakarsai, mendapat partisipasi, meningkatkan kesempatan berusaha, meningkatkan kesempatan kerja, dan meningkatkan penghasilan masyarakat.
4. Teknologi harus dapat meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan mutu produksi, meningkatkan jumlah dan mutu tenaga manusia, menggalakkan inovasi, dan meningkatkan kreativitas masyarakat setempat.
5. Secara ekonomis, teknologi dapat dibiayai dengan modal sendiri dan diusahakan oleh masyarakat setempat.

Perlu dilakukannya pengkajian dan pemanfaatan yang terus menerus mengenai potensi dan teknologi eksploitasi serta teknologi pasca panennya dalam



hal pemanfaatan yang berkesinambungan dalam kaitannya dengan usaha perikanan.

Sumberdaya manusia yang masih rendah salah satu penyebab kemiskinan masyarakat pesisir yang tidak hanya disebabkan oleh akses modal dan alat tangkap yang masih tradisional. Sumberdaya manusia sangat penting peranannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir karena dengan keahlian dan pengetahuan mereka dalam mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumberdaya alam khususnya kelautan dan perikanan ini akan menentukan kemampuan masyarakat pesisir dalam menghasilkan secara optimal kekayaan alam tersebut. Sehingga pemerintah daerah lewat Dinas Kelautan dan perikanan Kabupaten Bangka Barat juga melaksanakan beberapa kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat pesisir seperti pendidikan dan latihan yang berkenaan dengan budi daya perikanan dan pengetahuan manajerial usaha kecil yang berbasis perikanan guna mengangkat masyarakat pesisir di Kabupaten Bangka Barat dari kemiskinan menjadi masyarakat pesisir yang sejahtera.

Seperti yang diungkapkan oleh Informan 4 :

“Tujuan dari program PEMP adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pengembangan kegiatan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan kelembagaan sosial ekonomi dengan mendayagunakan sumber daya kelautan dan perikanan secara optimal dan berkelanjutan” (wawancara, tanggal 19 April 2010).

Demikian juga yang diungkapkan oleh Informan 7 :

“Peranan lainnya artinya begini selain kita kasih pinjaman kita disini ada klinik bisnis artinya gini nelayan bisa konsultasi kita bagaimana mengelola uang yang ada di mereka kita kasih saran harusnya gimana gitu selain kasih pinjaman di sini ada klinik bisnis” (wawancara, tanggal 16 April 2010).



## 2. Kebijakan Peningkatan Kemampuan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Kabupaten Bangka Barat

Sebagaimana saya jelaskan pada Anak Bab A. Temuan di seksi 7 diatas bahwa pemerintah pusat menyampaikan konsep peningkatan ekonomi masyarakat pesisir, kemudahan arahan tersebut dijabarkan menjadi kebijakan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tingkat selanjutnya digunakan sebagai rujukan penyusunan kebijakan peningkatan ekonomi masyarakat pesisir Kabupaten Bangka Barat hal itu akan saya bahas pada bagian berikut ini seperti yang terlihat pada tabel dibawah untuk melihat penjabaran kebijakan Kabupaten Bangka Barat yang dibandingkan dengan kebijakan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

**Tabel 4.17 Penjabaran Kebijakan Peningkatan Kapasitas Kemampuan Ekonomi Masyarakat Pesisir antara Pusat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten Bangka Barat**

No.	Kebijakan Pemerintah Pusat	Kebijakan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Kebijakan Kabupaten Bangka Barat
1	Pengembangan kapasitas masyarakat pesisir dalam pengelolaan sumber daya pesisir yang berkelanjutan.	Untuk pengembangan kapasitas masyarakat pesisir dalam pengelolaan sumber daya pesisir yang berkelanjutan maka dibuatlah program peningkatan kualitas SDM, penyuluh dan pendamping perikanan	Kebijakan yang dikeluarkan adalah memberikan dukungan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir.
2	Pemberdayaan kelembagaan nelayan untuk meningkatkan posisi tawar terhadap harga-harga hasil tangkapan nelayan dan dalam pengambilan keputusan.	Untuk meningkat posisi tawar nelayan maka dibuatlah program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan.	Untuk meningkat posisi tawar nelayan dengan membangun kemitraan antara pengusaha dan nelayan.

No.	Kebijakan Pemerintah Pusat	Kebijakan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Kebijakan Kabupaten Bangka Barat
3	Pelaksanaan regulasi yang mengatur kawasan penangkapan ikan dan pengakuan atas tradisi lokal masyarakat pesisir.	Kebijakan yang dikeluarkan adalah program peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat	Kebijakan yang dikeluarkan adalah melindungi keselamatan nelayan dari persaingan dengan penangkapan ilegal dan Pembagian zona penangkapan/tata ruang perikanan untuk nelayan kecil dan besar.
4	Optimalisasi daya guna potensi sumber daya kelautan dan pesisir.	Kebijakan yang dikeluarkan adalah program pengembangan budidaya tangkap, program pengembangan perikanan tangkap, program pengembangan sistem penyuluhan perikanan, dan program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar.	Kebijakan yang dikeluarkan adalah pengembangan budidaya air laut, dan air tawar dan peningkatan kualitas SDM, penyuluhan dan pendamping perikanan.
5	Koordinasi berbagai sumber bantuan modal, peralatan tangkap dan teknologi untuk mendukung pengembangan ekonomi masyarakat pesisir.	Kebijakan yang dikeluarkan adalah melakukan koordinasi ke Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mendapatkan sumber bantuan modal, peralatan tangkap dan teknologi dan memberikan bantuan kepada nelayan di kabupaten/kota lewat APBD Provinsi.	Kebijakan yang dikeluarkan adalah melakukan koordinasi ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi untuk mendapatkan sumber bantuan modal, peralatan tangkap dan teknologi dan memberikan bantuan kepada nelayan di kabupaten/kota lewat APBD Kabupaten seperti mengupayakan kredit lunak dalam rangka penyediaan armada perikanan serta fasilitas pendingin/pengawetan, dan mendorong aktifitas koperasi perikanan dalam menyediakan bahan bakar, bahan pengawet, pelelangan ikan dan lain sebagainya.
6	Pemberdayaan ekonomi bagi perempuan di kawasan pesisir.	Kebijakan yang dikeluarkan adalah program pemberdayaan perempuan di kawasan pesisir di kabupaten/kota dengan membina dan membentuk industri kecil berbasis perikanan.	Kebijakan yang dikeluarkan adalah program pemberdayaan perempuan di kawasan pesisir di tingkat kecamatan dan desa dengan membina dan membentuk industri kecil berbasis perikanan.



No.	Kebijakan Pemerintah Pusat	Kebijakan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Kebijakan Kabupaten Bangka Barat
7	Peningkatan pengawasan kegiatan ekonomi pesisir dengan melibatkan masyarakat pesisir melalui patroli keamanan wilayah laut dan pesisir berbasis masyarakat (Siswasmas).	Kebijakan yang dikeluarkan adalah pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan .	Kebijakan yang dikeluarkan adalah pemberdayaan masyarakat pesisir dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan untuk melindungi keselamatan nelayan dari persaingan dengan penangkapan illegal.

Berdasarkan tabel tersebut jelas sekali terlihat bahwa penjabaran kebijakan Kabupaten Bangka Barat dalam hal peningkatan kapasitas kemampuan ekonomi masyarakat pesisir sudah sesuai dengan kebijakan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Berkenaan dengan peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat pesisir, maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat telah melaksanakan suatu kebijakan yaitu kebijakan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir yang sangat diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir khususnya nelayan yang menggantungkan hidupnya pada usaha penangkapan ikan di daerah pesisir. Walaupun kebijakan ini memang bukan merupakan satu-satunya faktor yang mempengaruhi peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, akan tetapi minimal telah membuka lapangan usaha bagi masyarakat pesisir untuk memanfaatkan sumber daya kelautan baik di perairan umum dan perikanan laut.

Sejak digulirkan dana penguatan modal Dana Ekonomi Produktif (DEP), masyarakat pesisir telah memanfaatkan pinjaman tersebut untuk modal usaha. Modal ini digunakan atau dikelola untuk berbagai keperluan usaha masyarakat pesisir, sehingga modal ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.



Menurut Roberto (1993), dalam Juliartha (2007:402), manfaat diartikan sebagai “guna” atau “faedah”, yang secara harfiah dianggap sesuatu yang menguntungkan untuk kepentingan dan atau perbuatan yang memberikan pengaruh. Sehingga bisa dikatakan bahwa manfaat merupakan segala sesuatu dan kegiatan pembangunan nasional memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan pengembangan pribadi warga negara serta mengutamakan kelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa dan kelestarian fungsi-fungsi lingkungan hidup dalam rangka pembangunan yang berkesinambungan dan berkelanjutan.

Jenis usaha nelayan perairan umum dan perikanan laut berdasarkan kesesuaian antara standar kriteria corak nelayan tradisional. Corak nelayan tradisional di Kabupaten Bangka Barat dapat diketahui dari beberapa ciri yang ada yaitu:

1. Operasional penangkapan ikan pada umumnya dijalankan sendiri dengan menggunakan perahu tanpa motor dan lebih banyak menggunakan tenaga (kekuatan fisik).
2. Peralatan penangkapan ikan/ udang yang digunakan sebagian besar terbuat dari bahan-bahan yang dirakit sendiri.
3. Unit penangkapan dijalankan sendiri atau dengan keluarga dan jarang menggunakan tenaga kerja upahan.
4. Tenaga kerja keluarga dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan keluarga dari usaha non perikanan, bertani, berdagang kebutuhan pokok dan lain-lain.

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa jenis usaha nelayan di perairan umum di Kabupaten Bangka Barat tergolong jenis usaha nelayan tradisional, hal ini terlihat dari cara maupun alat penangkapan yang digunakan, tingkat modal yang relatif rendah dan menggunakan tenaga kerja keluarga. Dengan kondisi yang seperti itu, tingkat pendapatan nelayan sangat dipengaruhi oleh kondisi ekologi perairan, permodalan, budaya setempat dan lainnya.

Kondisi ekologi perairan umum sangat mempengaruhi tingkat produktivitas hasil tangkapan nelayan. Perairan umum yang tercemar zat-zat kimia, kotor, larinya ikan akibat kegiatan penambangan menyebabkan nilai tangkapannya menjadi kecil. Disamping itu kegiatan penambangan ini dapat meracuni ikan dan lingkungan perairan disekitar tambang. Nilai tangkapan yang kecil ini jelas mempengaruhi tingkat pendapatan nelayan. Walaupun demikian aktivitas nelayan ini tetap memberi manfaat bagi kehidupan masyarakat terutama sebagai sumber pendapatan bagi keluarga.

Aktivitas sebagai nelayan dan usaha lainnya dibidang perikanan bagi masyarakat pesisir Kabupaten Bangka Barat merupakan salah satu sumber mata pencaharian hidup yang intinya menghasilkan produksi. Sumber mata pencaharian ini bagi masyarakat pesisir dan usaha perikanan lainnya merupakan mata pencaharian hidup yang menjanjikan bagi masyarakat, baik yang mata pencaharian utamanya sebagai nelayan maupun masyarakat yang mata pencaharian hidupnya diluar kedua pekerjaan tersebut sebagai mata pencaharian tambahan.

Berdasarkan hasil temuan penelitian di lapangan di dapat, bahwa setelah enam tahun berlalunya program PEMP ini tepatnya sejak 8 Juni 2004 terjadi



paradigma baru terhadap kebijakan program ini. Melalui pola agunan, kedisiplinan masyarakat meningkat, total pengembalian mendekati sembilan puluh persen. Selain itu masyarakat pun jadi bisa menghitung berapa proporsi biaya untuk keperluan hidup dan modal usaha, sehingga dana bantuan yang diberikan menjadi lebih efektif dalam penggunaannya. Sehingga diharapkan masyarakat pesisir pada akhirnya dapat mengatur keuangan sendiri dan belajar menabung. Jika hal ini dipatuhi dan dijalankan dengan disiplin, maka lambat laun modal usaha mereka dapat meningkat dengan sendirinya. Berikut komentar

Informan 9 :

“Sudah 6 (enam) bulan ini saya mendapatkan bantuan boat dan mesin, untuk pinjaman kredit dari koperasi sudah lama Pak waktu pinjaman pertama 5 juta sampaikan sudah 3 (tiga) kali minjam. Pengembalian pinjaman itu perbulan, ada peningkatan ekonomi semenjak saya mendapatkan pinjaman kredit dan bantuan boat beserta mesinnya” (wawancara, 17 April 2010).

Berikut petikan wawancara terhadap Informan 10 :

“Ada peningkatan Pak banyak ringan, kalau kita buka usaha perahu itu kalau kita kurang modal kita ngambil, sudah itu para nelayan itu kalau bikin bagan pakai perahu mereka ringan juga belum ada duit dapat berkerja mereka ngutang juga sama saya tolong menolong saya dapat pinjaman saya pinjamkan lagi ke nelayan yang lain tanpa bunga Pak” (wawancara, 17 April 2010).

Berikut pendapat Informan 11 pada wawancara tanggal 25 Mei 2010 :

“Ada Pak dengan adanya pinjaman pendapatan kami meningkat”.

Berikut pendapat Informan 12 :

“Ya saya cukup terbantulah sekarang, saya mengharapkan lancar-lancar saja Koperasi Swamitra Mina agar tetap eksis supaya kami bisa minjam lagi” (wawancara, tanggal 17 April 2010).

Selain pendapat para nelayan juga ada pernyataan dari Informan 3 pada saat peneliti menanyakan mengenai peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir



setelah mendapatkan bantuan itu, apakah ada peningkatan dari segi ekonomi, kesehatan, dan pendidikan? :

“Kalau dari segi indeks secara kumulatif mereka sudah maju dilihat dari ini ya Penganak terus di Sungai Buluh terus yang di Jebu Laut terus yang ada di Pala itu mereka sudah alhamdulillah mereka dengan adanya bantuan dari pemerintah bisa meningkatkan taraf hidup mereka walaupun kendalanya masih banyak kalau para nelayan ini kan musiman dikala musim angin besar mereka kan tidak melaut ini menjadi perhatian kita selaku pemerintah di kabupaten Bangka Barat ini” (wawancara, tanggal 27 April 2010).

Hasil wawancara tersebut, dapat dilihat bahwasanya dampak penambahan modal usaha nelayan pesisir meningkat. Dengan meningkatnya modal usaha yang ada pada masyarakat pesisir dapat menimbulkan efek kepada masyarakat baik sebagai kelompok sasaran (nelayan) maupun kelompok lain yang tidak dimaksudkan untuk disentuh oleh kebijakan. Mereka akan diakui, dan masyarakat pesisir mampu melepaskan diri dari jeratan rentenir dan toke. Dampak ini untuk nelayan, dapat meningkatkan sumberdaya manusia, pendapatan juga meningkat serta dapat memperluas akses mereka terhadap berbagai pelayanan publik seperti dapat menyekolahkan anak ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dapat menikmati pelayanan medis secara modern, dapat membeli rumah, bahkan akhirnya dapat membeli teknologi penangkapan ikan yang lebih modern secara mandiri.

Terlihat dari pernyataan tersebut bahwa peningkatan pendapatan nelayan walaupun tidak signifikan dan belum berimbas pada perubahan taraf hidup nelayan. Masyarakat pesisir belum dapat menjadikan pekerjaan ini sebagai peluang bisnis, ini merupakan bukti kemiskinan kultural (*culture poverty*), mereka masih memiliki pemikiran terbatas hanya untuk kebutuhan sehari-hari.

Selain itu mereka juga memiliki keterbatasan akses permodalan, informasi dan kemampuan manajemen. Keterbatasan akses yang dimiliki masyarakat pesisir dimanfaatkan oleh pemodal besar untuk membeli hasil tangkapan mereka dengan harga murah. Hasil produksi perikanan sebagian didistribusikan langsung ke pasar dan sebagian lagi diekspor.

Banyak proyek atau kegiatan yang dalam implementasinya memang menghasilkan terjadinya peningkatan pendapatan dan perluasan tenaga kerja setelah mendapat bantuan penguatan modal. Tetapi persoalannya apakah peningkatan pendapatan tersebut mampu memenuhi kebutuhan dasar nelayan dan mengikuti pertumbuhan harga-harga yang juga semakin meningkat.

Berdasarkan data perikanan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Barat seperti pada tabel 4.18 berikut ini, jelas sekali ada peningkatan yang cukup baik dari tahun 2005 – 2009 untuk data jumlah ikan yang ditangkap oleh nelayan terjadi peningkatan sebesar 175,57 %, jumlah ikan budidaya terjadi peningkatan sebesar 43,22 %, dan jumlah kelompok nelayan terjadi peningkatan sebesar 177,99 %, tetapi ada penurunan untuk data jumlah perahu/kapal yang dimiliki oleh nelayan yaitu pada tahun 2005 sebanyak 2.369 unit sedangkan pada tahun 2006 turun menjadi 1.217 unit akan tetapi naik lagi pada tahun 2007 dengan jumlah 1.622 unit kemudian tahun 2008 jumlahnya 1.874 unit terakhir pada tahun 2009 jumlahnya menjadi 2.366 unit. Artinya disini apabila kita lihat tidak ada peningkatan dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 malah terjadi penurunan sebesar 3 unit perahu atau sebesar 0,126 %.



Tabel 4.18 Data Perikanan di Kabupaten Bangka Barat

NO	DATA PERIKANAN	SAT	TAHUN				
			2005	2006	2007	2008	2009
1	Jumlah Perahu/Kapal yang Dimiliki oleh Nelayan	unit	2.369,00	1.217,00	1.622,00	1.874,00	2.366,00
2	Jumlah Ikan yang Ditangkap oleh Nelayan	ton	3.595,60	6.502,98	8.161,07	9.887,74	9.908,40
3	Jumlah Ikan budidaya	ton	129,22	63,05	184,22	452,20	185,85
4	Jumlah Kelompok Nelayan	kelompok	768,00	1.217,00	1.733,00	1.871,00	2.135,00

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Barat

Berdasarkan teori Grindle yang dilihat dari isi kebijakan yang menyangkut derajat perubahan, dan hasil kebijakan yang berupa dampak pada masyarakat, kelompok dan individu maka kebijakan program pemberdayaan masyarakat pesisir ini memang belum begitu menunjukkan perubahan yang besar. Dampak yang diharapkan yaitu agar masyarakat nelayan dapat mandiri belum tercapai, hal ini terlihat dari adanya ketergantungan terhadap bantuan pemerintah, serta belum adanya modernisasi pada alat tangkap dan belum menyebarnya kultur kewirausahaan secara luas. Kultur kewirausahaan pada masyarakat pesisir khususnya nelayan hanya mampu memasarkan ikan segar saja, dan belum mampu melakukan diversifikasi produk menjadi bentuk lain yang dapat meningkatkan nilai tambah dari produk ikan segar. Selain itu dengan adanya industri pengolahan bahan baku ini maka dengan sendirinya akan terjadi peningkatan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja. Jika hal ini berjalan dengan baik maka program ini



benar-benar dapat berdampak pada masyarakat, kelompok dan individu dari masyarakat pesisir.

Seperti yang disampaikan oleh Informan 4 :

“Program PEMP ini sudah dilaksanakan atau telah berjalan selama 6 tahun dan sampai saat ini tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir sudah mengalami perkembangan” (wawancara, tanggal 19 April 2010).

Masih menurut Informan 4 :

“Tolak ukur keberhasilan Program PEMP ini adalah semakin meningkatnya jumlah pemanfaatan dana permodalan untuk meningkatkan skala usahanya khususnya dibidang kelautan dan perikanan” (wawancara, tanggal 19 April 2010).

Menurut Informan 5 :

“Tolak ukurnya terutama kita lihat dari perkembangan tingkat minatnya masyarakat yang kedua untuk income pendapatan perkapita mereka bisa meningkat” (wawancara tanggal 22 Juni 2010).

Evaluasi kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Kabupaten Bangka Barat yang dikelola oleh Koperasi LEPP – M3 Bangka Barat lewat Unit Swa Mitra Mina telah menunjukkan peningkatan.

**Data bulan Desember tahun 2006 :**

1. DEP. TA. 2004, 2005 dan ABT. APBN 2005 berjumlah : Rp.1.925.444.000,- termasuk dana pembangunan SPDN.
2. Jumlah Debitur : 869 orang
3. Jumlah Anggota : 589 orang
4. Total Asset : Rp. 3.391.921.741,-
5. Total kredit yang disalurkan : Rp. 3.115.900.000,-
6. Simpanan Swa Mitra Mina : Rp.41.917.141,-
7. Swa Mitra Mina membukukan SHU Rp. 34.940.541,-

Pada akhir bulan Desember 2006, pelaksanaan kegiatan Program PEMP di Kabupaten Bangka Barat berjalan dengan baik. Hingga sampai pada saat itu para

pengurus Koperasi LEPP – M3 Bangka Barat, yang dibentuk dengan badan hukum No. 0004/kpts/BH/IV/204, tanggal 8 Juli 2004 dan Unit Swamitra Mina telah melakukan penguatan kelembagaan menyiapkan administrasi pencarian dana DEP ke nelayan dan membangun kerjasama dengan Bank Pelaksana (PT. Bank Bukopin cabang Palembang).

Dana DEP yang diterima oleh Koperasi LEPP – M3 Bangka Barat melalui Bank Bukopin sebesar Rp. 1.925.444.000,- dengan rincian :

- DEP.TA.2004 Rp. 727.902.000,-
- DEP.TA.2005 Rp. 649.965.000,-
- ABT.APBN Rp. 547.577.000,-

Di dalam dana DEP.TA.2005 diatas terdapat dana pembangunan SPDN sebesar Rp. 250.000.000,-. Secara keseluruhan total saldo USP Swamitra Mina di Bank Bukopin per 31 Desember 2006 dari sisa dana DEP.TA. 2004, TA. 2005 serta ABT.APBN 2005 yang belum digunakan masih sebesar Rp. 413.444.000,- belum termasuk potongan jasa giro.

Dana yang tersalurkan pada periode bulan Desember 2006 sebesar Rp. 142.700.000,- dengan jumlah peminjam sebanyak 32 orang. Hingga akhir bulan Desember 2006 Dana Ekonomi Produktif (DEP) telah dimanfaatkan sebanyak 869 orang debitur masyarakat pesisir di Kabupaten Bangka Barat dengan total pinjaman sebesar Rp. 3.115.900.000,- dengan jumlah anggota sebanyak 589 orang. Total asset yang dimiliki Koperasi LEPP – M3 sebesar Rp. 3.391.921.741,- dengan simpanan sebanyak Rp. 41.917.141,- dan pada akhir bulan Desember 2006 dapat membukukan SHU sebesar Rp. 34.940.541,-. Pada saat itu USP Swamitra Mina masih berupaya menyalurkan dana pinjaman kepada



masyarakat khususnya di Kabupaten Bangka Barat yang membutuhkan guliran dana pada Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir ini.

**Data bulan Desember tahun 2007 :**

1. DEP. TA. 2004, 2005 dan ABT. APBN 2005 berjumlah :  
Rp.1.925.444.000,- termasuk dana pembangunan SPDN.
2. Jumlah Debitur : 1.175 orang
3. Jumlah Anggota : 766 orang
4. Total Asset : Rp. 3.581.700.538,-
5. Total kredit yang disalurkan : Rp. 4.563.750.000,-
6. Simpanan Swa Mitra Mina : Rp.96.831.602,-
7. Swa Mitra Mina membukukan SHU Rp. 62.644.279,-

Dana yang tersalurkan pada periode bulan Desember 2007 sebesar Rp. 31.800.000,- dengan jumlah peminjam sebanyak 7 orang debitur. Hingga akhir bulan Desember 2007 Dana Ekonomi Produktif (DEP) telah dimanfaatkan sebanyak 1.175 orang debitur masyarakat pesisir di Kabupaten Bangka Barat dengan total pinjaman sebesar Rp. 4.563.750.000,- dengan jumlah anggota sebanyak 766 orang. Total asset yang dimiliki Koperasi LEPP – M3 sebesar Rp. 3.581.700.538,- dengan simpanan sebanyak Rp. 96.831.602,- dan pada akhir bulan Desember 2007 dapat membukukan SHU sebesar Rp. 62.644.279,-. Pada saat itu juga USP Swamitra Mina masih berupaya menyalurkan dana pinjaman kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Bangka Barat yang membutuhkan guliran dana pada Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir ini.

**Data bulan Desember tahun 2008 :**

1. DEP. TA. 2004, 2005 dan ABT. APBN 2005 berjumlah :  
Rp.1.925.444.000,- termasuk dana pembangunan SPDN.
2. Jumlah Debitur : 1.545 orang
3. Jumlah Anggota : 877 orang
4. Total Asset : Rp. 3.955.171.960,-
5. Total kredit yang disalurkan : Rp. 6.053.715.279,-
6. Simpanan Swa Mitra Mina : Rp. 143.746.093,-
7. Swa Mitra Mina membukukan SHU Rp. 87.756.032,-



Hingga akhir bulan Desember 2009 Dana Ekonomi Produktif (DEP) telah dimanfaatkan sebanyak 1.545 orang debitur masyarakat pesisir di Kabupaten Bangka Barat dengan total pinjaman sebesar Rp. 6.053.715.279,00,- dengan jumlah anggota sebanyak 877 orang. Total asset yang dimiliki Koperasi LEPP – M3 sebesar Rp. Rp. 3.955.171.960,00,- dengan simpanan sebanyak Rp. 143.746.093,00,- dan pada akhir bulan Desember 2008 dapat membukukan SHU sebesar Rp. 87.756.032,00,- Pada saat itu juga USP Swamitra Mina masih berupaya menyalurkan dana pinjaman kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Bangka Barat yang membutuhkan guliran dana pada Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir ini.

**Data bulan Desember tahun 2009 :**

1. DEP. TA. 2004, 2005 dan ABT. APBN 2005 berjumlah : Rp.1.925.444.000,- termasuk dana pembangunan SPDN.
2. Jumlah Debitur : 1.647 orang
3. Jumlah Anggota : 949 orang
4. Total Asset : Rp. 3.955.171.960,-
5. Total kredit yang disalurkan : Rp. 7.577.150.000,-  
(Piutang Yang Masih Aktif Rp.2.930.900.000,- & Pelunasan Rp.4.646.250.000,-)
6. Piutang Outstanding/Sisa Pinjaman Pokok Aktif : Rp. 1.690.769.793,-
7. Simpanan Swa Mitra Mina : Rp.182.953.744,-
8. Swa Mitra Mina membukukan SHU Rp. 22.293.130,-

Dana yang tersalurkan pada periode bulan Desember 2009 sebesar Rp. 160.300.000,- dengan jumlah peminjam sebanyak 19 orang debitur. Hingga akhir bulan Desember 2009 Dana Ekonomi Produktif (DEP) telah dimanfaatkan sebanyak 1.647 orang debitur masyarakat pesisir di Kabupaten Bangka Barat dengan total pinjaman sebesar Rp. 7.577.150.000,- dengan jumlah anggota sebanyak 949 orang. Total asset yang dimiliki Koperasi LEPP – M3 sebesar Rp. 3.955.171.960,- dengan simpanan sebanyak Rp.182.953.744,- dan pada akhir

bulan Desember 2009 dapat membukukan SHU sebesar Rp. 22.293.130,-. Pada saat itu juga USP Swamitra Mina masih berupaya menyalurkan dana pinjaman kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Bangka Barat yang membutuhkan guliran dana pada Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir ini.

**Tabel 4.19 Perkembangan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Kabupaten Bangka Barat Periode 2006-2009**

No.	Tahun Anggaran	Jumlah Debitur (orang)	Jumlah Anggota (orang)	Total Aset	Total Kredit	Simpanan	SHU
1	2006	869	589	Rp. 3.391.921.741	Rp. 3.115.900.000	Rp.41.917.141	Rp. 34.940.541
2	2007	1.175	766	Rp. 3.581.700.538	Rp. 4.563.750.000	Rp.96.831.602	Rp. 62.644.279
3	2008	1.545	877	Rp. 3.955.171.960	Rp. 6.053.715.279	Rp. 143.746.093	Rp. 87.756.032
4	2009	1.647	949	Rp. 3.955.171.960	Rp. 7.577.150.000	Rp.182.953.744	Rp. 22.293.130
5	% Perkemb.	89%	61%	17%	143%	336%	- 36 %

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Barat

Keterangan : DEP. TA. 2004, 2005 dan ABT. APBN 2005 berjumlah :Rp.1.925.444.000,- termasuk dana pembangunan SPDN.

Apabila kita lihat dari data-data tersebut terjadi peningkatan mulai dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 seperti jumlah debitur, total asset, total kredit yang disalurkan, dan simpanan Swa Mitra Mina.

Persentase jumlah peminjam sebanyak 869 orang, dibandingkan dengan jumlah nelayan pada tahun 2006 sebanyak 1.700 jiwa yaitu sebesar 51 %. Sedangkan pada tahun 2007 jumlah peminjam sebanyak 1.175 orang, dan jumlah nelayan 3.069 jiwa dengan persentase 38 %. Pada tahun 2008 jumlah peminjam sebanyak 1.545 orang dengan jumlah nelayan 2.675 jiwa dengan persentase 57,75 %. Sedangkan pada tahun 2009 jumlah peminjam sebanyak 1.647 orang dengan dengan jumlah nelayan 3.482 jiwa dengan persentase 47,3 %. Dari data tersebut bahwa persentase masyarakat pesisir yang mendapat pinjaman masih tergolong kecil jika dibandingkan dengan jumlah nelayan di Kabupaten Bangka Barat.



Selain itu juga Pemerintah Kabupaten Bangka Barat sebagai salah satu kabupaten pemekaran di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan beberapa kegiatan yang berkenaan dengan pemberdayaan masyarakat pesisir melalui Dinas Kelautan dan Perikanan yang di danai oleh APBD dan APBN berupa kegiatan pembangunan sektor perikanan dan kelautan. Berdasarkan data yang didapatkan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Barat dari tahun 2005 – 2009 telah mengalami peningkatan pembangunan di sektor perikanan dan kelautan, seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 4.20 Kegiatan Pembangunan Sektor Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bangka Barat 2005**

NO	JENIS KEGIATAN	SUMBER DANA	PENERIMA/LOKASI	VOLUME
1.	OPTIKAPI	APBD Propinsi		
	a. Pengadaan Coolbox		1. TPI Muntok	25 Buah
			2. TPI Jebus	25 Buah
	b. Pengadaan Keranjang Ikan		1. TPI Muntok	50 Buah
			2. TPI Jebus	50 Buah
	c. Pengadaan Jaring Kepiting		Desa Pusuk Kec. Kelapa	200 Pis
2.	Bantuan Alat Tangkap Sero	APBD Kabupaten	Nelayan Teluk Inggris Kcc, Muntok	1 Unit
3.	Pengadaan benih Ikan	APBD Kabupaten	Kecamatan Kelapa	
			1. Kelompok Nilah Desa Sinar sari	7 Orang/5.000 ekor
			2. Kelompok Sinar Harapan Desa Mancung	6 Orang/7.500 ekor
			3. Kelompok Seluang Desa Tuik	13 Orang/19.370 ekor
			Kecamatan Tempilang	
			1. Kelompok Lespat Desa Simpang Yul	6 Orang/6.240 ekor
			2. Kelompok Selepuk Indah Desa Air Lintang	10 Orang/10.640 ekor
			Kecamatan Muntok	
1. Kelompok Jawa Indah Desa Air Limau	6 Orang/3.000 ekor			



**Tabel 4.21 Kegiatan Pembangunan Sektor Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bangka Barat 2006**

NO	JENIS KEGIATAN	SUMBER DANA	PENERIMA/LOKASI	VOLUME
1.	Alat Tangkap Bubu dan GPS	APBN Dekonsentrasi	1. Kelompok Sejahtera Dusun Pehuar Desa Sungai Buluh Kecamatan Jebus	10 Gulung Kawat, Bubu & 1 Buah GPS
			2. Kelompok Teluk Limau I & II Desa Teluk Limau Kecamatan Jebus	40 Gulung Kawat, Bubu & 4 Buah GPS
			3. Kelompok Pala I Dusun Pala Desa Teluk Limau Kecamatan Jebus	20 Gulung Kawat, Bubu & 2 Buah GPS
2.	Pemasangan Terumbu Karang Buatan	APBD Propinsi	Perairan Teluk Inggris Kec. Muntok	2 Paket
3.	Alat Tangkap Gillnet	APBN Dekonsentrasi	Kelompok Nelayan Tanjung Besayap Kelurahan Tanjung Kec. Muntok	40 Pis
4.	Mesin Tempel 3,5 PK	APBN Dekonsentrasi	Kelompok Tungau Dusun Sadar Daya Desa Simpang Gong Kecamatan Simpang Teritip	7 unit
5.	Coolbox Kap. 20 Kg	APBN Dekons	1. Kelompok Lemuru Kec. Jebus	20 Unit
			2. Kelompok Lestari dusun Tanjung Ular Desa Air Putih Kecamatan Muntok	20 Unit
6.	Alat Pemotong Kemplang	APBN Dekonsentrasi	1. KUB Karya Mandiri Desa Rambat Kec. Sp. Teritip	2 Unit
			2. Kelompok Desa Belo Laut Kec. Muntok	2 Unit
7.	Pengelolaan Lingkungan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PLBPM)	APBN TP		
	a. Lokasi Dusun Sadar Daya Desa Simpang Gong			
	• Pembangunan MCK Komunal			2 Buah
	• Pembangunan Jembatan Lingkungan			20 Meter
	• Pengadaan PLTS			14 Unit
	• Pembangunan Jalan Poros Desa			1,1 Km
	• Pembangunan Rumah Contoh			1 Unit
	• Renovasi Rumah Warga			10 Unit
	• Pembangunan Tempat Sampah			2 Buah
	b. Lokasi Dusun Tanjung Ular Desa Air Putih			
	• Pembangunan Balai nelayan			1 Unit
• Pembangunan MCK Komunal	3 Unit			
• Revitalisasi MCK Komunal	3 Unit			

NO	JENIS KEGIATAN	SUMBER DANA	PENERIMA/LOKASI	VOLUME
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan Jembatan Lingkungan</li> <li>Pengadaan PLTS</li> <li>Pembangunan Tempat Sampah</li> <li>Pembangunan Rumah Contoh</li> <li>Renovasi Rumah Warga</li> </ul>			6 Meter
				2 Unit
				2 Unit
				1 Unit
				10 Unit
8.	Pengadaan Sarana Penangkapan Ikan	DAK	Kecamatan Muntok	
			1. Dusun Teluk Rubiah Kelurahan Tanjung	14 Orang
			2. Kelompok Maju Dusun Sukal Desa Belo Laut	7 Orang
			Kecamatan Simpang Teritip	
			1. Desa Kundi	17 Orang
			2. Dusun Sadar Daya Desa Simpang Gong	4 Orang
			Kecamatan Kelapa	
			1. Desa Pusuk	15 Orang
			2. Desa Tuik	8 Orang
			Kecamatan Jebus	
			1. Desa Balit	16 Orang
			Kecamatan Tempilang	
			1. Desa Air Lintang	17 Orang
9.	Pengadaan Benih dan Pakan Ikan	APBD Kabupaten	Kecamatan Kelapa	
			1. Kelompok Cahaya Harapan Desa Kayu Arang	15 Orang / 6.200 Ekor
			2. Kelompok Air Jeluh Desa Kayu Arang	8 Orang / 3.800 Ekor
			3. Kelompok Harapan Jaya Desa Sinar Sari	14 Orang / 6.400 Ekor
			4. Kelompok Kulan Jaya Kel. Kelapa	10 Orang / 2.085 Ekor
			5. Kelompok Air Menurin Desa Mancung	13 Orang / 4.890 Ekor
			6. Kelompok Senacang Jaya Desa Beruas	16 Orang / 2.400 Ekor
			Kecamatan Tempilang	
			1. Kelompok Harapan Jaya Desa Tanjung Niur	18 Orang / 9.000 Ekor
			2. Kelompok Payak Raut Desa Penyampak	5 Orang / 1.500 Ekor
			3. Kelompok Gelut Permai Desa Tempilang	5 Orang / 3.000 Ekor
			4. Kelompok Teratai Merah Desa Simpang Yul	34 Orang / 10.825 Ekor
			5. Kelompok Dana Harapan Desa Simpang Yul	10 Orang / 3.300 Ekor
			Kecamatan Muntok	
			1. Kelompok Pasir Putih Desa Air Belo	6 Orang / 6.600 Ekor
10.	Rehabilitasi TPI Parit 3 Jebus	APBD Kabupaten	Pasar Ikan Parit 3 Kecamatan Jebus	
11.	Penyusunan Masterplan dan DED BBI Lokal	APBD Kabupaten		
12.	Pengadaan Radio SSB	APBD Kabupaten		



NO	JENIS KEGIATAN	SUMBER DANA	PENERIMA/LOKASI	VOLUME
	dan Peralatan Selam			
13.	Pengadaan Mesin Boad	APBD Kabupaten		
14.	Pendidikan dan Pelatihan Petugas Pelelangan Ikan	APBD Kabupaten	Petugas TPI Muntok, TPI Jebus dan Nelayan	
15.	Pelatihan Teknis Budidaya Ikan Air Tawar	APBD Kabupaten	1. Desa Sinar Surya Kec. Tempilang	
			2. Desa Sinar Sari Kec. Kelapa	
16.	Pelatihan Perebusan Ikan Teri dalam rangka pemberdayaan Perempuan Pesisir	APBD Kabupaten	Desa Rambat Kecamatan Simpang Teritip	
17.	Pameran Industri Expo Bahari	APBD Kabupaten	Jakarta	
18.	Pemasangan Jaringan Listrik dan Penambahan Fisik Bangunan Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan	APBD Kabupaten		

**Tabel 4.22 Kegiatan Pembangunan Sektor Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bangka Barat 2007**

NO	JENIS KEGIATAN	SUMBER DANA	PENERIMA/LOKASI	VOLUME
1.	Pengadaan Radio dan GPS untuk POKMASWAS	APBD Propinsi	1. Kelompok Pala Dusun Pala Desa Teluk Limau Kecamatan Jebus	1 Unit
			2. Kelompok Kakap Desa Benteng Kota Kecamatan Tempilang	1 Unit
2.	Bantuan Benih dan Pakan Ikan	APBD Kabupaten	Kecamatan Kelapa	
			1. Kelompok Sumber Rejeki Kelurahan Kelapa	7 Orang / 2.800 Ekor
			2. Kelompok Talang Jaya Kelurahan Kelapa	23 Orang / 5.200 Ekor
			3. Kelompok Bakau Lestari Desa Kayu Arang	10 Orang / 4.000 Ekor
			4. Kelompok Harapan Jaya Sentosa Ds. Terentang Kecamatan Tempilang	13 Orang / 4.000 Ekor
			1. Kelompok Harapan Makmur Desa Sp. Yul	7 Orang / 2.800 Ekor
			2. Kelompok Tunas Harapan Desa Sp. Yul	7 Orang / 2.800 Ekor
			3. Kelompok Gelut Karindo Indah Ds. Tempilang	10 Orang / 4.000 Ekor
			4. Kelompok Gelut Lestari Desa Tempilang	12 Orang / 4.800 Ekor
			5. Kelompok Parit X Desa Tempilang	7 Orang / 3.200 Ekor
			6. Kelompok Murhadi Desa Tempilang	12 Orang / 4.400 Ekor
			7. Kelompok Tanjung Niur 2 Desa Tj. Niur	7 Orang / 3.200 Ekor
			8. Kelompok Tamara Harapan Ds. Tj. Niur	10 Orang / 4.000 Ekor
			9. Kelompok Tebir Permai	12 Orang / 4.800 Ekor



NO	JENIS KEGIATAN	SUMBER DANA	PENERIMA/LOKASI	VOLUME
			Desa Sinar Surya	
			Kecamatan Muntok	
			1. Kelompok Suka Damai Desa Parit Jaya	10 Orang / 4.400 Ekor
			2. Kelompok Langgeng Kelurahan Sungai Baru	6 Orang / 4.000 Ekor
			Kecamatan Simpang Teritip	
			1. Kelompok Cemeriduk Desa Peradong	6 Orang / 2.000 Ekor
			2. Kelompok Bawang Merah Desa Kundi	22 Orang / 8.800 Ekor
			Kecamatan Jebus	
			1. Kelompok Bina Warga Desa Ketap	10 Orang / 1.740 Ekor
			2. Kelompok Harapan Keluarga Ds. Teluk Limau	20 Orang / 7.700 Ekor
3.	Pengadaan Alat Tangkap Bubu	APBD Kabupaten	Dusun Ketap Baru Desa Ketap Kec. Jebus	4 Orang / 40 Unit
			Desa Air Nyatoh Kec. Simpang Teritip	5 Orang / 50 Unit
			Kelurahan Tanjung Kec. Muntok	9 Orang / 93 Unit
4.	Pengadaan Sarana Alat Tangkap	DAK	Kecamatan Tempiang	
			1. Kelompok Sika Dsn. Sika Ds. Tanjung Niur	9 Unit
			2. Kelompok Batu Putih Ds. Benteng Kota	7 Unit
			Kecamatan Jebus	
			1. Kelompok Sumber Rejeki Dsn. Kampak Ds. Jebus	8 Unit
			Kecamatan Simpang Teritip	
			1. Kelompok Bintang Murni Desa Rambat	14 Unit
			Kecamatan Muntok	
			1. Kelompok Mentok Asin Kel. Tanjung	7 Orang
			2. Kelompok Sinar Harapan Desa Air Putih	5 Orang
			3. Kelompok Sinar Jaya Kel. Sungai Daeng	5 Orang
5.	PLBM	APBN TP	Dusun Sadar Daya Desa Simpang Gong Kecamatan Simpang Teritip	
	• Renovasi Rumah Warga			8 Unit
	• Pembangunan Rumah Panggung Sederhana			1 Unit
	• Pembangunan Jalan Lingkungan			233 Meter
	• Pemasangan PLTS			6 Unit
	• Pembangunan Shelter			10 Unit
	• Pembangunan Balai Nelayan			1 Unit
	• Pembangunan Jembatan Kayu			12 Meter

NO	JENIS KEGIATAN	SUMBER DANA	PENERIMA/LOKASI	VOLUME
6.	Pengadaan Alat Navigasi/Pendeteksi Ikan Fish Finder	APBD Kabupaten	Kecamatan Tempilang	
			1. Kelompok Nelayan Tenggiri I	1 Unit
			Desa Benteng Kota Kecamatan Tempilang	
			2. Kelompok Nelayan Tenggiri II	1 Unit
			Desa Benteng Kota Kecamatan Tempilang Kecamatan Muntok	
			1. Kelompok Nelayan Tanjung Besayap	1 Unit
			Kelurahan Tanjung Kec. Muntok	
			2. Kelompok Nelayan Bunga Tanjung	1 Unit
			Kelurahan Tanjung Kec. Muntok	
			3. Kelompok Nelayan Belo Makmur	1 Unit
			Desa Belo Laut Kecamatan Muntok	
			4. Kelompok Nelayan Teluk Rubiah Laut I	1 Unit
			Kelurahan Tanjung Kec. Muntok	
5. Kelompok Nelayan Teluk Rubiah Laut II	1 Unit			
Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok				
6. Kelompok Nelayan Tanah Merah	1 Unit			
Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kecamatan Jebus				
1. Kelompok Nelayan Kakap	1 Unit			
Desa Teluk Limau Kec. Jebus				
2. Kelompok Nelayan Belanak	1 Unit			
Desa Teluk Limau Kec. Jebus				
7.	Peningkatan Konsumsi Ikan Masyarakat (Proksimas)	APBN Dekonsentrasi	1. Desa Kayu Arang Kec. Kelapa	1 Unit
			2. Dusun Nyikep Ds. Penyampak Kec. Tempilang	1 Unit
8.	Pekan Nasional	APBD Kabupaten	Kabupaten Banyuasin	
9.	Pameran Expo Bahari	APBD Kabupaten	Kota Surabaya	
10.	Pelatihan Budidaya Ikan Air Tawar di Sukabumi	APBD Kabupaten	Staff Dinas Kelautan dan Perikanan	
11.	Penyuluhan Hukum dalam Pendaaygunaan Sumberdaya Laut	APBD Kabupaten	Kelompok Nelayan dan HNSI/Rukun Nelayan	
12.	Pembangunan BBI Lokal Kelapa	DAK dan APBD Kab.	Kelurahan Kelapa Kecamatan Kelapa	
13.	Pembangunan PPI Muntok	DAK dan APBD Kab.	Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok	

**Tabel 4.23 Kegiatan Pembangunan Sektor Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bangka Barat 2008**

NO	JENIS KEGIATAN	SUMBER DANA	PENERIMA/LOKASI	VOLUME
1.	OPTIKAPI	APBN Dekonsentrasi		
	• Bantuan Mesin Boat 5 PK		• Nelayan Dusun Pait Jaya Kelurahan Tanjung dan Teluk Inggris	7 Unit
	• Bantuan Gillnet		• Kelompok Nelayan Desa Rambat dan Kelurahan Tanjung	40 Pis
	• Bantuan Jaring Kepiting		• Kelompok Nelayan Dusun pangkal Ahoi, Tanjung Punai dan Sukal Desa Belo Laut	270 Pis
	• Bantuan Trays		• TPI Muntok dan TPI Jebus	385 Buah
2.	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP)	APBN TP		
	• Pembangunan kedai Pesisir		• Unit Pelayanan Pengembangan (UPP) Budidaya Perikanan Sejiran Setason	1 Unit
	• Bantuan Sosial Mikro/Bantuan Langsung Masyarakat		1. Desa Kundi 10 Kelompok/94 Orang	Rp. 168.017.500,-
			2. Desa Rambat : 11 Kelompok/113 Org	Rp. 162.445.000,-
3.	Bantuan Sarana Alat Tangkap	DAK	Kecamatan Muntok	
			1. Kelompok Nelayan Selanget Dusun Tanjung Punai Desa Belo Laut	5 Paket
			2. Kelompok Nelayan Sejahtera Dsn II & III Desa Belo Laut	6 Paket
			3. Kelompok Nelayan Selindung Mandiri Dusun Selindung Desa Air Putih	5 Paket
			Kecamatan Kelapa	
			1. Kelompok Nelayan Satang Desa Kayu Arang	7 Paket
			Kecamatan Jebus	
			1. Kelompok Nelayan Sejahtera Desa Bakit	10 Paket
			2. Kelompok Nelayan Mandiri Ds. Sungai Buluh	4 Paket
			3. Kelompok Nelayan Sejahtera Dsn. Pebuar Desa Sungai Buluh	3 Paket
			4. Kelompok Nelayan Pancur Bahari Ds. Rukam	5 Paket
			Kecamatan Tempilang	
			1. Kelompok Nelayan Basun Desa Sinar Surya	5 Paket
			Kecamatan Simpang Teritip	



NO	JENIS KEGIATAN	SUMBER DANA	PENERIMA/LOKASI	VOLUME
			1. Kelompok Nelayan Air Nyatoh Ds. Air Nyatoh	5 Paket
4.	Bantuan Benih dan Pakan Ikan	APBD Kabupaten	Kecamatan Kelapa	
			1. Kelompok Tani Permai Desa Sinar Sari	11 Orang / 6.000 Ekor
			2. Kelompok Bina Usaha Kopyat Kel. Kelapa	8 Orang / 5.000 Ekor
			3. Kelompok Temiang Sari Desa Dendang	8 Orang / 5.000 Ekor
			Kecamatan Tempilang	
			1. Kelompok Mekar Sari Desa Simpang Yul	6 Orang / 7.000 Ekor
			2. Kelompok Nirwana Desa Simpang Yul	10 Orang / 7.000 Ekor
			Kecamatan Muntok	
			1. Kelompok Tirta Limau Desa Air Limau	7 Orang / 7.000 Ekor
			2. Kelompok Bersaudara Pal 2 Desa Air Belo	7 Orang / 6.000 Ekor
			3. Kelompok Kolara Harapan 1 Pal 6 Desa Air Belo	10 Orang / 7.000 Ekor
			4. Kelompok Kobe Pal 4 Desa Air Belo	10 Orang / 7.000 Ekor
			5. Kelompok Karya Unggul Desa Belo Laut	10 Orang / 8.000 Ekor
			6. Kelompok Usaha Maju Desa Belo Laut	9 Orang / 5.000 Ekor
			Kecamatan Jebus	
			1. Kelompok Sungai Butun Ds. Tumbak Petar	6 Orang / 5.000 Ekor
			2. Kelompok Mina Makmur Desa Bakit	10 Orang / 8.000 Ekor
5.	Regenerasi Pemuda Nelayan	APBD Kabupaten	Kec. Muntok	Rp. 60.000.000,-
6.	Pengadaan Alat Tangkap Jaring	APBD Provinsi	Kec. Muntok	190 Pis
7.	Pembangunan BSI Lokal	DAK dan APBD Kab.	Kelurahan Kelapa Kec. Kelapa	1 Paket
8.	Pembangunan PPI Muntok	DAK dan APBD Kab.	Kelurahan Tanjung Kec. Muntok	1 Paket
9.	Pameran Expo Bahari	APBD Kabupaten	Kota Surabaya	
10.	Pelatihan Budidaya Ikan Air Tawar	APBD Kabupaten	Pembudidaya Ikan Desa Bakit Kec. Jebus	
11.	Pelatihan PPI dan TPI	APBD Kabupaten	Staf Dinas Kelautan dan Perikanan, Staf TPI Muntok	
12.	Pembangunan Tambatan Perahu	APBD Kabupaten	Desa Belo Laut Kec. Muntok	150 M
13.	Pemasangan Terumbu Karang Buatan	APBD Propinsi	Teluk Kelabat Desa Bakit	1 Paket

**Tabel 4.24 Kegiatan Pembangunan Sektor Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bangka Barat 2009**

NO	JENIS KEGIATAN	SUMBER DANA	PENERIMA/LOKASI	VOLUME
1.	Pengadaan Sarana Penangkapan Ikan (Mesin Dalam)	APBD Kabupaten	1. Desa belo Laut Kec. Muntok	22 Unit
			2. Desa Kundi Kec. SP.Teritip	
2.	Pengadaan Alat Tangkap Jaring • Jaring Ikan  • Jaring Udang	APBD Kabupaten	1. Desa Belo Laut Kec. Muntok	650 Pis
			2. Desa Kundi Kec. SP. Teritip	525 Pis
			3. Desa Air Lintang Kec. Tempilang	
			4. Desa Kelapa Kec. Kelapa	
3.	Pembangunan Lanjutan BBI Lokal	APBD Kabupaten		1 Paket
4.	Pembangunan Lanjutan PPI Muntok	APBD Kabupaten		1 Paket
5.	Pemb. Tambatan Perahu	APBD Kabupaten		
	• Tambatan Perahu Anyai		Desa Kundi	62 M
	• Tambatan Perahu Tanjung Punai		Dusun Tanjung Punai Desa Belo Laut	300 M
	• Tambatan Perahu Bukit		Desa Bukit	125 M
	• Tambatan perahu Belo Laut		Desa Belo Laut	100 M
6.	Bantuan Benih dan Pakan Ikan	APBD Kabupaten		1 Paket
7.	Pengadaan Listrik Tenaga Surya	APBD Kabupaten		1 Paket
8.	Pembangunan BBI Lokal	DAK	Kecamatan Kelapa	1 Paket
9.	Pembangunan PPI Muntok	DAK	Kecamatan Muntok	1 Paket
10.	Pengadaan Sarana Penangkapan	DAK		55 Unit
11.	Pengelolaan Lingkungan Pesisir Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PLBPM)	APBN TP	Desa Air Putih Kec. Muntok	1 Paket
12.	Pemberdayaan Ekonomi. Sosial. Budaya. Pelaku Usaha Perikanan dan Masyarakat Pesisir	APBN TP	1. Desa Air Putih Kec. Muntok	1 Paket
			2. Kelurahan Tanjung Kec. Muntok	

Implementasi kebijakan pada dasarnya merupakan wahana penghubung yang memungkinkan tujuan-tujuan kebijakan publik mencapai hasil yang diinginkan. Oleh karena itu proses implementasi itu sendiri tidak berada dalam



suatu kondisi yang vakum, tetapi dilingkupi aspek sosial, budaya, ekonomi, lingkungan organisasi yang pada akhirnya dapat mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan. Telah dikemukakan sebelumnya ada beberapa aspek yang terkait dengan strategi kebijakan. Strategi ini pada dasarnya menegaskan tentang upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya perairan umum dan perikanan laut di Kabupaten Bangka Barat.

Hasil implementasi kebijakan terhadap pemberdayaan masyarakat pesisir di Kabupaten Bangka Barat telah menunjukkan hasil yang cukup baik walaupun belum optimal sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Hal ini berpengaruh pada rendahnya tingkat taraf hidup masyarakat pesisir di Kabupaten Bangka Barat.

Menurut Andrew Dunsire (dalam Wahab, 1997:47):

*implementation gap* yaitu suatu kondisi dimana dalam proses implementasi kebijakan selalu akan terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan (*gap*) antara apa yang diharapkan (direncanakan) oleh pembuat kebijakan dengan apa yang senyatanya dicapai (sebagai hasil atau dampak dari pelaksanaan kebijakan).

Permasalahannya adalah mengapa implementasi kebijakan program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Kabupaten Bangka Barat belum mencapai suatu tingkat kinerja kebijakan yang diharapkan. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi, sehingga kinerja implementasi kebijakan tersebut belum mencapai kinerja yang diharapkan. Mengacu pada teori Grindle serta Sabatier dan Mazmanian, yang pada dasarnya melihat implementasi kebijakan sebagai sesuatu yang tidak terlepas dari pengaruh berbagai faktor sehingga berdampak pada keberhasilan pencapaian tujuan kebijakan.



Faktor-faktor yang berpengaruh atau faktor yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir yang dilihat dari beberapa ahli kebijakan bersepakat untuk menyimpulkan ada beberapa hal yang mempengaruhi implementasi suatu kebijakan yaitu kewenangan, sumber daya yang terdiri dari sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber dana. Sikap yang terdiri dari sikap aparat pelaksana dan masyarakat sebagai target grup dan terakhir adalah koordinasi dan komunikasi aparat pelaksana kebijakan.

Kewenangan merupakan operasional dari pendapat Grindle (1980) dan Sabatier dan Mazmanian (1983). Grindle (1980) memberikan pendapatnya mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses implementasi kebijakan. Menurutnya, implementasi kebijakan dapat dipengaruhi oleh faktor isi kebijakan dan konteks kebijakan. Salah satu dari sisi kebijakan yang dimaksudkan oleh Grindle adalah "*site decision making*" atau letak pengambilan keputusan. Letak pengambilan keputusan berkaitan erat dengan kewenangan seseorang pimpinan dalam mengambil keputusan, atau yang disebut sebagai struktur birokrasi yang didalamnya mencakup aspek-aspek serta pembagian kewenangan, struktur organisasi, hubungan antar unit organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan, dan hubungan organisasi dengan organisasi luar dan lain sebagainya. Karenanya, struktur birokrasi (*bureaucratic structure*) mencakup dimensi fragmentasi (*fragmentation*) dan apa yang disampaikan oleh Linebery (1978) yaitu standar prosedur operasi (*standard operating procedure*).

Selanjutnya Sabatier dan Mazmanian (1983) menyebutkan dukungan kewenangan yang termasuk dalam faktor di luar peraturan memiliki pengaruh

dalam implementasi kebijakan. Lembaga atasan dari organisasi pelaksana dapat memberikan dukungan terhadap tujuan kebijakan melalui jumlah dan arah pengawasan, penyediaan sumber keuangan dan pemberian tugas-tugas baru.

Membicarakan masalah kewenangan aparat pelaksana dalam melaksanakan kebijakan daerah, orientasi pokok bahasannya tidak bisa mengabaikan kaitannya dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi. Pengaruh keduanya setidaknya melekat pada kemauan politiknya untuk mendelegasikan seluruh atau sebagian wewenang kepada pemerintah. Dasar pemikiran tersebut sangat beralasan, karena kewenangan daerah untuk melaksanakan kebijakan di daerahnya pada pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat dan provinsi, yang secara yuridis dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang tersebut merupakan pedoman atau sarana aturan untuk pengambilan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan di daerah dan pengejawantahan bentuk sistem pemerintahan yang meliputi tiga sistem, yaitu desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dengan penekanan pada daerah Kabupaten/Kota. Ketiga bentuk sistem tersebut merupakan realisasi dari suatu komitmen pembagian kewenangan dalam pelaksanaan kebijakan publik.

Kaitannya dengan kinerja implementasi kebijakan program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir di dalam penelitian ini adalah berhubungan dengan kewenangan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung di dalam menetapkan dan mengusulkan kabupaten/kota calon penerima Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir tahun berikutnya berdasarkan hasil evaluasi tahun berjalan. Selain itu,



kewenangan lain yang dilihat yaitu kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Barat dan koperasi sebagai pelaksana program.

Hasil penelitian diketahui bahwa kewenangan provinsi dalam mengemban dan menjalankan program yang telah ditetapkan dari pemerintah pusat sebagai representasi Kementerian Kelautan dan Perikanan di daerah dalam tugas melakukan koordinasi, sosialisasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan. Adapun tugasnya yang lain yaitu mengusulkan kabupaten/kota calon penerima PEMP telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan sasaran yang dituju.

Kewenangan dari Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten/kota sebagai penanggungjawab operasional program dalam menetapkan konsultan pelaksana kegiatan di Kabupaten/kota, menetapkan koperasi pelaksana, sosialisasi dan publikasi tingkat kabupaten/kota, fasilitasi pembentukan LKM, rekrutmen tenaga pendamping desa, pelatihan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan. Kewenangan ini telah dilaksanakan dan berjalan dengan baik, tetapi belum optimal seperti tenaga pendamping desa dan konsultan manajemen.

Konsultan manajemen berfungsi membantu Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten/kota dalam aspek teknis dan manajemen program PEMP. Pendampingan ini meliputi kegiatan inventarisasi potensi dan kebutuhan masyarakat pesisir dalam modal usaha, pemetaan jalur produksi, pasar, dan konsumen serta kemungkinan pengembangan program melalui kerja sama dengan berbagai pihak. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa fungsi yang dijalankan hanya sampai pembantuan dalam pembuatan proposal pengajuan pinjaman.



Sedangkan fungsinya yang lain tidak dijalankan sesuai dengan pedoman umum. Hal ini adalah kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Barat untuk melakukan pembinaan.

Tenaga Pendamping Desa (TPD) merupakan tenaga profesional dibidangnya yang bersedia tinggal di tengah masyarakat sasaran dan bertugas mendampingi masyarakat secara terus menerus (selama program berlangsung) dalam bentuk mempersiapkan masyarakat pesisir untuk mengakses kredit pada LKM, mendampingi mereka menjalankan dan mengembangkan usaha baik dalam proses produksi maupun pemasaran, membuat laporan perkembangan kegiatan setiap bulan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Barat. Dari hasil penelitian tugas Tenaga Pendamping Desa baru sampai pada kegiatan sosialisasi, pembantuan pembuatan proposal masyarakat dan pembuatan laporan. Sedangkan tugas yang sesuai dengan pedoman umum belum dilaksanakan, hal ini pun menjadi tanggungjawab Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Bangka Barat selaku penanggungjawab operasional di lapangan.

Kebijakan publik harus diterjemahkan secara rinci oleh birokrasi dalam program aksi sebagai cara mencapai sasaran. Cara sebagai wujud dari implementasi kebijakan mengandung beberapa komponen pendukung kebijakan yaitu sumber daya berupa sumber daya program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir, sumber daya manusia (pelaksana) dan sumber dana (besar dan sumbernya). Proses implementasi kebijakan sumber daya harus dijamin ketersediannya karena akan menjadi faktor penghambat. Pelaksanaan suatu program memerlukan perpaduan ketiga sumber daya secara bersama dan apabila salah satu sumber daya mengalami keterlambatan dalam penyediaannya akan

mengganggu keberhasilan program tersebut. Beberapa ahli mengungkapkan hal yang sama bahwa faktor sumber daya memiliki pengaruh dalam proses implementasi kebijakan seperti Van Meter dan Van Horn (1975), Grindle (1980), Sabatier dan Mazmanian (1983), Edward III (1980) serta Cheema dan Rodinelli (1983).

Kebijakan program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Kabupaten Bangka Barat, diamati dalam tiga sudut pandang sumber daya. Pertama adalah sumber daya alam perikanan, yang kedua adalah sumber daya manusia sebagai aparat pelaksana kebijakan, dan yang sumber dana yang dialokasikan untuk menunjang pelaksanaan program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir. Sumber daya alam memiliki peranan penting karena kebijakan ini berguna untuk mengelola potensi perikanan sebagai sumber pendapatan masyarakat pesisir. Besar kecilnya potensi yang dimiliki sangat menentukan besar kecilnya pendapatan yang akan diperoleh dan kompleksitas dalam pengelolaannya. Kondisi alam berupa potensi perikanan mempunyai kontribusi yang penting, dimana besar kecilnya potensi akan memberi warna motivasi bagi aparat pelaksana dan masyarakat pesisir untuk menjalankan kebijakan dengan baik.

Wilayah pesisir merupakan salah satu ekosistem yang telah lama diketahui menyimpan permasalahan yang cukup serius bagi kelangsungan hidup manusia yang memanfaatkannya. Permasalahan ini terutama menyangkut *trade off* pemanfaatan sumber daya pesisir, yaitu antara kepentingan ekonomi dan preservasi fungsi ekologisnya. Sebagai suatu ekosistem, wilayah pesisir merupakan ekosistem penting bagi keberlanjutan hidup, baik manusia sendiri



maupun lingkungannya secara keseluruhan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa sumber daya alam di wilayah ini telah mengalami tingkat deplesi (tingkat/laju pengurangan stok dari sumber daya alam tidak dapat diperbarukan) dan degradasi (mengacu pada penurunan kualitas/ kuantitas sumber daya alam dapat diperbarukan) yang cukup mengkhawatirkan.

Berdasarkan penelitian dari Universitas Bangka Belitung, yang merupakan hasil pengamatan terhadap kondisi terumbu karang di Daerah Tungau Kecamatan Simpang Teritip ternyata kurang baik. Karenanya, hingga artikel ini dibuat belum ada daerah di Kabupaten Bangka Barat yang kondisinya tergolong bagus atau sangat baik (tutupan karang hidup > 75%). Namun setelah melakukan pengamatan hasilnya ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan. Terumbu karang di kawasan ini kondisinya buruk (tutupan karang hidup <25%). Terumbu karang dipantai ini tampak merata dan banyak yang mati tertutup substrat halus. Saat melakukan pengamatan air laut pun kurang jernih akibat substrat-substrat halus yang banyak beterbangan di perairan. Hal ini menyebabkan kondisi karang kurang optimal dan karang yang tidak sanggup terhadap tekanan kondisi ini banyak yang mati. Tampak karang-karang massive yang mati dan tertutup sedimen di hampir seluruh permukaannya. Selain itu tampak pula substrat-substrat yang menempel pada karang *Acropora digitate* dan karang foliose. Selain itu ditemukan pula banyak bulu babi hitam (*Diadema* sp.) di ekosistem terumbu karang.

Namun masih tetap ada ditemukan karang yang kondisinya masih baik. Hal ini diestimasikan karena karang berada pada perairan yang arusnya cukup



kuat sehingga mampu menyapu sedimen-sedimen halus yang menempel pada karang tersebut. Karena karang yang kondisinya lebih baik tersebut berada pada perairan yang lebih dalam dengan arus yang lebih kuat. Banyaknya sedimen halus besar kemungkinan diakibatkan oleh arus perairan yang membawa substrat-substrat tersebut. Selain itu aktivitas penambangan timah inkonvensional apung (TI Apung) yang masih marak di sekitar pantai tersebut. Sedimen-sedimen halus tersebut terbawa arus dan akhirnya menutup polip-polip karang yang ukurannya lebih kecil sehingga lama kelamaan akan menyebabkan kematian karang.

Jenis ikan yang ditemui di ekosistem terumbu karang di daerah ini pun rendah. Tak banyak jenis ikan yang ditemukan dan ukurannya relatif kecil. Inilah yang terjadi ketika ekosistem terumbu karang telah rusak. Perikanan akan menurun karena rumah, tempat tumbuh dan tempat mencari makan telah rusak. Selain itu potensi pariwisata pun akan sulit berkembang karena turis asing yang sebagian besar berasal dari daerah subtropis bukan hanya menyukai keindahan pantai yang tampak luar namun menyukai wisata underwater dengan snorkling dan diving di ekosistem terumbu karang tropis yang memiliki keanekaragaman yang jauh lebih tinggi daripada ditempat asal mereka. Karenanya, ketika pemerintah daerah ini serius ingin membangun sektor pariwisata bahari, seharusnya serius pula menjaga kelestarian terumbu karang kita. Sayangnya, kenyataan yang terlihat banyak terumbu karang yang kondisinya merana bahkan rusak permanen akibat kebebasan penambangan timah yang kebablasan.

Faktor pendukung sumber daya untuk mengimplementasikan kebijakan program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir adalah potensi kelautan yang besar. Potensi sumber daya perikanan darat khususnya kolam dan sungai,

untuk Kabupaten Bangka Barat sebenarnya cukup besar, jika dilihat dari banyaknya kolong yang membentuk kolam akibat penambangan darat. Kolong-kolong bekas penambangan timah yang banyak ditinggalkan, akan berisi air jika hujan. Sayang potensi ini tidak bermanfaat, karena kadar keasaman air yang tinggi sebagai akibat penguapan dan larutnya pasir silika. Tingkat pencemaran air laut yang sangat krusial adalah terganggunya terumbu karang baik pada daerah dangkal maupun tempat-tempat yang lebih dalam lagi. Kegiatan penambangan ini dapat mengganggu ekosistem laut. Komunitas udang, kerang dan ikan-ikan kecil sangat banyak di terumbu karang. Padahal disini merupakan daerah yang menjadi mata pencaharian nelayan tradisional.

Faktor penghambat adalah produksi perikanan yang cenderung statis, hal ini disebabkan oleh pencemaran dan kerusakan lingkungan perairan sehingga dapat mengganggu potensi perikanan. Adanya usaha untuk menjaga kelestarian lingkungan sangat diperlukan yang dilakukan untuk melindungi potensi sumber daya alam perikanan. Ekosistem perikanan akan tetap sustensi apabila lingkungan terpelihara dari perusakan dan pencemaran. Kebijakan pengelolaan program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir ini memanfaatkan potensi perikanan laut dan perairan umum. Keberlanjutan dari kebijakan tersebut sangat tergantung pada kelestarian dari sumber daya perikanan, dan apabila sumber daya tersebut telah dirusak maka potensi perikanan yang ada dengan sendirinya akan musnah.

Faktor pendukung sumber daya manusia atau aparat pelaksana implementasi kebijakan pengelolaan program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menunjuk Kabupaten Bangka Barat melalui Dinas Kelautan dan Perikanan



sebagai instansi teknis yang mengelola kebijakan dan potensi kelautan dan perikanan di Kabupaten Bangka Barat. Secara teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Barat bertugas melakukan koordinasi, sosialisasi, monitoring, evaluasi serta pelaporan. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Barat juga sebagai penanggungjawab operasional program, bertugas menetapkan konsultan pelaksanaan kegiatan, menetapkan koperasi pelaksana, sosialisasi dan publikasi tingkat Kabupaten. Adapun tugasnya yang lain adalah memfasilitasi pembentukan LKM (bagi daerah baru penerima program PEMP), rekrutmen Tenaga Pendamping Desa (TPD), pelatihan, evaluasi serta pelaporan.

Sedangkan faktor penghambat adalah kurangnya keterampilan dalam pengelolaan kebijakan program PEMP merupakan masalah besar yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat. Dalam hal ini kurangnya pemahaman aparat pelaksana dalam mensosialisasikan apa yang menjadi tujuan program. Sebagaimana dimaklumi bahwa unit organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi dan Kabupaten, yaitu para staf sangat jarang menghadapi tugas-tugas yang membutuhkan keahlian dan keterampilan. Dari pengamatan di lapangan, aparat yang terlibat dalam pengelolaan program PEMP tidak mengelola dengan baik, hal ini terlihat pada tidak lengkapnya data pelaporan, belum optimalnya fungsi dari konsultan manajemen dan tenaga pendamping desa yang fungsinya sebagai pendamping. Kinerja mereka masih rendah karena belum adanya kegiatan inventarisasi potensi dan kebutuhan masyarakat pesisir dalam modal usaha, pemetaan jalur produksi pasar dan kemungkinan pengembangan program melalui kerja sama berbagai pihak. Hal ini menyebabkan masyarakat pesisir sulit



menjadi mandiri, karena tidak adanya bimbingan dalam usaha intensifikasi dan diversifikasi.

Menurut Wibawa (1994:24) yang menyampaikan bahwa implementasi kebijakan menuntut tersedianya sumber daya yang lain yaitu sumber dana berupa dana maupun insentif. Kinerja implementasi kebijakan akan rendah apabila dana yang dibutuhkan tidak disediakan oleh pemerintah secara memadai.

Dari hasil temuan di lapangan yang menjadi faktor pendukung adalah adanya sumber alokasi dana dari APBN yang digunakan untuk mendukung Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir. Besarnya alokasi dana untuk program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir ini merupakan kebijakan dari tingkat pusat. Sedangkan yang menjadi penghambat adalah insentif yang diberikan selama ini tidak lancar yang mengakibatkan para staf tidak bekerja secara optimal, dalam hal kegiatan sosialisasi dan pendampingan.

Masalah dana adalah masalah yang krusial di dalam implementasi kebijakan, dimana kebijakan yang ditetapkan oleh legislatif sering tidak disertai dengan pembiayaan, para administrator tidak menerima dana yang memadai untuk membayar personel yang dibutuhkan dalam melaksanakan kebijakan. Adanya kenyataan bahwa motivasi dasar dari pegawai yang melakukan pekerjaan di luar tugas pokoknya adalah untuk mendapatkan tambahan penghasilan (insentif). Guna mendorong produktivitas kerja pegawai menjadi lebih tinggi dalam implementasi kebijakan, banyak organisasi memberikan insentif sebagai bagian dari sistem imbalan yang berlaku bagi pegawai pemerintah. Sehingga walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor

kekurangan sumber daya untuk melaksanakan implementasi maka implementasi tidak akan berjalan efektif.

Dari analisis di atas jelas sekali bahwa kebijakan peningkatan kapasitas kemampuan ekonomi masyarakat pesisir di Kabupaten Bangka Barat tergantung pada kesesuaian antara kebijakan Pusat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten Bangka Barat. Faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif tergantung pada sumber daya alam perikanan, sumber daya manusia sebagai aparat pelaksana kebijakan, dan sumber dana yang dialokasikan untuk menunjang pelaksanaan program.

### **3. Pemahaman Masyarakat Terhadap Program**

Berdasarkan temuan di lapangan bahwa sikap masyarakat terhadap pemahaman terhadap program cukup baik. Hal ini tergambar pada sebagian besar masyarakat pesisir yang meminjam kredit mengembalikan pinjaman tersebut dengan lancar sedangkan sebagian lagi dalam mengembalikan pinjaman tidak lancar, tetapi tetap bisa melunasinya. Memang masih ada sebagian kecil masyarakat masih menganggap bahwa bantuan dari pemerintah tidak perlu dikembalikan. Idealnya diharapkan pada pemberdayaan masyarakat pesisir melalui bantuan Dana Ekonomi Produktif ini dapat membuat masyarakat pesisir mandiri dan dapat mengakses permodalan ke sumber formal. Dalam kenyataannya masyarakat pesisir masih berharap kepada bantuan dari pemerintah dan belum dapat mengakses sumber permodalan ke bank atau lembaga kredit formal lainnya.

Pemahaman masyarakat terhadap implementasi kebijakan peningkatan kapasitas kemampuan ekonomi masyarakat pesisir di Kabupaten Bangka Barat dengan melaksanakan Program PEMP, berdasarkan wawancara yang telah



dilakukan secara mendalam bahwa pada dasarnya masyarakat pesisir telah bisa memahami program tersebut ini tidak lepas dari usaha semua pihak yang terlibat baik itu pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Barat serta pihak Koperasi Swamitra Mina Kabupaten Bangka Barat.

Seperti yang disampaikan oleh Informan 4 :

“Penerimaan masyarakat pesisir terhadap Program PEMP ini bisa diterima dengan baik sekali, karena program ini muncul sebagai akibat dari pengurangan bantuan/subsidi pemerintah terhadap BBM sehingga mempengaruhi kenaikan komponen-komponen harga lainnya, sehingga program ini sangat membantu bagi masyarakat miskin di wilayah pesisir” (Wawancara, tanggal 19 April 2010).

Informan 5 juga menyatakan :

“Samapai saat sekarang kondisinya ya masyarakat sangat menerima dan sangat membutuhkan program tersebut karena untuk mengembangkan tingkat usaha mereka “ (Wawancara, tanggal 22 Juni 2010).

Begitu juga yang ditutur oleh Informan 6 sebagai berikut :

“Pada dasarnya masyarakat itu kebanyakan paham Pak, tapi pengertian itu dari teman masing-masing misalnya yang A sudah tahu program dari awal undangan itu kan dari kabupaten itu tidak semuanya datang ke kabupaten atau sebagian dari perwakilan masing-masing kecamatan, misalnya kecamatan A ini kurang lebih 5 orang untuk melakukan sosialisasi program PEMP tersebut mereka kalau ketemu sama-sama nelayan mereka bisa bersosialisasi tentang program PEMP bahwa program PEMP di Bangka Barat ini ada” (wawancara, 17 April 2010).

Berdasarkan wawancara secara mendalam dengan Informan 6 dapat kita ketahui bahwa tingkat pemahaman masyarakat pesisir di Kabupaten Bangka Barat adalah sebagai berikut :

“Dikatakan bagus kurang bagus juga, ya..... paling 70 % paham” (wawancara, 17 April 2010).



Sedangkan hasil wawancara terhadap salah satu nelayan yang menerima bantuan kredit usaha Program PEMP dari Koperasi Swamitra Mina Kabupaten Bangka Barat, seperti yang dituturkan oleh Informan 9 pada saat peneliti mendatanginya di Pantai Tembelok :

“Mengerti, sedikit banyaknya saya mengerti” (wawancara, 17 April 2010).

Pemahaman masyarakat pesisir terhadap denda bagi nelayan yang telat membayar cicilan kredit PEMP pada Koperasi Swamitra Mina Bangka Barat memang sudah cukup baik ini dilihat dengan adanya pernyataan dari Informan 7 pada koperasi tersebut :

“Ada pertama denda, denda itu kita kenakan 5 % dari jumlah cicilannya tapi alhamdulillah rata-rata sih untuk ini kita belum sampai ke penyitaan, pembayaran cicilan kredit rata-ratanya bagus” (wawancara, 16 April 2010).

Pengembalian kredit PEMP pada Koperasi Swamitra Mina Bangka Barat tergantung pada musim saat musim panen ikan para nelayan pengembaliannya lancar. Berikut pernyataan Informan 7 :

“Kalau pengembalian kredit dari nelayan ini faktor musim sangat besar pengaruhnya jadi pengembalian pada musim dia panen pengembaliannya cepat tapi pada musim-musim tertentu pengembaliannya lama.....” (wawancara, 16 April 2010).

Jadi berdasarkan pernyataan diatas bahwasanya masyarakat pesisir khususnya nelayan memahami pentingnya pengembalian kredit pada Program PEMP akan tetapi ada faktor alam yang sangat besar pengaruhnya dalam hal kelancaran pencicilan kredit setiap bulan.

Pemahaman masyarakat terhadap program juga dipengaruhi oleh sikap aparat pemerintah yang bertugas supaya program ini berjalan dengan baik.

Faktor sikap merupakan faktor yang ikut mempengaruhi implementasi kebijakan Program PEMP, sesuai dengan yang dikemukakan oleh Grindle (1980) dan Sabatier dan Mazmanin (1983). Menurut mereka ada dua hal yang terlibat dalam implementasi kebijakan yaitu, pelaksana dan kelompok sasaran. Dalam pelaksanaan kebijakan sikap pelaksana yang terlibat akan berkaitan dengan kepentingan yang akan diperolehnya. Seperti itu juga dengan sikap kelompok masyarakat terhadap kebijakan, apakah kebijakan tersebut dapat memberikan keuntungan atau tidak kepada mereka. Apabila yang timbul adalah sikap negatif dari kedua aktor ini, maka akan menghambat implementasi kebijakan tersebut. Sikap yang dalam konsep Edward III (1980) dalam tangkilisan (2003:90), diberi label disposisi. Disposisi dalam implementasi kebijakan publik diartikan sebagai kecenderungan, keinginan atau kesepakatan para pelaksana (*implementors*) untuk melaksanakan kebijakan. Jika ingin berhasil secara efektif dan efisien suatu implementasi kebijakan, maka para pelaksana tidak hanya harus mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melaksanakan kebijakan itu, tetapi para pelaksana juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Kebanyakan para pelaksana tidak dapat melaksanakan implementasi kebijakan dengan leluasa, alasannya adalah adanya ketergantungan mereka terhadap superioritas orang-orang yang merumuskan kebijakan. Alasan lain adalah kompleksitas kebijakan itu sendiri. Cara pelaksana melaksanakan kebijakan, bagaimana pun juga tergantung dari sikap atau disposisi/kecenderungan mereka terhadap suatu kebijakan. Sikap itu yang akan mempengaruhi cara pandang mereka terhadap suatu kebijakan dan cara melihat



pengaruh kebijakan itu terhadap kepentingan organisasinya dan kepentingan-kepentingan pribadinya.

Hubungannya dengan kebijakan pengelolaan program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir yang dilaksanakan di Kabupaten Bangka Barat, bahwa keberhasilan implementasi kebijakan akan dipengaruhi oleh sikap pelaksana untuk memahami maksud dan tujuan kebijakan sehingga mereka dapat menjalankan tugasnya. Sikap pelaksana terhadap beban tugas yang diterima tidak mengganggu tugas pokok serta adanya keuntungan yang diterima pelaksana dalam menjalankan tugas tersebut.

Menurut pendapat Wikel (dalam Juliartha, 2007:444), yang mengatakan bahwa kekuatan yang mendorong seseorang dalam suatu cara tertentu akan menjadi besar, jika individu tersebut merasa; 1) percaya bahwa pelaksanaan yang diinginkan itu memungkinkan, 2) percaya bahwa perilakunya akan memimpin kearah suatu hasil, dan 3) apabila hasil-hasil tersebut mempunyai nilai positif (mempunyai daya tarik tinggi).

Berdasarkan uraian tersebut, sikap dalam penelitian ini adalah perbuatan pelaksana dan masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan meliputi sikap pelaksana dan sikap kelompok sasaran. Hal yang pertama dilihat adalah sikap pelaksana, dimana sikap pelaksana yang dipengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir, adalah sebagai berikut :

- Pertama adalah tingkat pemahaman pelaksana terhadap maksud dan tujuan kebijakan.



- Kedua, adalah tingkat kesesuaian antara tugas pokok pelaksana dengan tugasnya dalam implementasi kebijakan.
- Ketiga yaitu tingkat kelancaran pemberian insentif kepada pelaksana.

Konteks implementasi kebijakan pengelolaan program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir bahwa tingkat pemahaman pelaksana terhadap maksud dan tujuan kebijakan ikut mempengaruhi implementasi kebijakan, dalam hal ini faktor yang mendukung para pelaksana dinilai sudah mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang cukup akan maksud dan tujuan kebijakan. Para pelaksana telah mampu untuk menterjemahkan maksud dari kebijakan tersebut. Pengetahuan dan pemahaman akan maksud dan tujuan kebijakan pengelolaan program PEMP bukan hanya dimiliki oleh pimpinan unit kerja (Kepala Dinas, Kabid dan Kabag) tetapi juga para pelaksana dilapangan (konsultan manajemen, tenaga pendamping desa dan pengelola koperasi).

Adapun faktor yang menjadi penghambat adalah pengetahuan dan pemahaman tersebut belum diimbangi dengan kesungguhan dan konsistensi dari para pelaksana. Contohnya adalah kurangnya perhatian para aparat dalam melakukan pendampingan untuk membina masyarakat pesisir lebih kreatif dan lebih mandiri. Sikap aparat pelaksana dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir, sudah cukup baik dan dijalankan sesuai dengan beban kerja yang diberikan kepadanya. Tetapi memang apabila dilihat kerjanya para aparat pelaksana masih kurang optimal hal ini disebabkan oleh karena kekurangan personil apabila dibandingkan dengan luasnya wilayah operasional.

Bila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian kebijakan, maka implementasi akan berjalan efektif. Sehingga sangat penting untuk memberikan perhatian yang besar kepada kejelasan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan implementasi, ketepatan komunikasinya dengan para pelaksana, dan konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan-tujuan yang dikomunikasikan dengan berbagai sumber informasi dengan cukup jelas.

Suatu proses yang kompleks dan sulit untuk komunikasi di dalam dan diantara organisasi-organisasi. Oleh karena itu jika ingin menyetuskan pesan-pesan pada suatu organisasi atau antar organisasi lainnya, maka para komunikator dapat menyimpan atau menyebarkan, baik secara sengaja atau tidak sengaja. Jika sumber-sumber informasi yang berbeda memberikan interpretasi-interpretasi yang tidak konsisten terhadap ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan atau jika sumber-sumber yang sama memberikan interpretasi-interpretasi yang bertentangan, pelaksana akan menghadapi kesulitan yang lebih besar untuk melaksanakan maksud-maksud kebijakan. Dalam hal ini menurut Edward (dalam Tangkilisan, 2003:19), komunikasi ini membutuhkan keakuratan dan komunikasi mesti secara akurat pula diterima oleh para implementator.

Pada temuan penelitian yang dilaksanakan di Kabupaten Bangka Barat, faktor pendukung dalam konteks komunikasi pada kebijakan program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir adalah sebelum dilaksanakan program ini. Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bertugas melakukan koordinasi, sosialisasi dan juga mengusulkan kabupaten/kota penerima program Pemberdayaan Ekonomi



Masyarakat Pesisir. Sedangkan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/kota bertugas menetapkan konsultan pelaksana, menetapkan koperasi pelaksana, sosialisasi, fasilitasi pembentukan LKM, rekrutmen Tenaga Pendamping Desa (TPD) dan pelatihan. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat adalah pelaksanaan di lapangan terhadap komunikasi tersebut sering tidak sama dengan apa yang sudah disepakati. Artinya komunikasi tidak lancar terutama kepada pelaksana di lapangan (Konsultan Manajemen dan Tenaga Pendamping Desa).

Permasalahan ini yang menurut Van Meter dan Van Horn (1975) implementasi yang berhasil seringkali membutuhkan mekanisme-mekanisme dan prosedur-prosedur lembaga. Hal ini sebenarnya akan mendorong kemungkinan yang lebih besar bagi pejabat-pejabat tinggi (atasan) untuk mendorong pelaksana (pejabat-pejabat bawahan) bertindak dalam suatu cara yang konsisten dengan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan. Para pejabat dalam organisasi mempunyai pengaruh oleh karena posisi hierarkis mereka. Para pejabat dalam struktur organisasi mempunyai kekuasaan personel yang diukur dari: 1) Rekrutmen dan seleksi, 2) Penugasan dan relokasi, 3) Kenaikkan pangkat, 4) Pemecatan.

Hubungan antar organisasi maupun antar pemerintah adalah dua tipe pelaksanaan merupakan hal yang paling penting. *Pertama*, nasehat dan bantuan teknis yang dapat diberikan. Pejabat-pejabat tinggi sering kali dapat melakukan banyak hal untuk memperlancar implementasi peraturan-peraturan dan garis-garis pedoman pemerintah, menstrukturkan tanggapan-tanggapan terhadap inisiatif-inisiatif dan memperoleh sumber-sumber fisik dan teknis yang diperlukan dan



berguna dalam melaksanakan kebijakan. *Kedua*, atasan dapat menyandarkan pada berbagai sanksi, baik positif maupun negatif.

Efektivitas implementasi memerlukan standar dan tujuan program dapat dipahami oleh individu dan masing-masing individu bertanggungjawab untuk mencapainya. Komunikasi harus didasarkan pada kejelasan standar dan tujuan, akurasi komunikasi para pelaksana, dan konsistensi (kesamaan) yang dikomunikasikan dari bermacam-macam sumber informasi. Standar dan tujuan ditetapkan dengan jelas agar pelaksana dapat mengetahui apa yang diharapkan.

Sistem komunikasi merupakan rangkaian kegiatan yang harus dibangun antara perumus kebijakan, stakeholders, dan pelaksana kebijakan terutama yang menekankan pada pentingnya informasi dalam hubungannya dengan program atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Sosialisasi program yang dilakukan harus berkelanjutan dan menyentuh semua lini, baik stakeholders dan pelaksana maupun perumus kebijakan. Sosialisasi memerlukan instrumen yang memadai dan dapat menciptakan iklim komunikasi yang kondusif dan efektif.

Proses monitoring atau pemantauan, sinkronisasi kebijakan atau program tidak dapat dilepaskan dari sistem komunikasi. Tingkat keefektifan sistem komunikasi mempengaruhi proses implementasi kebijakan. Model komunikasi interpersonal yang bersifat dua arah dan vertikal sehingga mampu menciptakan sistem monitoring atau pengawasan terhadap sinkronisasi kebijakan yang lebih efektif. Keberhasilan pencapaian suatu kebijakan atau kegagalan pencapaian suatu kebijakan terjadi sebagai akibat secara kumulatif rendahnya komunikasi yang efektif diantara pihak perumus dan pelaksana program.

Dari analisis yang diuraikan tersebut bahwa dari temuan di lapangan tentang implementasi kebijakan program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir yang ditentukan bukan hanya bagaimana struktur internal dan eksternal birokrasi pelaksana maupun perumus program, tetapi juga oleh pemahaman masyarakat pesisir terhadap program kebijakan tersebut yang sangat menentukan kualitas capaian program peningkatan kapasitas kemampuan ekonomi masyarakat pesisir di Kabupaten Bangka Barat. Berdasarkan temuan dan pembahasan bahwa pemahaman masyarakat pesisir di Kabupaten Bangka Barat terhadap program cukup baik sehingga sangat berpengaruh sekali bagi keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.

UNIVERSITAS TERBUKA





## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Beberapa kesimpulan dapat ditarik dari hasil penelitian Peningkatan Kapasitas Kemampuan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Kabupaten Bangka Barat, yakni:

1. Berdasarkan beberapa indikator dibawah ini gambaran kemampuan ekonomi masyarakat pesisir di Kabupaten Bangka Barat, adalah sebagai berikut :
  - a). Indikator kualitas pemukiman tergambarkan dari jumlah rumah tidak layak huni di daerah pesisir Kabupaten Bangka Barat, penurunan jumlah unit rumah tidak layak huni artinya adanya peningkatan ekonomi masyarakat pesisir;
  - b). Indikator pemenuhan kebutuhan dasar tergambarkan dari adanya penurunan Pra Keluarga Sejahtera dengan alasan ekonomi, peningkatan Keluarga Sejahtera I (KS I), Keluarga Sejahtera II (KS II), Keluarga Sejahtera III (KS III), dan KS III + itu artinya ada peningkatan taraf hidup masyarakat pesisir di Kabupaten Bangka Barat dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2008;
  - c). Indikator kesehatan tergambarkan dari angka kematian ibu yang melahirkan kecil dan untuk balita gizi buruk terjadi penurunan yang sangat signifikan serta dari jumlah penduduk yang menderita gangguan kesehatan yang dirinci menurut 10 jenis penyakit terbanyak per kecamatan di daerah pesisir Kabupaten Bangka Barat bahwa derajat

kesehatan masyarakat untuk penyakit tertentu cukup baik dan ada beberapa penyakit yang perlu perhatian lebih serius. Secara umum bahwa ada peningkatan derajat kesehatan seiring dengan adanya peningkatan kapasitas kemampuan ekonomi masyarakat pesisir di Kabupaten Bangka Barat dan;

- d). Indikator pendidikan tergambarkan dari adanya peningkatan anak-anak yang bersekolah pada setiap tahunnya dari tahun 2005-2009 di daerah pesisir Kabupaten Bangka Barat. Berdasarkan data jumlah anak usia sekolah dalam menempuh pendidikan dari tahun 2005-2009 di daerah pesisir Kabupaten Bangka Barat, maka dapat dilihat telah terjadi peningkatan taraf ekonomi yang cukup signifikan pada masyarakat pesisir.
2. Pada dasarnya peningkatan kapasitas kemampuan ekonomi masyarakat pesisir di Kabupaten Bangka Barat sudah mengacu ke arah kebijakan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selain itu faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif tergantung pada sumber daya alam perikanan, sumber daya manusia sebagai aparat pelaksana kebijakan, dan sumber dana yang dialokasikan untuk menunjang pelaksanaan program.
  3. Implementasi kebijakan program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir yang ditentukan bukan hanya bagaimana struktur internal dan eksternal birokrasi pelaksana maupun perumus program, tetapi juga oleh pemahaman masyarakat pesisir terhadap program kebijakan tersebut yang sangat menentukan kualitas capaian program peningkatan kapasitas kemampuan ekonomi masyarakat pesisir di Kabupaten Bangka Barat. Berdasarkan temuan

dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat pesisir di Kabupaten Bangka Barat terhadap program cukup baik sehingga sangat berpengaruh sekali bagi keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.

Penelitian ini mendukung model kebijakan Grindle yang melihat bahwa capaian suatu kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir meliputi, kepentingan dari masyarakat pesisir, manfaat dan derajat perubahan yang dicapainya, aparat pelaksana kebijakan dan masyarakat, dan seberapa besar masyarakat pesisir menerima program dan mempengaruhi pelaksanaannya.

#### **B. Saran**

Beberapa saran yang dapat dikemukakan sehubungan dengan hasil penelitian ini adalah:

1. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat pada khususnya untuk serius atau mempunyai komitmen yang tinggi dalam memperbaiki dan meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat pesisir dengan memberikan kemudahan akses modal tanpa anggungan yang memberatkan, memberikan bantuan melalui dana dekonsentrasi dan dana APBD berupa alat tangkap yang modern sehingga kemampuan nelayan dalam peningkatan hasil tangkapan dapat mencukupi kebutuhan hidup yang layak, dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dibidang perikanan tangkap dan budidaya melalui pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan.
2. Untuk mengatasi kurangnya aparat yang bertindak sebagai pendamping, maka perlu adanya penambahan pendamping yang berkualitas dengan memberikan



insentif yang sesuai agar para pendamping ini dapat bekerja secara optimal, atau dengan cara memberdayakan tenaga penyuluh Dinas Kelautan dan Perikanan yang sudah ada dengan cara memberikan insentif tambahan agar tugas pendampingan ini dapat berjalan dengan baik.

3. Pemerintah harus melakukan pengawasan secara menyeluruh mulai dari proses penetapan wilayah yang mendapat bantuan, pelaksanaan sampai pembinaan. Pemerintah juga melakukan perlindungan sumber daya perikanan yang didukung instansi terkait.
4. Untuk membantu masyarakat pesisir yang merupakan nelayan kecil agar dapat bersaing dengan nelayan besar, maka perlu dibentuk kerjasama diantara mereka dalam wadah kelompok-kelompok nelayan. Pemberdayaan akan lebih mudah dilakukan terhadap masyarakat yang telah mempunyai kelompok.

UNIVERSITAS TERBUKA



## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, S.Z. (2005). *Kebijakan publik*. Jakarta : Suara Bebas.
- Abraham, M.T. (1991). *Modernisasi di Dunia Ketiga : Suatu Teori Umum Pembangunan*. Yogyakarta : Tiara Wacana.
- Ardiansyah, D.A. (2007). Implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Kota Pangkalpinang. *Tugas Akhir Program Magister*, Magister Sains Universitas Sriwijaya. Palembang.
- Dunn, W.N. (2003). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : PT. Hanindita Graha Widya.
- Juliartha, M. Edwar. (2007). *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Lelung Lebak Lebung di Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan*, Disertasi tidak dipublikasikan Program Doktor Ilmu Administrasi Unibraw. Malang.
- Kusparwahati, H. (1984). *Penerapan Teknologi dan Kesempatan Kerja di Daerah Pedesaan*. Jakarta : Jurnal BPPT Nomor VII.
- Lande, C.H. (1977). *Introduction : The Dyadic Basic of Clientalism in friends, followers and factione a reader in political cleintalism* Staffen W Schmidt, James J. Scott, Cs (eds). Berkeley : University of California Press.
- Mangunwijaya. (1983). *Teknologi dan Dampak Kebudayaannya*, Volume I. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Moleong, L.L. (1999). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Renanga Rosdakarya.
- Nugroho, R. (2003). *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Samudra W. (1994). *Kebijakan Publik, Proses dan Analisis*. Jakarta : Intermedia.
- Singarimbun, M dan Effendi, S. (1989). *Metode Penelitian Survey*, Edisi Revisi. Jakarta : LP3ES.
- Subarsono, A.G. (2005). *Analisis Kebijakan publik*. Jakarta : Pustaka Pelajar.
- Soejadi. (2001). *Pemberdayaan Masyarakat dan Upaya Pembebasan Kemiskinan*. Yogyakarta : Philosophy Press.
- Tangkilisan, H.N.S. (2003). *Evaluasi kebijakan Publik*. Yogyakarta: Balairung & Co.



- Wahab, S.A. (1997). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Wibawa S, Yuyun P, dan Agus P. (1994). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Manajemen. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Sumber-sumber lainnya:
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (2008). *Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka Tahun 2008*, Pangkalpinang.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Barat. (2008). *Bangka Barat Dalam Angka Tahun 2008*, Muntok.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Barat. (2005). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2005-2010*, Muntok.
- Budiharso, E (CMAC). (2010). *Melongok Tingkat Kemiskinan di PNPM PISEW*. Diambil 28 Maret 2010, dari situs World Wide Web <http://www.pnpm-pisew.org>.
- Dahuri, R. (2003). *Reorientasi pembangunan Berbasis Kelautan*. Diambil 10 April 2010, dari situs World Wide Web <http://www.tokohindonesia.com>.
- Direktorat Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. (2006). *Pedoman Umum PEMP*, Departemen Kelautan dan Perikanan, Jakarta.
- Fawzia, F. (2008). *Konsep dan Strategi Adaptasi Perubahan Iklim di Indonesia : Studi Kebijakan di Nusa Tenggara Barat*. Diambil 12 Maret 2010, dari situs World Wide Web <http://artikelhukum.blogspot.com>.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2005). *Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2004-2009*, Jakarta.
- Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (2007). *Lampiran Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2007-2012*, Pangkalpinang.
- Suyono, H. (2008). *Indikator MDGs dan Pengentasan Kemiskinan*. Diambil 9 April 2010, dari situs World Wide Web <http://www.targetmdgs.org>.
- Nurmalasari, Y. (2010). *Analisis Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat*. Diambil 5 Maret 2010, dari situs World Wide Web <http://www.hayati-ipb.com>.

Universitas Bangka Belitung. (2010). *Terumbu Karang di Pantai Tanjung Ular Mentok Kabupaten Bangka Barat*. Diambil 12 April 2010, dari situs World Wide Web <http://www.ubb.ac.id>.

Undang-Undang N0. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

UNIVERSITAS TERBUKA





# LAMPIRAN

UNIVERSITAS TERBUKA



Keluarga nelayan Ismail Bin Ijak nelayan Desa Air Nyato Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat yang berhasil dalam memanfaatkan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir



Perahu-perahu bantuan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Barat untuk nelayan Mentok Asin Kecamatan Muntok



Haris nelayan Mentok Asin Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat  
bersama perahu bantuan Dinas Kelautan dan Perikanan  
Pemkab. Bangka Barat



Wiratmo selaku Kasi. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil  
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Barat





Perahu-perahu nelayan di Kecamatan Muntok sedang bersandar di pelabuhan Muntok



SPBN di Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat



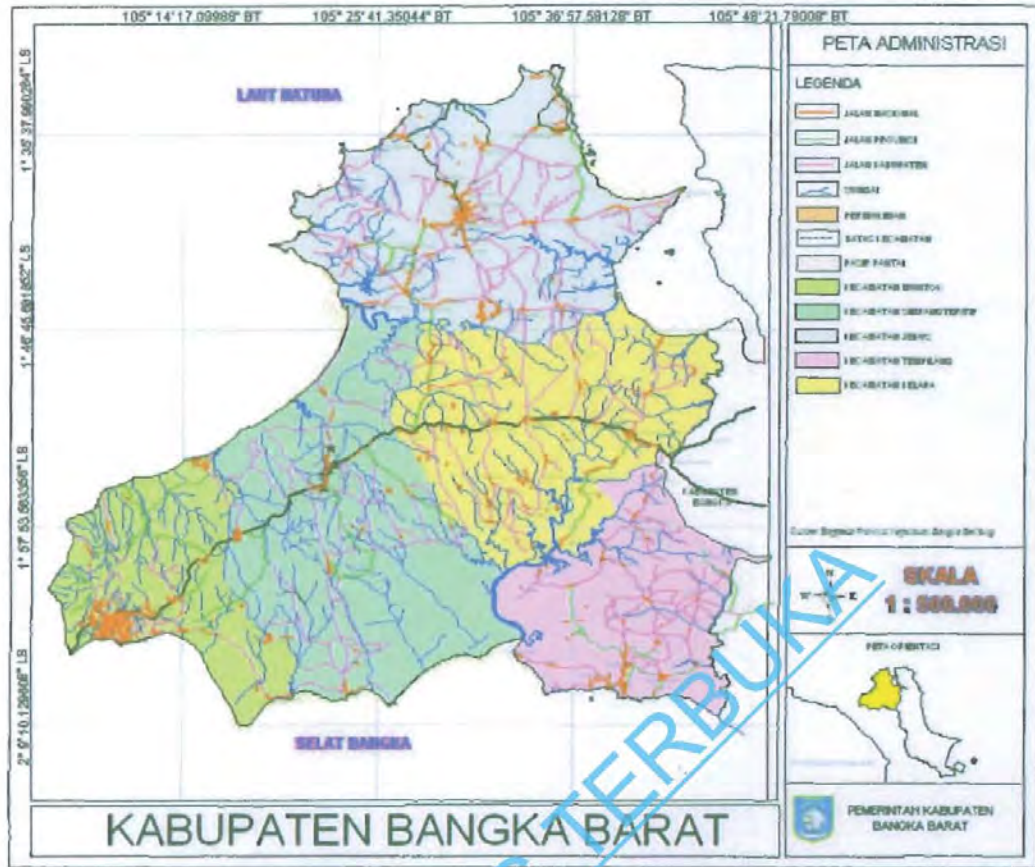
Kantor Koperasi LEPP-M3 Bangka Barat





Kedai Pesisir Sejiran Setason Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat





### DAFTAR INFORMAN

No.	Nama	Keterangan
1	Drs. H.Parhan Ali, MM	Bupati Bangka Barat
2	Romulus Hasibuan	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Barat
3	M. Saiful Pudri	Sekretaris Bappeda Kabupaten Bangka Barat
4	Wiratmo	Kasi. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil DKP Kabupaten Bangka Barat
5	Burhanuddin	Kasi. Pemoerdayaan Masyarakat Pesisir DKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
6	Andy Zakaria	Tenaga Pendamping Desa DKP Kabupaten Bangka Barat
7	Mukhlis	Internal Control Koperasi Swamitra Mina Kabupaten Bangka Barat
8	Suratno	Kepala Desa Air Nyato Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat
9	Haris	Nelayan Mentok Asin Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat
10	Ismail Bn Irak	Nelayan Desa Air Nyato Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat
11	Samsudin	Nelayan Mentok Asin Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat
12	Miin	Nelayan Desa Air Nyato Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat
13	Jumiah	Nelayan Desa Air Nyato Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat



## Lampiran B. Transkrip Hasil Wawancara

## TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Informan : I  
 Tempat/Tanggal/Waktu : Muntok/ 19 April 2010/14:30 WIB  
 Pewawancara : Peneliti  
 Hasil :

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Saya ingin menanyakan program-program mengenai pemberdayaan masyarakat pesisir selama masa jabatan Bapak yang sekarang ini ?	Dalam pemberdayaan masyarakat pesisir pertama kita memberikan bantuan-bantuan berupa alat-alat penangkap ikan antara lain boat, mesin, jaring, bubu dan lain sebagainya itu dan juga kita mengadakan koperasi swamitra mina itu juga kita kerjasama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan untuk membina koperasi tersebut untuk mengembangkan para nelayan
2	Mungkin bapak bisa menjelaskan secara ringkas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Bangka Barat khusus untuk pemberdayaan masyarakat pesisir Pak?	Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah kita membangun tambatan-tambatan perahu di pesisir. bantuan alat-alat tangkap, dan juga memberikan bantuan-bantuan dengan bekerjasama dengan Kementerian Kelautan Perikanan rencananya kedepan akan memberikan bantuan kapal penangkap ikan. Diharapkan dengan kapal penangkap ikan yang lebih besar para nelayan akan mendapatkan hasil tangkapan yang lebih baik
3	Memang saya dapat informasi dari dinas provinsi Pak, Kabupaten Bangka Barat ini termasuk yang berhasil Pak dan menjadi contoh buat pemberdayaan masyarakat pesisir di Indonesia terutama keberhasilan dari Koperasi Swamitra Mina ini Pak mengenai program PEMP... saya merasa bangga terhadap Bapak terus terang saja	Saya menilainya program ini artinya masih belum full keberhasilannya, makanya seandainya nanti saya terpilih lagi dengan pemberdayaan masyarakat pesisir ini lebih akan kita tingkatkan lagi yakni dana yang kita anggarkan itu mungkin lebih besar dari sekarang ini nah kita kan sekarang ini tiga dinas yaitu PU, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan perlu kita pikirkan lagi untuk menganggarkan untuk bidang-bidang terutama untuk pemberdayaan masyarakat



**Lampiran B. Transkrip Hasil Wawancara**

No	Pertanyaan	Jawaban
	ternyata Bapak sudah berhasil membangun masyarakat pesisir walaupun sebetulnya masih banyak para nelayan yang belum menikmati bantuan tersebut yang mungkin karena anggarannya terbatas gitu ya ...satu lagi menurut Bapak ini secara sebagai Bupati apakah program ini sudah berhasil apa belum Pak?	pesisir ini tapi itu kan tidak bisa kita sendirikan tapi harus ada persetujuan dari dewan karena kita tak mungkin bisa menggunakan dana ini kalau dewan tidak setuju

UNIVERSITAS TERBUKA

## Lampiran B. Transkrip Hasil Wawancara

## TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Informan : 2  
 Tempat/Tanggal/Waktu : Muntok/ 19 April 2010/11:45 WIB  
 Pewawancara : Peneliti  
 Hasil :

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Mungkin dari dinas ini ada beberapa kegiatan berkenaan dengan peningkatan kapasitas kemampuan ekonomi masyarakat pesisir di Kabupaten Bangka Barat melalui APBD maupun APBN Pak?	<p>Memang pemberdayaan masyarakat pesisir ini kita berbicara dulu tentang kemiskinan bahwa penduduk miskin di Indonesia ini 34 juta jumlahnya dari jumlah itu kurang lebih 30% – 40% hidup di daerah pesisir. Memang program-program dari kementerian dan dari APBD atau pemerintah daerah banyak merupakan program percepatan pengentasan kemiskinan berupa bantuan-bantuan kepada para nelayan, kita bantu para nelayan yang belum ada perahunya, belum ada mesinya, belum ada alat tangkapnya. Program dari pusat ada juga program pemberdayaan masyarakat melalui perbaikan rumah-rumah mereka atau juga yang dikasih dengan bentuk alat tangkap dan terakhir khususnya di Bangka Barat ini yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), ketarin jadi kita di Desa Selindung kita sudah laksanakan nanti PNPM ini kita hanya membentuk kelompok setelah terbentuk kelompok kita kasih uang mereka yang menentukan apa yang dibangun mereka, apakah mereka membeli perahu atau membeli alat tangkap yang lain atau pengolahan ikan kita serahkan dengan mereka tetapi semua itu tujuannya dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan terutama di daerah-daerah pesisir jadi sebenarnya banyak program-program dari kita maupun yang melalui pusat atau kementerian dalam rangka</p>

## Lampiran B. Transkrip Hasil Wawancara

No	Pertanyaan	Jawaban
		<p>percepatan penanggulangan kemiskinan. Kita sudah bisa lihat sebenarnya masyarakat pesisir ini kan boleh dikatakan miskin terus padahal sebenarnya mereka tidak mempunyai perahu tidak mempunyai alat tangkap jadi kalau kemarin itu mereka hanya ikut dengan majikannya saja kan gitu nanti dikasih mereka duit sedikit tapi mereka tidak mempunyai daya beli yang kuat sekarang kemarin kita sudah pernah mewancarai mereka yang sudah dapat alat-alat tangkap ini seperti perahu mereka mengaku dengan saya sendiri itu mereka mengatakan bahwa sekarang ini Pak terimakasih dengan pemerintah daerah sebelum-sebelumnya saya tidak pernah mendapat ikan sampai dengan 30 kilo sehari kalau sekarang ini kemarin aja saya dapat 80 kilo seharinya setelah saya jual ke pasar satu juta lebih saya dapat jual sehari, nah berarti di situ sudah mulai terasa dengan mereka yang sudah dapat bantuan. Cuma kita harapkan kedepan juga yang mudah-mudahan akan ada lagi bantuan, karena masih banyak juga yang belum mendapat bantuan karena seperti tahun ini hanya 72 perahu dan alat tangkap yang kita kasih yang mengajukan proposal ini hanya paling sedikit 800 lebih yang telah mengajukan proposal tapi tidak semua bisa kita penuhi</p>
2.	<p>Pada tahun 2010 ini apa-apa saja kegiatannya?</p>	<p>Kalau tahun 2010 ini pemberdayaan kita dari APBD tidak ada seperti sebelumnya artinya pemberdayaan berupa bantuan-bantuan tidak ada karena kemarin itu kita APBD sangat dibatasi sangat terbatas kemarin kita hanya dibidang ini lah dana untuk kamu 5 M ini termasuk dari dana DAK jadi terpaksa kita mana yang prioritas utama dulu yang kita kerjakan jadi saya ajukan ke Jati lanjutan yang di TPI sama dengan yang di BBI jadi</p>



## Lampiran B. Transkrip Hasil Wawancara

No	Pertanyaan	Jawaban
		hanya itulah proyek kita, tapi ada proyek dari pusat PNPM kita ajukan lanjutan
3	PNPM ini mulainya tahun berapa Pak?	Kalau baru dapat dua tahun berturut-turut
4	Setiap tahunnya berapa dana yang terserap?	Kalau kemarin kita mendapat 1,1 M
5	Itu terbagi ke berapa kelompok nelayan Pak?	Oh itu si Rudy yang tahu kelompoknya ada berapa karena kemarin itu ada juga perahu yang dibeli mereka kelompok nelayan tembelok kalau nggak salah ya dan yang lain-lain bermacam-macam kemarin itu kegiatannya gitu, tapi untuk tahun ini di kabupaten kita hanya dua yang dapat PNPM eh...di provinsi kita...kita satu sama Kabupaten Bangka Selatan kalau nggak salah saya. Itu juga dananya sangat sedikit 780 juta untuk kita sendiri masing-masing, mudah-mudahan ini kita gunakan sesuai dengan sudah diinstruksi menteri kemarin kita ini tampaknya akan ditingkatkan masalah produksi gitu kalau di kita ini bisa nanti ke balai benih atau kemana.

## Lampiran B. Transkrip Hasil Wawancara

## TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Informan : 3  
 Tempat/Tanggal/Waktu : Muntok/ 27 April 2010/14:45 WIB  
 Pewawancara : Peneliti  
 Hasil :

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah RPJMD Kabupaten Bangka Barat menurut Bapak sudah dilaksanakan dengan baik apa belum?	RPJMD kita kan pada tahun 2010 ini mudah-mudahan sudah 100 % tapi tidak 100 % semuanya ada 99 koma sekian gitu ada beberapa kegiatan tidak dilaksanakan, tidak dilaksanakan ini karena tidak sesuai dengan kondisi daerah itu kan namanya memaksakan kalau tidak sesuai makanya kita yang sesuai dan juga apa itu yang dari rencana SKPD semua itu karena SKPD yang melaksanakannya, karena RPJMD itu kan visi dan misi dari Bupati itu yang harus dilaksanakan oleh Bupati tetapi secara teknisnya SKPD yang melaksanakan. Dimana setiap tahun kita ada musrenbang dan persiapan RKPD, RKPD kita mengacu pada RKPD pusat itu begitu
2	Di RPJMD kan ada program pemberdayaan masyarakat khusus untuk penelitian saya ini mengenai pemberdayaan masyarakat pesisir, sepengetahuan Bapak bagaimana program tersebut bisa diimplementasikan tidak?	Program yang itu ke daerah pesisir itu kan dilaksanakan oleh DKP itu kalau tidak salah tahun pertama sampai tahun ketiga dari itu tidak dilaksanakan lagi karena sudah selesai program kegiatan, itu kan dulu pesisir itu UP, bantuan alat tangkap terus perbaikan pada sarana dan prasarannya itu yang dilaksanakan pada tahun kesatu, dua dan tiga setidaknya tiga tahun berturut-turut itu dilaksanakan nah sekarang karena dianggap sudah mapan karena mereka juga harus memberikan kontribusi juga ke kita nah itu karena dianggap sudah mapan tidak kita laksanakan lagi



## Lampiran B. Transkrip Hasil Wawancara

No	Pertanyaan	Jawaban
3	Selama penelitian ini masih banyak masyarakat nelayan yang belum menerima bantuannya dari pemda Bangka Barat ini bagaimana menurut Bapak?	Kalau menerima bantuan ini sifatnya mana yang harus bisa menerima mana yang tidak bisa menerimakita kan harus sesuai dengan tupoksi mereka di satker kalau untuk pesisir beda dengan nelayan karena kalau untuk masyarakat pesisir memang benar-bener masyarakat sekitar pesisir tapi untuk nelayan bisa saja seperti contohnya orang Tebing Kelapa itu sebagian mereka adalah nelayan dia beroperasinya di Teluk Kelabat bersandar perahunya di Pusuk nah itu beda antara masyarakat pesisir dengan nelayan tidak mesti nelayan itu adalah masyarakat pesisir. Seperti di Tebing terus di Rukam terus ada lagi di Sungai Buluh itu masyarakat nelayan semua padahal dia jauh dari pantai ke laut terus juga dari Air Jangkang, dari Semulut kita ada nelayan tapi bukan atau tidak identik mereka masyarakat pesisir. Masyarakat pesisir seperti kita ketahui seperti Dusun Pala, Jebu Laut, Nelayan Penganak, Teluk Limau, itu yang masyarakat pesisir di Kecamatan Jebus
4	Kedepannya bagaimana untuk pemberdayaan masyarakat pesisir untuk RPJMD yang akan datang?	Itu akan kita programkan lagi kita sesuaikan dengan visi dan misi Bupati terpilih sebab itu kepada pemberdayaan masyarakat pesisir atau masyarakat mana karena itu bagaimana mereka untuk mandiri kedepannya harapan kita memang begitu jadi kedepan akan kita programkan lagi
5	Evaluasi dari tahun 2005-2010 ini seperti apa sih perkembangan pembangunan di Bangka Barat ini apabila disesuaikan dengan RPJMD?	Dilihat dari pembangunan lima tahun terakhir pertama seperti infrastruktur jalan kabupaten, jalan pedesaan, infrastruktur air bersih terus lingkungan kita sudah mulai, kedua pendidikan, ketiga kesehatan, pertanian terus sampai terakhir kita tahun 2010 ini pariwisata itu semuanya sudah perindagkop kita arahkan ke masyarakat bagaimana supaya mereka mendapatkan bimbingan teknis didalam



## Lampiran B. Transkrip Hasil Wawancara

No	Pertanyaan	Jawaban
		pelaksanaan kegiatan-kegiatan mereka menunjang perekonomian pedesaan
6	Khusus untuk masyarakat pesisir ini bagaimana Pak?	Masyarakat pesisir ini itu juga mereka mendapatkan bantuan sarana prasarana perikanan, terus bantuan modal, terus bimbingan teknis ini juga kan hanya dilaksanakan pada tahun 1, 2, dan 3...empat dan lima itu mereka kalau tidak salah tidak dilanjutkan lagi karena mereka dianggap sudah mapan dan sudah selesai di program itu untuk masyarakat pesisir jadi kita tidak karena kan hanya beberapa daerah itu kan yang masyarakat pesisir pada semua kecamatan itu sudah mendapatkan bantuan tapi kalau umpama ada masyarakat yang belum mendapatkan bantuan pada tahun keempat dan kelima itu akan diinputkan ke RPJM tahap kedua oleh Bupati yang baru nantinya kita akan diprogramkan lagi karena kita kan sudah mengevaluasi antara keberhasilannya dan permasalahannya
7	Mengenai peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir setelah mendapatkan bantuan itu apakah ada peningkatan dari segi ekonomi, kesehatan, dan pendidikan?	Kalau dari segi indeks secara kumulatif mereka sudah maju dilihat dari ini ya Penganak terus di Sungai Buluh terus yang di Jebu Laut terus yang ada di Pala itu mereka sudah alhamdulillah mereka dengan adanya bantuan dari pemerintah bisa meningkatkan taraf hidup mereka walaupun kendalanya masih banyak kalau para nelayan ini kan musiman dikala musim angin besar mereka kan tidak melaut ini menjadi perhatian kita selaku pemerintah di kabupaten Bangka Barat ini
8	Nelayan ini kan musiman kalau cuaca baik mereka melaut kalau cuaca buruk mereka tidak melaut, jadi apa program dari Bappeda dalam hal pemberdayaan masyarakat pesisir yang bisa dilaksanakan?	Kalau kita Bappeda kan hanya membackup karena teknisnya ada di Dinas Kelautan dan Perikanan apa yang mereka programkan kita akan membackup dari segi dana karena sesuai dengan undang-undang no 25 tahun 2004 tentang SPPM, Bappeda kan pertamakan perencanaan, kedua pengendalian, ketiga monitoring

## Lampiran B. Transkrip Hasil Wawancara

No	Pertanyaan	Jawaban
		<p>dan evaluasi kita bagaimana dalam evaluasi ini kita dari segi perencanaan membackup itu memang benar-bener prioritas kalau tidak prioritas ya tidak. Kita prioritas disini ada beberapa yang harus kita laksanakan dan harus kita backup oleh Bappeda dari pertama infrastruktur dengan pemeliharaan nanti kedepan kita akan berbalik dari pendidikan, kesehatan dan masalah pertanian secara luas pertanian ini kan pertanian, perikanan, kehutanan, perkebunan dan pariwisata nah ini kalau untuk masyarakat pesisir itu DKP akan melanjutkan kita hanya membackup dari segi pendanaan tahun 2009 mereka akan kita tampung tapi prioritas</p>

UNIVERSITAS TERBUKA

## Lampiran B. Transkrip Hasil Wawancara

## TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Informan : 4

Tempat/Tanggal/Waktu : Muntok/ 19 April 2010/08:35 WIB

Pewawancara : Peneliti

Hasil :

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Sejak kapan Program PEMP dilaksanakan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung khususnya di Kabupaten Bangka Barat?	Program PEMP dilaksanakan di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung khususnya di Kabupaten Bangka Barat sejak tahun 2004
2	Apakah tujuan dari Program PEMP?	Tujuan dari program PEMP adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pengembangan kegiatan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan kelembagaan sosial ekonomi dengan mendayagunakan sumber daya kelautan dan perikanan secara optimal dan berkelanjutan
3	Apa peran instansi saudara dalam Program PEMP?	Peran instansi Dinas Kelautan dan Perikanan dalam program PEMP adalah melaksanakan suatu program secara terencana dan terstruktur yang langsung menyentuh masyarakat di kawasan pesisir
4	Daerah mana saja yang menjadi target Program PEMP?	Daerah yang menjadi target Program PEMP pada umumnya seluruh masyarakat Kabupaten Bangka Barat, khususnya masyarakat pesisir yang bergerak dibidang Kelautan dan Perikanan
5	Kriteria apa yang dipergunakan untuk menilai daerah yang menjadi sasaran Program PEMP?	Kriteria daerah yang menjadi sasaran Program PEMP yaitu masyarakat miskin pesisir yang mata pencahariannya bersumber dari hasil laut dan lingkungan pesisir
6	Apakah ada koordinasi dengan instansi terkait di daerah tersebut?	Koordinasi dengan instansi terkait yaitu dengan semua dinas teknis dan Bappeda
7	Bagaimana sosialisasinya?	Sosialisasinya dengan melakukan pertemuan dan musyawarah pada semua pihak terkait yang meliputi dinas teknis.



## Lampiran B. Transkrip Hasil Wawancara

No	Pertanyaan	Jawaban
		masyarakat sasaran program dan tokoh masyarakat lainnya guna mendapatkan respon dan masukan untuk menyempurnakan Program PEMP ini
8	Apakah para nelayan juga dilibatkan?	Masyarakat nelayan pasti kita libatkan
9	Dalam Program PEMP kegiatan apa saja yang diberikan kepada nelayan?	Dalam Program PEMP kegiatan yang diberikan kepada masyarakat adalah dengan bantuan peminjaman modal usaha
10	Bagaimana Implementasinya Pak?	Implementasi PEMP adalah dengan tahap pengelolaan bantuan pembangunan dalam upaya pengentasan kemiskinan versi PEMP, pengelolaan dilakukan dari, oleh dan untuk komunitas sendiri dengan dampingan Tenaga Pendamping Desa dan tokoh masyarakat sebagai mitra kerja di tingkat desa. Prinsip yang diterapkan adalah keterbukaan, demokratis, akuntabilitas, desentralisasi dan partisipatif
11	Apakah bantuan langsung ke sasaran? Perorangan atau kelompok?	Bantuannya yaitu melalui Kelompok Masyarakat Pemanfaat
12	Berapa lama Program PEMP ini dilaksanakan?	Program PEMP yang dilaksanakan pada DKP Babar ini mulai Th.2004, 2005 dan Th. 2008
13	Bagaimana pembinaannya? Apakah ada pendamping yang langsung terlibat di masyarakat pesisir?	Selama Program PEMP berjalan, DKP merekrut untuk Tenaga Pendamping Desa sebanyak 2 orang
14	Bagaimana penerimaan masyarakat pesisir terhadap Program PEMP?	Penerimaan masyarakat pesisir terhadap Program PEMP ini bisa diterima dengan baik sekali, karena program ini muncul sebagai akibat dari pengurangan bantuan/subsidi pemerintah terhadap BBM sehingga mempengaruhi kenaikan komponen-komponen harga lainnya, sehingga program ini sangat membantu bagi masyarakat miskin di wilayah pesisir
15	Seandainya masyarakat tidak berminat, bagaimana meyakinkan mereka bahwa	Sebetulnya ini merupakan tugas dari Tenaga Pendamping Desa, akan tetapi pada dasarnya masyarakat miskin itu kan

## Lampiran B. Transkrip Hasil Wawancara

No	Pertanyaan	Jawaban
	program ini dapat meningkatkan pendapatan mereka?	kendalanya pada akses permodalan dan melalui program inilah yang mungkin bisa membantu dalam memperoleh akses permodalan dengan mudah dan cepat serta dengan bunga yang sangat rendah
16	Bagaimana proses pengawasannya?	<p>Proses Pengawasannya :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengawasan dan pengarahan Kelompok Masyarakat Pemanfaat (KMP) dalam rangka meningkatkan kontrol sosial terhadap manajemen kegiatan KMP desa/kelurahan, maka dilakukan pengawasan dan pengarahan terhadap mekanisme kerja dan manajemen teknis serta kinerja pengurus KMP. Aspek yang akan diawasi adalah manajemen pengelola dan pemanfaatan dana bantuan ekonomi produktif dan perkembangannya</li> <li>• Pengawasan dan Pembinaan LEPP-M3, hal yang sama juga akan dilakukan pada lembaga LEPP-M3. Bedanya pada kegiatan ini dilakukan oleh sebuah tim yang terdiri dari KM Kabupaten dan Pimbagpro. Sedangkan kegiatan pengawasan dan pembinaan KMP desa dilakukan oleh KM Kabupaten dengan dibantu oleh LEPP-M3. Aspek pembinaan dan pengawasan yang lebih ditekankan dalam kegiatan ini adalah manajemen pengelolaan dan pemanfaatan dana serta kinerja para pengurus</li> <li>• Monitoring dan evaluasi, kegiatan ini akan dilakukan oleh sebuah tim yang terdiri dari KM Kabupaten dikoordinasikan dengan Tim Kabupaten atau Pimbagpro atau instansi terkait. Hasil kegiatan ini selanjutnya akan dipaparkan dalam forum lokakarya kabupaten</li> </ul>
17	Seberapa jauh keberhasilan Program PEMP?	Program PEMP ini sudah dilaksanakan atau telah berjalan selama 6 tahun dan

## Lampiran B. Transkrip Hasil Wawancara

No	Pertanyaan	Jawaban
18	Apa yang menjadi tolak ukur keberhasilan?	sampai saat ini tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir sudah mengalami perkembangan Tolak ukur keberhasilan Program PEMP ini adalah semakin meningkatnya jumlah pemanfaatan dana permodalan untuk meningkatkan skala usahanya khususnya dibidang kelautan dan perikanan
19	Berapa banyak jumlah nelayan yang menerima dana dari Program PEMP? Berapa persen perbandingan dengan jumlah seluruh nelayan di Kabupaten Bangka Barat?	Jumlah nelayan yang menerima dana Program PEMP sampai saat ini sudah mencapai 1656 orang dan apabila diprosentasikan dengan jumlah seluruh nelayan di Kabupaten Bangka Barat ini sejumlah 43,62 %

UNIVERSITAS TERBUKA



## Lampiran B. Transkrip Hasil Wawancara

## TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Informan : 5  
 Tempat/Tanggal/Waktu : Pangkalpinang/22 Juni 2010/08:25 WIB  
 Pewawancara : Peneliti  
 Hasil :

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Sejak kapan Program PEMP dilaksanakan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung?	Tahun 2001 di Kabupaten Bangka, karena waktu itu Mentok (sebelum pemekaran) adalah kecamatan di Kabupaten Bangka yang pertama melaksanakan PEMP adalah Kabupaten Bangka
2	Apakah tujuan dari Program PEMP?	Tujuannya adalah meningkatkan pendapatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
3	Apa peran instansi saudara dalam Program PEMP?	Kalau Dinas kita ini adalah dinas provinsi sebenarnya yang melakukan pelaksanaan kegiatan itu adalah ditingkat kabupaten, jadi ditingkat kabupaten itu mengusulkan melalui provinsi dan provinsi menginformasikan ke pusat dan juga kabupaten juga bisa langsung ke pusat
4	Daerah mana saja yang menjadi target Program PEMP?	Kalau targetnya seluruh daerah Kabupaten/Kota
5	Kriteria apa yang dipergunakan untuk menilai daerah yang menjadi sasaran Program PEMP?	Kalau untuk melihat ke wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu semuanya termasuk ke Kabupaten/Kota karena daerah kita ini terdiri dari daerah kepulauan yang berpesisir dan banyak nelayan dan pengusaha besar ikan
6	Apakah ada koordinasi dengan instansi terkait di daerah tersebut?	Sudah jelas ada
7	Bagaimana sosialisasinya?	Sosialisasinya dilakukan oleh provinsi biasanya untuk petugas-petugas di kabupaten dan dari kabupaten langsung ke masyarakat
8	Apakah para nelayan juga dilibatkan?	Kita ini dinas kelautan dan perikanan prioritas itu terutama masyarakat nelayan dan pengusaha-pengusaha ikan itu yang terutama dilibatkan dan juga ada yang non

## Lampiran B. Transkrip Hasil Wawancara

No	Pertanyaan	Jawaban
		dari pada nelayan dan pengusaha-pengusaha ikan tetapi mereka bermukim di wilayah pesisir
9	Dalam Program PEMP kegiatan apa saja yang diberikan kepada nelayan?	Itu banyak ada yang kredit permodalan usaha ini masalah kegiatan ya ada juga yang SPDN itu kan untuk nelayan juga yaitu salah satu program PEMP, ada juga sekarang ini BLM, BLM itu untuk nelayan juga
10	Bagaimana Implementasinya Pak?	Untuk sampai saat sekarang kondisinya berjalan dengan baik terutama di Bangka Barat cukup sempurna untuk pelaksanaannya
11	Apakah bantuan langsung ke sasaran? Perorangan atau kelompok?	Ya semuanya yang diajukan ada yang dibantu perkelompok ada juga yang perorangan lihat kondisi usahanya
12	Berapa lama Program PEMP ini dilaksanakan?	Program PEMP ini ada beberapa tahap cuma kita nggak tahu karena bantuan itu langsung dari pusat diberikan ke kabupaten itu tidak selalu setiap tahun ada program-program tertentu dan wilayahnya yang dibantu adalah wilayah tertentu
13	Bagaimana pembinaannya? Apakah ada pendamping yang langsung terlibat di masyarakat pesisir?	Itukan pembinaan itu ada terutama dari LEPP-M3 langsung ke masyarakat dan langsung juga disamping sosialisasi juga ada pembinaannya itu dari dinas-dinas kabupaten ada juga sosialisasi dari dinas terkait sering juga melakukan pembinaan
14	Bagaimana penerimaan masyarakat pesisir terhadap Program PEMP?	Sampai saat sekarang kondisinya ya masyarakat sangat menerima dan sangat membutuhkan program tersebut karena untuk mengembangkan tingkat usaha mereka
15	Seandainya masyarakat tidak berminat, bagaimana meyakinkan mereka bahwa program ini dapat meningkatkan pendapatan mereka?	Disini peran daripada Dinas Kelautan dan Perikanan untuk memberikan sosialisasi dan pembinaan bahwa program tersebut adalah baik untuk masyarakat terutama untuk meningkatkan ekonomi masyarakat terutama masyarakat pesisir
16	Bagaimana proses pengawasannya?	Kalau pengawasannya peran serta terutama dari masyarakat itu sendiri dan dari Dinas Kelautan dan perikanan juga ada



## Lampiran B. Transkrip Hasil Wawancara

No	Pertanyaan	Jawaban
17	Seberapa jauh keberhasilan Program PEMP?	pengawasan dari pusat untuk memantaunya Dapat dilihat unit Swamitra Mina dimana beberapa perkembangan jumlah dari pada anggota itu meningkat, total kreditnya dapat disalurkan ke masyarakat yang membutuhkan terutama masyarakat nelayan dan masyarakat di wilayah pesisir dan dapat kita lihat dari laporan-laporan dari Swamitra Mina ditingkat kabupaten
18	Apa yang menjadi tolak ukur keberhasilan?	Tolak ukurnya terutama kita lihat dari perkembangan tingkat minatnya masyarakat yang kedua untuk income pendapatan perkapita mereka bisa meningkat

UNIVERSITAS TERBUKA



## Lampiran B. Transkrip Hasil Wawancara

## TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Informan : 6  
 Tempat/Tanggal/Waktu : Muntok/ 17 April 2010/19:45 WIB  
 Pewawancara : Peneliti  
 Hasil :

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Pak Andy sebagai pegawai di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Barat Bapak selaku Tenaga Pendamping Desa?	Ya Pak pada tahun 2006
2	Sebagai Tenaga Pendamping Desa untuk program apa Pak?	Sebagai Tenaga Pendampingan pemberdayaan masyarakat pesisir
3	Bagaimana Bapak melakukan pendampingan itu?	Kami kemaren itu hanya meneruskan program tahun 2004 dan 2005, tahun 2006 sudah diputus jadi pendampingan pakai program APBD sistem kerja hanya melanjut program tahun 2005 pendanaan APBD pendampingan bersama dengan koperasi LEPP M3
4	Mengenai Juklak dan Juknis bagaimana Pak?	Juknisnya melihat pada tahun 2005 kemaren Pak.
5	Langkah-langkah apa yang Bapak lakukan sebagai Tenaga Pendamping Desa?	Kalau mulai programnya tahun 2004, terus tahun 2005 penyaluran dana jadi pas tahun 2006 itu kita survey nelayan untuk melakukan peminjaman pada koperasi LEPP M3 jadi mendampingi pihak koperasi yang mana-mana nelayan yang layak dibantu Pak
6	Apakah melalui sosialisasi atau penyuluhan Pak?	Kalau sudah sampai lapangan pasti kita melakukan sosialisasi dan penyuluhan serta bimbingan terus pihak koperasi itu mereka melakukan pengecekan tentang bagaimana kelayakan nelayan itu apakah menerima bantuan tersebut apa tidak jadi disurvey dulu dari koperasi LEPP M3 Pak
7	Apakah ada kendala-kendala dalam sosialisasi itu Pak?	Kendala-kendalanya itu Pak sedikit banyak ada ya...kendala pertamanya itu kalau kita ke daerah Kecamatan Jebus mestinya nelayan disanakan kalau mau

## Lampiran B. Transkrip Hasil Wawancara

No	Pertanyaan	Jawaban
		bayar ke Muntok itu kan membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit juga kan jadi kami menyarankan kepada Koperasi LEPP M3 itu kalau melakukan penagihan misal setiap satu bulan sekali jangan sampai dari Jebus atau Tempilang melakukan pembayarannya ke Muntok jadi kiranya tidak membeban kan nelayan tersebut Pak
8	Saya mau menanyakan tingkat pemahaman masyarakat nelayan terhadap program ini?	Pada dasarnya masyarakat itu kebanyakan paham Pak, tapi pengertian itu dari temen masing-masing misalnya yang A sudah tahu program dari awal undangan itu kan dari kabupaten itu tidak semuanya datang ke kabupaten atau sebagian dari perwakilan masing-masing kecamatan, misalnya kecamatan A ini kurang lebih 5 orang untuk melakukan sosialisasi program PEMP tersebut mereka kalau ketemu sama-sama nelayan mereka bisa bersosialisasi tentang program PEMP bahwa program PEMP di Bangka Barat ini ada
9	Kalau menurut Bapak tingkat pemahamannya masyarakat sudah baguskah?	Dikatakan bagus kurang bagus juga ya paling 70 % paham
10	Menurut Bapak tingkat keberhasilan dari pada program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir ini tingkat keberhasilannya bisa dilihat dari indikator apa saja Pak?	Keberhasilannya banyak Pak kita lihatnya mereka mengajukan dana untuk mereka beli mesin, perahu misalnya dulu kan bukan pakai mesin masih pakai dayung berarti mereka semenjak ada pinjaman ini kan bisa membeli mesin jadi tingkat untuk melakukan untuk biaya operasional itu kan lebih sedikit waktunya pun lebih singkat terus jarak penangkapan itu kan lebih jauh untuk mengadon misalnya kan begitu
11	Kalau dilihat dari tingkat ekonomi masyarakat dari mulai awal sampai sekarang setelah mereka melakukan pinjaman kredit PEMP ini lewat Koperasi Swamitra Mina ini.	Begini Pak PEMP ini kan pemberdayaan masyarakat pesisir sama dengan LEPP M3 berkerjasama dengan Bank Bukopin. ini kan kita lihat manusia-manusianya dulu Pak masalahnya, kalau nelayan ini kan ada yang bagus juga bagaimana cara

## Lampiran B. Transkrip Hasil Wawancara

No	Pertanyaan	Jawaban
	apakah kelihatan kemakmuran masyarakat nelayan di pesisir ini?	pengelolaan dana yang dipinjam dari koperasi tersebut mereka bisa mengelola atau menjalankan bagus
12	Menurut pengamatan Bapak yang berhasil itu berapa persen dari sekian banyak nelayan yang mengambil kredit PEMP ini?	Menurut saya berhasilnya kira-kira 90 % lah Pak

UNIVERSITAS TERBUKA



## Lampiran B. Transkrip Hasil Wawancara

## TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Informan : 7

Tempat/Tanggal/Waktu : Muntok/ 16 April 2010/10:15 WIB

Pewawancara : Peneliti

Hasil :

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Tahun berapa koperasi ini dibentuk?	Dibentuknya 8 Juni tahun 2004
2	Apakah langsung berbadan hukum?	Ya...langsung berbadan hukum
3	Bagaimana cara pembentukan koperasi?	Pertama-tama kita mengumpul dari sejumlah masyarakat pesisir untuk dijadikan anggota koperasi diadakan rapat lebih kurang sebanyak 100 orang nah dari situ kita mengajukan untuk pembentukan koperasi itu juga dari referensi dari Dinas Kelautan dan Perikanan
4	Adakah peran serta masyarakat pesisir dalam pembentukan koperasi ini?	Oh ya sangat-sangat banyak dari mereka itu kan dapat masukan harus bagaimana-bagaimana membentuk koperasi masukan dari mereka gitu
5	Bagaimana sosialisasi kepada masyarakat pesisir tentang Program PEMP?	Sosialisasi itu kita datang kesana ke daerah daerah pesisir kita kasih penjelasan dengan mereka apa tujuan program PEMP tersebut nanti peran serta koperasi tersebut terhadap masyarakat pesisir itu gimana sudah kita jelasin kepada mereka
6	Adakah kriteria khusus bagi masyarakat yang akan meminjam?	Kriteria khusus kita mayoritasnya ini masyarakat pesisir e begini meminjam disini mayoritasnya masyarakat pesisir kaum nelayan ya dari nelayan, pengolah-pengolah ikan, penampung ikan nah itu mayoritas disini itu berhubungan dengan hasil laut
7	Berapa persen bunga pinjaman yang diberikan?	75 % itu ke nelayan 25 % ke masyarakat umum, bunga pinjamannya 18 %
8	Apakah dalam meminjam memakai jaminan?	Jelas itu pakai untuk pinjaman diatas 1 juta kita pakai jaminan maksimalnya dua tahun
9	Berapa lama jangka waktu untuk mengembalikan	Tergantung pinjaman artinya begini kan sebelum kita kasih pinjaman ke

## Lampiran B. Transkrip Hasil Wawancara

No	Pertanyaan	Jawaban
	pinjaman?	masyarakat kita survey dulu layaknya mereka dapat pinjaman itu setahun, setahun setengah atau dua tahun tapi rata-ratanya untuk nelayan ini dua tahun tergantung kesanggupan mereka lah gimananya
10	Apabila terlambat mengembalikan apakah ada sanksi yang diberikan?	Ada pertama denda, denda itu kita kenain 5 % dari jumlah cicilann ya tapi alhamdulillah rata-rata sih untuk ini sih kita belum sampai ke penyitaan itu belum rata-ratanya bagus
11	Bagaimana peranan koperasi dalam masyarakat pesisir? Apakah hanya menyalurkan pinjaman/kredit saja?	Peranan lainnya artinya begini selain kita ngasih pinjaman kita disini ada klinik bisnis artinya gini nelayan bisa konsultasi kita bagaimana mengelola uang yang ada di mereka kita kasih saran harusnya gimana gitu selain kasih pinjaman di sini ada klinik bisnis
12	Bagaimana cara penguenan dana? Apakah langsung dari pusat?	Dana PEMP ini kan dari pemerintah itu disalurkan ke Bukopin dari Bukopin baru dikasih kredit ke Koperasi Swamitra Mina ini gitu. kalau PNPM kita nggak
13	Bagaimana hubungan antara koperasi dan DKP?	Kalau hubungan sih kita bagus, orang DKP juga sering ke sini ninjau gitu kan kita juga tiap bulan ngasih laporan ke Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten, Provinsi dan Pusat
14	Saya ingin menanyakan apakah pengembalian kredit itu tergantung musim apa tidak?	Kalau pengembalian kredit dari nelayan, nelayan ini faktor musim sangat besar ini nya jadi pengembalian pada musim dia panen pengembaliannya cepat tapi pada musim-musim tertentu pengembaliannya lama gitu, sudah itu permasalahan sebenarnya dana koperasi ini ibaratnya kita kredit ke Bank Bukopin pada hal dana ini kan dari pemerintah disalurkan lewat Bukopin kita kena bunga sama Bukopin itu 6 % seharusnya dana ini kan dari pemerintah ini kan untuk membangun koperasi dan seharusnya bunga ini kan nggak segitu, artinya kalau kena bunga 6% kita harus membayar ke Bukopin itu



## Lampiran B. Transkrip Hasil Wawancara

No	Pertanyaan	Jawaban
15	Apakah selama ini dari pihak koperasi pernah mengajukan keberatan bunga 6 % itu kepada Departemen Kelautan dan Perikanan atau Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Barat?	<p>sekitar 90 jutaan artinya itu kan mengurangi SHU dari koperasi ini kalau bisa yang ini dihapusin gitu artinya menambah biaya di koperasi</p> <p>Dulu kita pernah mengajukan surat ke Bukopin kita minta keringanan dari jasa teknologi setiap bulan itu kita kena satu juta waktu itu kita minta keringanan lima puluh persen dari situ berarti lima ratus ribu tapi sampai sekarang belum ada tanggapan itu tahun kemaren lho kalau nggak salah tahun 2008 kita minta keringanan</p>
16	Dari Dinas sendiri bagaimana memfollow-up terhadap permasalahan yang dialami koperasi ini mengenai bunga 6 %?	<p>Dulu pernah kita ngomong ke Kepala Dinas, memang harus ya sih memang dari kita koperasi langsung ke Bukopin dan maksudnya secara ini ada pendekatan kepada Bukopin minta keringanan tersebut tapi kita sendiri ngerasa Bukopin itu sendiri kurang artinya mereka kan harusnya setiap 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali itu monitoring ke Koperasi Swamitra Mina tapi kenyataannya sampai sekarang kan nggak dan ini juga tahun 2009 awal ke Bukopin di Swamitra Mina Pangkalpinang untuk minta di monitoring artinya kan kita bisa menyampaikan unek-unek kita</p>
17	Apakah selama ini Koperasi Swamitra Mina ini ada pertemuan seluruh Indonesia katakanlah ada rapat koordinasi dengan Departemen Kelautan dan Perikanan Pak?	<p>Pernah di tahun 2009 kemaren pertemuannya di Puncak seluruh Swamitra Mina semacam koordinasi lah itu pernah, hal ini pernah disampaikan pada rapat itu</p>
18	Tanggapan dari Departemen Kelautan dan Perikanan sendiri bagaimana Pak?	<p>Waktu itu sih mereka bilang, ya memang biaya tersebut itu tidak sebesar itu lho...kalau ini katanya kembali lagi ke koperasi masing-masing buat dilayangkan suratnya ke Bukopin minta keringanan tapi sampai sekarang belum ada tanggapan</p>
19	Kira-kira apa lagi perlu Bapak sampaikan dalam hal ini?	<p>Poin yang pertamanya minta supaya Bukopin ini bisa monitoring ke setiap</p>



## Lampiran B. Transkrip Hasil Wawancara

No	Pertanyaan	Jawaban
		Koperasi Swamitra Mina, kedua mungkin tadi dari biaya bunga kalau bisa diturumin jangan 6 %, ketiganya jasa teknologi setiap bulan Swamitra Mina minta diringani jangan sampai 1 juta
20	Mengenai Kedai Pesisir apakah ditangani oleh koperasi apa tidak?	Kedai pesisir bukan di kita
21	SPBN juga bukan?	Bukan
22	Saya ingin menanyakan lagi mengenai struktur organisasi dan personilnya berapa orang Pak?	Kalau dari pengurus Koperasi LEPP-M3 Bangka Barat itu jumlah pengurusnya lima, ditambah dengan jumlah badan pengawas itu tiga, personil dari Swamitra Mina itu sendiri ada tujuh, lima untuk kantor duanya untuk cleaning service
23	Mengenai lingkaran strukturnya bagaimana Pak?	Dari koperasi Ketuanya dipegang sama Azwar Zubir, Wakil Ketua Fauka Ali, Sekretarisnya dipegang sama Drs. Hendra Yana, Wakil Sekretarisnya Abang Johan, Bendaharanya Isnaini, untuk Badan Pengawas Ketuanya Usman Yakob, Anggotanya Sakijan, Anggota 2 nya saudara Khairullah, nah kalau untuk Swamitra Mina Manajernya Mukhlis, Intra Controlnya Tarmizi Sa'i, Account Officer Arief Rachman, Tellernya Yoli, Collectornya Angga. Untuk Cleaning Service untuk dibagian dalamnya yaitu Salim Abdullah, untuk yang diluar Rita
24	Apakah Kedai Pesisir atau SPBN itu harus dibawah koperasi atau bagaimana Pak?	Secara partinya saya tidak tahu ya tapi saya pernah baca ada di pedumnya itu kalau enggak salah SPBN sama Kedai Pesisir itu kan satu paket di program PEMP tahun 2005 ya. sebenarnya itu lebih bagusnya itu dia langsung dibawah koperasi pertama kan artinya koperasi itu cabangnya mendapat produksinya itu bukan hanya dari simpan pinjam aja gitu lho bisa dapat dari SPBN bisa dapat dari Kedai Pesisir nah masyarakat juga itu kan juga tujuannya untuk masyarakat pesisir

## Lampiran B. Transkrip Hasil Wawancara

## TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Informan : 8

Tempat/Tanggal/Waktu : Desa Air Nyato/ 17 April 2010/09:11 WIB

Pewawancara : Peneliti

Hasil :

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana bapak mengetahui Program PEMP?	Tapi dari Pemerintah Kabupaten melalui Kecamatan, Koperasi Swamitra dan nelayan
2	Apakah ada pendataan terhadap keluarga nelayan?	Ada kurang lebih 80 % masyarakat kami adalah nelayan jumlahnya kurang lebih tiga ratus orang yang memiliki perahu dan bagan, yang mendapatkan kredit PEMP tujuh puluh lebih orang
3	Apa bentuk bantuan yang diberikan? Uang, penyuluhan atau peralatan?	Yang pertama adalah penyuluhan, dan yang kedua adalah uang untuk peralatan saya belum pernah
4	Apakah bapak mengerti tentang Program PEMP ini?	Mengerti
5	Apakah bapak dapat menerima Program PEMP ini?	Kita menerima dua kali pinjaman, pertama tahun pertama pelaksanaan koperasi dan kemarin sebelum ada acara tahunan kita dua kali mendapat pinjaman, yang pertama lima juta yang kedua tujuh juta
6	Apa yang diharapkan dari program ini?	Yang kami harapkan kedepannya dengan adanya pinjaman dari PEMP ini, terutama kami pribadi dan masyarakat kami bisa meningkatkan taraf hidupnya keluarganya dalam lingkungan masyarakat khususnya masyarakat Desa Air Nyato
7	Adakah penyuluhan yang diberikan dari DKP atau Koperasi?	Penyuluhan ke desa-desa dari dinas sudah pernah Cuma separuh dari peminjam juga dari koperasi
8	Sudah berapa lama menerima bantuan?	Pertama tahun 2006 sudah empat tahun
9	Bagaimana cara pengembalian?	Diangsur setiap bulan disesuaikan dengan pokok dan bunga, kalau kita minjam lima juta itu pengembaliannya tiga ratus lima



## Lampiran B. Transkrip Hasil Wawancara

No	Pertanyaan	Jawaban
		puluh ribu untuk pokok dan bungaselama duapuluh empat bulan atau dua tahun
10	Adakah peningkatan pendapatan setelah mendapat pinjaman?	Ada Alhamdulillah dengan adanya pinjaman tersebut sangat menguntungkan sekali bagi kami cuma yang kasihan itu yang tidak kebagian
11	Dalam sebulan berapa kali melaut?	Selama kita menjadi kepala desa agak berkurang yang sebelumnya itu kita ke bagan itu duapuluh malam setiap bulan
12	Berapa besar pengeluaran untuk satu kali melaut?	Kalau untuk bagan tancap kurang lebih untuk satu malam itu tujuhpuluhlima ribu sudah termasuk makan dan bensin
13	Berapa kebutuhan untuk keluarga dalam sebulan?	Kurang lebih empat ratus lima puluh ribu untuk sekeluarga dalam satu bulan untuk dua anak
14	Berapa orang yang ikut melaut?	Kita sendiri-sendiri
15	Bagaimana cara pembagian hasil?	-
16	Apakah keberatan dengan persyaratan yang diberikan oleh koperasi?	Tidak Pak karena sesuai dengan pengajuan, cuma yang keberatan bagi kami peminjam yang lunas ini terus terang bagi yang nunggak itu kata koperasi ada istilah penyitaan cuma itu yang membuat kami merasa kecewa, yang kita punya jaminan misalnya motor cuma dari koperasi tersebut ada toleransinya dengan kita diberi waktu. Tapi syukurnya belum pernah ada penyitaan
17	Apakah ada wadah yang dibentuk oleh pemerintah? Misalnya koperasi nelayan atau sejenisnya?	Ada koperasi nelayan HNSI Himpunan Nelayan tapi tidak berjalan yang diketuai oleh Nono kelihatannya warga ini tidak percaya sehinggatidak ada peningkatan
18	Apakah ada penyuluhan dari DKP tentang cara menangkap ikan, pelestarian alam, dan menjaga ekosistem perikanan?	Belum pernah, cuma sama Dinas Perikanan itu kalau kita ketemu bertanya dijelaskan tidak ada sistem pelatihan-pelatihan, cuma kalau ke Kabupaten memang pernah para nelayan itu dua orang tiga orang diundang perwakilannya
19	Apakah koperasi ada menganjurkan agar menjual	Nggak pernah, mungkin karena tidak ada pembentukan koperasi disini atau gagal



## Lampiran B. Transkrip Hasil Wawancara

No	Pertanyaan	Jawaban
	hasil tangkapan atau hasil olahan ikan kepada koperasi?	dibentuk
20	Apa yang bapak harapkan dari pemerintah dan koperasi dalam memberdayakan masyarakat pesisir?	Maksud kami diharapkan kedepan terutama yang nunggak ini harus diminta setiap bulan supaya masyarakat lain bisa merasakan juga itu maksud kita dan juga kami harapkan pemerintah kabupaten ini bisa menambah daripada dana tersebut agar bisa disalurkan kepada masyarakat nelayan dan pesisir
21	Apakah Bapak tahu bantuan-bantuan apa saja yang diberikan oleh pihak kabupaten selain kredit ini untuk para nelayan?	Perahu boat kita menerima pada tahun 2008 sebanyak lima unit, pada tahun 2006 kita juga menerima lima unit dari kabupaten dan juga kita pernah menerima tiga buah ice box tempat penampungan ikan pada tahun 2008, tahun 2007 kita menerima satu paket mesin tanpa perahu, tali, jaring, pelampung, batu satu paket
22	Selain dari Kabupaten mungkin juga pernah menerima bantuan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, apa-apa saja yang dikasih bantuan Pak?	Tahun 2006 lima unit perahu boat dari provinsi, kemudian tahun 2007 kita menerima dua unit mesin, jaring dan juga lengkap dengan pelampungnya tidak ada perahu, tahun 2008 juga kita menerima satu unit dari provinsi tidak ada perahu termasuk jaring komplit, dan tahun 2007 kalau tidak salah ada bantuan mie duz dan saos cabe ini kepedulian terhadap nelayan bantuan dari provinsi kurang lebih 150 kotak dibagikan kepada kurang lebih 200 orang
23	Apa yang Bapak harapkan dari pihak kabupaten dan pihak provinsi dalam peningkatan kapasitas kemampuan ekonomi masyarakat pesisir di Desa Air Nyato ini Pak?	Kedepannya yang kami harapkan agar pemerintah kabupaten dan provinsi agar menyadari bahwa terutama masyarakat kami adalah 80 % dibidang nelayan kami harapkan apa yang kami usulkan kepada pemerintah kabupaten dan provinsi tanggap bahwa mereka adalah masyarakat nelayan jadi bantuan-bantuan itu kami harapkan kedepan malah ditambah lagi supaya masyarakat nelayan ini merasakan terutama mata pencarian adalah dari nelayan jadi dengan adanya

## Lampiran B. Transkrip Hasil Wawancara

No	Pertanyaan	Jawaban
		bantuan itu Insya Allah agar masyarakat ini tidak terlantar terutama dalam kehidupan sehari-hari
4	Apakah selain jadi nelayan penduduk Desa Air Nyato ini juga melakukan kegiatan industri rumah tangga seperti bikin kerupuk, kemplang atau pempek, ikan asin atau abon ikan?	Nah itu juga ada Pak sebagian masyarakat kami cuma dalam pengolahan ikan ada dijual kepada pedagang keliling ikan basah mereka mengambilnya kepada penjual kemplang tadi dan juga sebagian lagi dibikin juga empek-empek dijual pada pagi-pagi hari dan juga dijual dipinggir pantai
5	Kira-kira berapa KK yang bergerak di industri rumah tangga yang berbasis ikan ini Pak?	Untuk pembuat kemplang itu kurang lebih sepuluh orang dan juga pedagang kecil-kecilan untuk pembuat pempek kurang lebih sepuluh orang. Jadi dengan ini kami harapkan seandainya kedepan ada usulan untuk bidang-bidang tersebut kami harapkan pemerintah kabupaten dan provinsi bisa menanggapi usulan tersebut agar bisa menyalurkan ke desa kami



## Lampiran B. Transkrip Hasil Wawancara

## TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Informan : 9  
 Tempat/Tanggal/Waktu : Mentok Asin/ 17 April 2010/15:26 WIB  
 Pewawancara : Peneliti  
 Hasil :

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana bapak/ibu mengetahui Program PEMP?	Dari Dinas Perikanan dan dari Koperasi Swamitra Mina
2	Apakah ada pendataan terhadap keluarga nelayan?	Tidak ada
3	Apa bentuk bantuan yang diberikan? Uang, penyuluhan atau peralatan?	Peralatan dan uang pinjaman dari Koperasi
4	Apakah bapak/ibu mengerti tentang Program PEMP ini?	Mengerti sedikit banyaknya saya mengerti
5	Apakah bapak/ibu dapat menerima Program PEMP ini?	Dapat menerima
6	Apa yang diharapkan dari program ini?	Banyak sekali yang saya harapkan, terutama bantuan boat dan mesin ini sangat kami butuhkan
7	Adakah penyuluhan yang diberikan dari DKP atau Koperasi?	Ada semuanya Pak
8	Sudah berapa lama menerima bantuan?	Sudah 6 (enam) bulan ini saya mendapatkan bantuan boat dan mesin, untuk pinjaman kredit dari koperasi sudah lama Pak waktu pinjaman pertama 5 juta sampaikan sudah 3 (tiga) kali minjam. Pengembalian pinjaman itu perbulan, ada peningkatan ekonomi semenjak saya mendapatkan pinjaman kredit dan bantuan boat beserta mesinnya
9	Bagaimana cara pengembalian?	Pengembalian pinjaman itu perbulan
10	Adakah peningkatan pendapatan setelah mendapat pinjaman?	Ada peningkatan Pak
11	Dalam sebulan berapa kali melaut?	Hampir tiap malam, kalau cuaca buruk pulang tidak melaut
12	Berapa besar pengeluaran untuk satu kali melaut?	Kurang lebih Rp.50.000 Pak
13	Berapa kebutuhan untuk	Kurang lebih Rp.200.000 Pak



## Lampiran B. Transkrip Hasil Wawancara

No	Pertanyaan	Jawaban
	keluarga dalam sebulan?	
14	Berapa orang yang ikut melaut?	Untuk saat ini satu boat untuk satu orang
15	Bagaimana cara pembagian hasil?	Pembagian hasil masing-masing
16	Apakah keberatan dengan persyaratan yang diberikan oleh koperasi?	Tidak lah Pak agak ringan
17	Apakah ada wadah yang di bentuk oleh pemerintah? Misalnya koperasi nelayan atau sejenisnya?	Koperasi Swamitra Mina ini lah. koperasi yang lain tidak ada
18	Apakah ada penyuluhan dari DKP tentang, cara menangkap ikan, pelestarian alam, dan menjaga ekosistem perikanan?	Kalau masalah itu ada dalam rapat tempo hari sudah 6 (enam) kali rapat semenjak mendapat bantuan dan sudah diterangkan semuanya
19	Apakah koperasi ada menganjurkan agar menjual hasil tangkapan atau hasil olahan ikan kepada koperasi?	Tidak ada jadi dijual masing-masing
20	Apa yang bapak/ibu harapkan dari pemerintah dan koperasi dalam memberdayakan masyarakat pesisir?	Kalau dapat bantuan ini jangan sampai berhenti disini, kalau dapat terus menerus setiap dua tahun sekali dapat lagi

## Lampiran B. Transkrip Hasil Wawancara

## TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Informan : 10

Tempat/Tanggal/Waktu : Desa Air Nyato/ 17 April 2010/13:42 WIB

Pewawancara : Peneliti

Hasil :

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana bapak/ibu mengetahui Program PEMP?	Tahunya dari kawan-kawan baru kita ngikuti
2	Apakah ada pendataan terhadap keluarga nelayan?	Tidak tahu Pak
3	Apa bentuk bantuan yang diberikan? Uang, penyuluhan atau peralatan?	Uang kalau peralatan tidak ada, penyuluhan juga tidak ada
4	Apakah bapak/ibu mengerti tentang Program PEMP ini?	Mengerti
5	Apakah bapak/ibu dapat menerima Program PEMP ini?	Suka Pak dapat menerima
6	Apa yang diharapkan dari program ini?	Supaya peningkatan penghasilan masyarakat nelayan
7	Adakah penyuluhan yang diberikan dari DKP atau Koperasi?	Setahu saya belum ada Pak
8	Sudah berapa lama menerima bantuan?	Kalau berupa uang baru sebulan lebih ini Pak, kalau yang dulunya sekitar tiga tahun yang lalu, yang pertama lima juta sudah itu minjam lagi sebanyak 11,5 juta
9	Bagaimana cara pengembalian?	Kita hitung tiap bulan, yang pertama saya pinjam 5 juta dulu tiga ratus lebih, yang sebelas setengah itu kena tujuh ratus ribu Pak dengan tabungan
10	Adakah peningkatan pendapatan setelah mendapat pinjaman?	Ada Pak banyak ringan, kalau kita buka usaha perahu itu kalau kita kurang modal kita ngambil, sudah itu para nelayan itu kalau bikin bagan pakai perahu mereka ringan juga belum ada duit dapat berkerja mereka ngutang juga sama saya tolong menolong saya dapat pinjaman saya pinjamkan lagi ke nelayan yang lain tanpa bunga Pak
11	Dalam sebulan berapa kali	Kalau tidak ada angin kencang tiap malam



## Lampiran B. Transkrip Hasil Wawancara

No	Pertanyaan	Jawaban
	melaut?	Pak. kalau sebulan sekitar lima belas malam paling banyak
12	Berapa besar pengeluaran untuk satu kali melaut?	Kalau aku itu dengan mesin dan lampu gensetnya sekitar seratus ribu Pak
13	Berapa kebutuhan untuk keluarga dalam sebulan?	Sejuta setengah lah kurang lebih
14	Berapa orang yang ikut melaut?	Yang ikut boat saya delapan orang sampai sembilan orang yang numpang ikut ke bagan dengan ongkos duapuluh lima ribu semalam Pak.
15	Bagaimana cara pembagian hasil?	Kalau dia orang masing-masing jualnya dan mereka numpang perahu boat saya saja, sedangkan bagan punya mereka sendiri
16	Apakah keberatan dengan persyaratan yang diberikan oleh koperasi?	Nggak juga lah Pak
17	Apakah ada wadah yang di bentuk oleh pemerintah? Misalnya koperasi nelayan atau sejenisnya?	Perasaan saya belum ada Pak
18	Apakah ada penyuluhan dari DKP tentang cara menangkap ikan, pelestarian alam, dan menjaga ekosistem perikanan?	Kalau saya belum ada Pak, tapi kalau orang lain ada kemungkinan
19	Apakah koperasi ada menganjurkan agar menjual hasil tangkapan atau hasil olahan ikan kepada koperasi?	Tidak ada Pak
20	Apa yang bapak/ibu harapkan dari pemerintah dan koperasi dalam memberdayakan masyarakat pesisir?	Supaya lain kali lebih lancar dari bidang peminjaman atau yang lainnya Pak. Kalau bantuan untuk nelayan yang tidak mampu sudah banyak Pak disini seperti mesin 2 pk, perahu, pukot kantong, dan bagan banyak Pak pada tahun berapa-berapa dulu tapi harap maklum majunya lambat
21	Kira-kira berhasil nggak bantuan-bantuan alat-alat itu Pak?	Kurang nggak begitu berhasil Pak
22	Kenapa nggak berhasil?	Kadang-kadang karena cuaca buruk, pendapatan kurang karena mancing dan mukat itu Pak, kalau bantuan sudah banyak



## Lampiran B. Transkrip Hasil Wawancara

No	Pertanyaan	Jawaban
23	Jadi menurut Bapak manfaat dari bantuan-bantuan pemerintah itu tergantung musim juga?	perahu, pukot kantong, mesin disebutnya bantuan itu kredit tapi kredit itu kadang-kadang kalau nggak dibayar nggak apa-apa Ya Pak, kalau musim barat kurang berhasil
24	Apakah menurut Bapak bantuan alat-alat untuk nelayan tersebut apakah dijual lagi oleh nelayan?	Rasa-rasanya tidak ada, dimanfaatkan tetapi kadang-kadang kalau mesin yang kecil dua sampai tiga bulan sudah roboh jadi hitung-hitungan dia orang tidak dapat hasil karena cepat rusak. Dikasih bantuan itu berkelompok untuk tujuh orang jadi dia orang berkelahi berebutan untuk memakainya.
25	Apakah selama mendapatkan pinjaman ini ada peningkatan secara ekonomi Pak?	Iya Pak
26	Saya ingin menanyakan masalah pendidikan anak Bapak, Bapak punya anak berapa?	Empat orang
27	Anak Bapak yang S-1 berapa orang?	Satu orang
28	Anak Bapak yang SMA berapa orang?	Belum ada Pak, yang SMP ada satu orang yang dua orang lagi sudah berkeluarga
29	Saya mau menanyakan tentang tingkat kesehatan bagaimana Pak, apakah ada puskesmas disini?	Ada Pak disini
30	Bagaimana pelayanan terhadap masyarakat?	Kalau dengar-dengar kabarnya pelayanan baik Pak
31	Mengenai sekolah disini SD berapa unit?	Ada empat Pak, SMP satu gedung sedangkan SD tiga gedung

## Lampiran B. Transkrip Hasil Wawancara

## TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Informan : H  
 Tempat/Tanggal/Waktu : Mentok Asin/25 Mei 2010/13:15 WIB  
 Pewawancara : Peneliti  
 Hasil :

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana bapak mengetahui Program PEMP?	Saya tahu dari orang Dinas Perikanan dan Kelautan dan Koperasi
2	Apakah ada pendataan terhadap keluarga nelayan?	Ada oleh Dinas Kelautan dan Perikanan
3	Apa bentuk bantuan yang diberikan? Uang, penyuluhan atau peralatan?	Kalau oleh koperasi berupa uang
4	Apakah bapak/ibu mengerti tentang Program PEMP ini?	Mengerti Pak
5	Apakah bapak/ibu dapat menerima Program PEMP ini?	Saya dapat menerima
6	Apa yang diharapkan dari program ini?	Saya mengharapkan program ini terus dilanjutkan
7	Adakah penyuluhan yang diberikan dari DKT atau Koperasi?	Ada Pak oleh dinas ada oleh koperasi juga
8	Sudah berapa lama menerima bantuan?	Sejak dari tahun 2005
9	Bagaimana cara pengembalian?	Saya cicil tiap bulan Pak
10	Adakah peningkatan pendapatan setelah mendapat pinjaman?	Ada Pak dengan adanya pinjaman pendapatan kami meningkat
11	Dalam sebulan berapa kali melaut?	Kalau cuaca baik kami melaut sebulan kira-kira 24 kali Pak
12	Berapa besar pengeluaran untuk satu kali melaut?	Sekali melaut Pak antara 70 - 100 ribu
13	Berapa kebutuhan untuk keluarga dalam sebulan?	Kira-kira satu juta setengah
14	Berapa orang yang ikut melaut?	Biasanya kami berdua Pak
15	Bagaimana cara pembagian hasil?	Karena Saya pemilik perahu Saya dapat 70 % temen Saya 30 % pembagiannya
16	Apakah keberatan dengan persyaratan yang diberikan oleh koperasi?	Tidak ada Pak
17	Apakah ada wadah yang di bentuk	Setahu Saya koperasi nelayan belum

## Lampiran B. Transkrip Hasil Wawancara

No	Pertanyaan	Jawaban
	oleh pemerintah? Misalnya koperasi nelayan atau sejenisnya?	ada yang ada hanya Koperasi Swamitra Mina
18	Apakah ada penyuluhan dari DKP tentang cara menangkap ikan, pelestarian alam, dan menjaga ekosistem perikanan?	Ada Pak tapi sudah lama sekali 5 bulan yang lalu
19	Apakah koperasi ada menganjurkan agar menjual hasil tangkapan atau hasil olahan ikan kepada koperasi?	Tidak Pak kami jual masing
20	Apa yang bapak/ibu harapkan dari pemerintah dan koperasi dalam memberdayakan masyarakat pesisir?	Kami harapkan supaya program ini terus berlanjut kalau bisa ditingkatkan lagi Pak

UNIVERSITAS TERBUKA



## Lampiran B. Transkrip Hasil Wawancara

## TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Informan : 12  
 Tempat/Tanggal/Waktu : Desa Air Nyato/17 April 2010/11:02 WIB  
 Pewawancara : Peneliti  
 Hasil :

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana bapak mengetahui Program PEMP?	Dari Koperasi Swamitra Mina
2	Apakah ada pendataan terhadap keluarga nelayan?	Dari koperasi tidak ada tapi dari Dinas Kelautan dan Perikanan ada Pak
3	Apa bentuk bantuan yang diberikan? Uang, penyuluhan atau peralatan?	Kalau dari Koperasi Swamitra Mina berupa uang, kalau dari Dinas seperti peralatan tangkap berupa boat, dan jaring. Kalau penyuluhan belum ada Pak
4	Apakah bapak mengerti tentang Program PEMP ini?	Kurang mengerti Pak, tapi maksudnya saya tahu yaitu untuk membantu terutama masyarakat pesisir berupa modal usaha
5	Apakah bapak dapat menerima Program PEMP ini?	Ya saya menerima
6	Apa yang diharapkan dari program ini?	Ya saya cukup terbantulah sekarang, saya mengharapkan lancar-lancar saja Koperasi Swamitra Mina agar tetap eksis supaya kami bisa minjam lagi
7	Adakah penyuluhan yang diberikan dari DKP atau Koperasi?	Dulu waktu rapat pernah ada penyuluhan
8	Sudah berapa lama menerima bantuan?	Sudah sekitar lima tahun sejak tahun 2005 - 2010
9	Bagaimana cara pengembalian?	Kreditan seperti di bank di bayar perbulan dengan bunga 18 %
10	Adakah peningkatan pendapatan setelah mendapat pinjaman?	Kalau dipikir-pikir ada juga peningkatan selama minjam di Koperasi Swamitra Mina ini
11	Dalam sebulan berapa kali melaut?	Kalau melaut ini tergantung di cuaca jadi tidak tentu kalau cuaca bagus turun, kalau sebulan paling-paling seminggu berhenti melaut, tiga minggu melaut terus
12	Berapa besar pengeluaran untuk satu kali melaut?	Tidak tentu kadang ratusan kadang puluhan, kalau ratusan sekitar seratus lima

## Lampiran B. Transkrip Hasil Wawancara

No	Pertanyaan	Jawaban
		puluh kalau puluhan sekitar lima puluh ribu
13	Berapa kebutuhan untuk keluarga dalam sebulan?	Sekitar satu juta untuk dua anak
14	Berapa orang yang ikut melaut?	Kalau saya punya bagan dua unit, dan boat mesin satu unit kalau berangkat saya sendiri kalau anak buah saya bawa boat sendiri
15	Bagaimana cara pembagian hasil?	Potong ongkos bagi dua, 50 % untuk yang turun dan 50 % untuk yang punya kapal
16	Apakah keberatan dengan persyaratan yang diberikan oleh koperasi?	Untuk sekarang ini saya rasa tidak keberatan
17	Apakah ada wadah yang dibentuk oleh pemerintah? Misalnya koperasi nelayan atau sejenisnya?	Untuk saat ini belum ada
18	Apakah ada penyuluhan dari DKP tentang cara menangkap ikan, pelestarian alam, dan menjaga ekosistem perikanan?	Kalau setahu saya dari Koperasi Swamitra Mina belum ada, dari dinas juga belum ada
19	Apakah koperasi ada menganjurkan agar menjual hasil tangkapan atau hasil olahan ikan kepada koperasi?	Belum pernah ada, dijual masing-masing
20	Apa yang bapak harapkan dari pemerintah dan koperasi dalam memberdayakan masyarakat pesisir?	Dari seluruh nasabah Koperasi Swamitra Mina himbauan mengenai masalah bunga menurut saya terlalu besar kalau bisa dikecilkan sedikit misalkan nelayan itu ada yang berpenghasilan sedikit dan besar kan tidak tentu



## Lampiran B. Transkrip Hasil Wawancara

## TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Informan : 13  
 Tempat/Tanggal/Waktu : Desa Air Nyato/17 April 2010/12:18 WIB  
 Pewawancara : Peneliti  
 Hasil :

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah Ibu pernah mengajukan kredit PEMP?	Pernah tetapi ditolak
2	Alasannya kenapa ditolak Bu?	Alasannya karena dulu ada minjam di BRI
3	Apakah sekarang di BRI sudah lunas Bu?	Sudah
4	Apa jawaban dari koperasi Swamitra Mina Bu?	Tidak ada komentar pengen dikasih ajuan surat tidak dapat minjam lima juta dia tidak ada apakah mau dikirim anu itulah tidak dapat minjam lima juta entah enggak ada lagi
5	Apakah Ibu tahu manfaat kredit PEMP itu kan?	Tahu
6	Ibu ini nelayan tangkap atau bagan?	Bagan
7	Ibu punya bagan berapa?	Dua
8	Bagaimana hasilnya?	Kalau tahun ini belum ada hasil tapi kalau tahun tadi puaslah hasilnya
9	Satu bulan dari hasil bagan itu berapa rupiah Bu?	Kalau tahun ini belum tahu karena belum mengasihkan, kalau sebelumnya lima juta lah pastinya karena kami nyirok sendiri barang kami sendiri kan
10	Untuk biaya hidup sebulan berapa Bu?	Nggak tahu lah Pak tapi untuk ke bagan 70 ribu semalam melihat hasil bagan
11	Selain dari bagan apa yang Ibu usahakan?	Menjaring ikan
12	Punya anak berapa orang Bu?	Tiga
13	Yang sekolah berapa orang?	SD satu orang, satunya lagi sudah belaki (bersuami)
14	Yang paling tua anak Ibu tamatan apa?	Tamatan SD
15	Ibu mau mengajukan lagi nggak tahun ini?	Nggak...mendingan minjam sama kredit harian
16	Tapi bunganya besar itu Bu?	Tapi yang penting kami lima juta cast lima juta tahun ini kami minjam



## Lampiran B. Transkrip Hasil Wawancara

No	Pertanyaan	Jawaban
17	Minjam sama rentenir ya Bu?	Tidak dengan koperasi yang pakai motor tu
18	Berapa persen bunganya Bu?	Kalo sejuta....dua ratus sekitar 20 % kalau kita tidak bisa bayar nggak apa-apa malah mau dipinjamnya lagi kalau kami sih bayar habis
19	Kalau setiap hari berapa Bu?	Kalau sejuta ...tiga puluh ribu per hari selama 40 hari
20	Apakah pernah di data oleh pihak Dinas Kelautan dan Perikanan serta pihak koperasi nggak Bu?	Belum

UNIVERSITAS TERBUKA



UNIVERSITAS TERBUKA

Kementerian Pendidikan Nasional  
**Universitas Terbuka**  
UPBJJ-UT Pangkalpinang

40564.pdf

Nomor : ~~017~~/H31.55/LL/2010  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Mendapatkan Data Penelitian

Pangkalpinang, 22 Maret 2010

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan  
Kabupaten Bangka Barat  
di.  
Mentok

Saat ini Mahasiswa S2 MAP semester 4 UPBJJ-UT Pangkalpinang sedang mempersiapkan penulisan TAPM atau Tesis, dan sehubungan dengan hal tersebut kami mohon agar Mahasiswa di bawah ini :

Nama : Rinaldy  
NIM : 015584669  
Program Studi : Magister Administrasi Publik (MAP)  
Masa Registrasi : 2008.2

Diijinkan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan pada instansi yang Bapak Pimpin. Adapun tema penelitian Mahasiswa tersebut adalah "Peningkatan Kapasitas Kemampuan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Kabupaten Bangka Barat."

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami sampaikan terima kasih.



- Tembusan :
1. Gubernur Prov. Kep. Bangka Belitung ( Pembina UPBJJ – UT Pangkalpinang )
  2. Direktur Pascasarjana – UT
  3. Arsip



UNIVERSITAS TERBUKA

Kementerian Pendidikan Nasional  
**Universitas Terbuka**  
 UPBJJ-UT Pangkalpinang

Nomor : 0381 /H31.55/LL/2010  
 Lampiran : -  
 Perihal : Permohonan izin Mendapatkan Data Penelitian

Pangkalpinang, 22 Maret 2010

Kepada  
 Yth. Camat Kecamatan Simpang Teritip  
 Di  
 Simpang Teritip

Saat ini Mahasiswa S2 MAP semester 4 UPBJJ UT Pangkalpinang sedang mempersiapkan penulisan TAPM atau Tesis, dan sehubungan dengan hal tersebut kami mohon agar Mahasiswa di bawah ini :

Nama : Rinaldy  
 NIM : 015584669  
 Program Studi : Magister Administrasi Publik (MAP)  
 Masa Registrasi : 2008.2

dijijinkan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan pada instansi yang Bapak pimpin. Adapun tema Penelitian Mahasiswa tersebut adalah "Peningkatan Kapasitas Kemampuan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Kabupaten Bangka Barat."

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami sampaikan terima kasih.



Kepala  
 Dr. Maman Rumanta, M.Si  
 NIP. 19630509 198903 1 002

**Tembusan :**

1. Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pembina UPBJJ UT Pangkalpinang)
2. Direktur Pascasarjana – UT
3. Arsip





UNIVERSITAS TERBUKA

Kementerian Pendidikan Nasional  
**Universitas Terbuka**  
 UPBJJ-UT Pangkalpinang

Nomor : 0369 /H31.55/LL/2010  
 Lampiran : -  
 Perihal : Permohonan izin Mendapatkan Data Penelitian

Pangkalpinang, 22 Maret 2010

Kepada  
 Yth. Kepala BAPEDA Kabupaten Bangka Barat  
 Di  
 Mentok

Saat ini Mahasiswa S2 MAP semester 4 UPBJJ UT Pangkalpinang sedang mempersiapkan penulisan TAPM atau Tesis, dan sehubungan dengan hal tersebut kami mohon agar Mahasiswa di bawah ini :

Nama : Rinaldy  
 NIM : 015584669  
 Program Studi : Magister Administrasi Publik (MAP)  
 Masa Registrasi : 2008.2

dijinkan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan pada instansi yang Bapak pimpin. Adapun tema Penelitian Mahasiswa tersebut adalah "Peningkatan Kapasitas Kemampuan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Kabupaten Bangka Barat."

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik kami sampaikan terima kasih.

**Tembusan :**

1. Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pembina UPBJJ UT Pangkalpinang)
2. Direktur Pascasarjana – UT
3. Arsip



UNIVERSITAS TERBUKA

Kementerian Pendidikan Nasional  
**Universitas Terbuka**  
 UPBJJ-UT Pangkalpinang

Nomor : 036 /H31.55/LL/2010  
 Lampiran : -  
 Perihal : Permohonan izin Mendapatkan Data Penelitian

Pangkalpinang, 22 Maret 2010

Kepada  
 Yth. Kepala BPS Kabupaten Bangka Barat  
 Di  
 Mentok

Saat ini Mahasiswa S2 MAP semester 4 UPBJJ UT Pangkalpinang sedang mempersiapkan penulisan TAPM atau Tesis, dan sehubungan dengan hal tersebut kami mohon agar Mahasiswa di bawah ini :

Nama : Rinaldy  
 NIM : 015584669  
 Program Studi : Magister Administrasi Publik (MAP)  
 Masa Registrasi : 2008.2

dijinkan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan pada instansi yang Bapak pimpin. Adapun tema Penelitian Mahasiswa tersebut adalah Peningkatan Kapasitas Kemampuan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Kabupaten Bangka Barat.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik kami sampaikan terima kasih.

**Tembusan :**

1. Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pembina UPBJJ UT Pangkalpinang)
2. Direktur Pascasarjana – UT
3. Arsip





UNIVERSITAS TERBUKA

Kementerian Pendidikan Nasional  
**Universitas Terbuka**  
UPBJJ-UT Pangkalpinang

40564.pdf

Nomor : 0368 /H31.55/LL/2010  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan izin Mendapatkan Data Penelitian

Pangkalpinang, 22 Maret 2010

Kepada  
**Yth. Camat Kecamatan Mentok**  
Di  
Mentok

Saat ini Mahasiswa S2 MAP semester 4 UPBJJ UT Pangkalpinang sedang mempersiapkan penulisan TAPM atau Tesis, dan sehubungan dengan hal tersebut kami mohon agar Mahasiswa di bawah ini :

Nama : Rinaldy  
NIM : 015584669  
Program Studi : Magister Administrasi Publik (MAP)  
Masa Registrasi : 2008.2

dijinkan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan pada instansi yang Bapak pimpin. Adapun tema Penelitian Mahasiswa tersebut adalah "Peningkatan Kapasitas Kemampuan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Kabupaten Bangka Barat."

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami sampaikan terima kasih.



*Kepala*  
Dr. Maman Rumanta, M.Si  
NIP. 19630509 198903 1 002

**Tembusan :**

1. Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pembina UPBJJ UT Pangkalpinang)
2. Direktur Pascasarjana – UT
3. Arsip